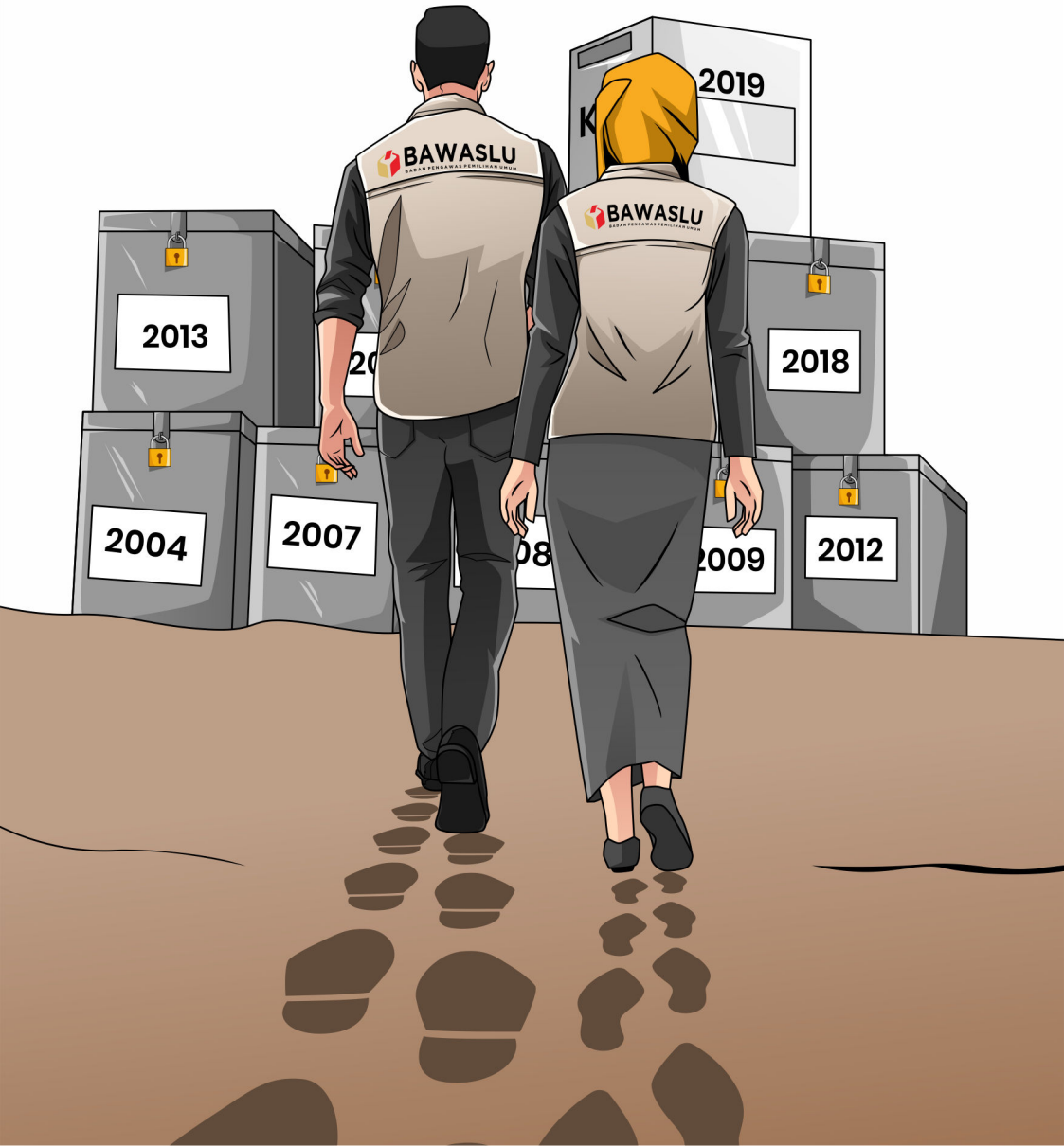


Napak Tilas

SEJARAH PENGAWAS PILKADA & PEMILU KABUPATEN CILACAP 2004-2019



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

NAPAK TILAS

**SEJARAH PENGAWAS PILKADA DAN PEMILU
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2004-2019**



Napak Tilas

Sejarah Pengawas Pilkada dan Pemilu Kabupaten Cilacap Tahun 2004-2019

© Copyright

- ISBN : 978-623-93193-2-8
- Penulis : Bachtiar Hastiarto
Erina Hastuti
Warsid
Miftah Nuryanto
Umi Fadilah
Joko Waluyo
Prima Utama Paristya
Muhammad Abdul Fattah
- Tim Riset : Herdiaz Passananda
Galang Luh Prasetyo
Agung Bagus Pambudi
Sansan Sanjaya
- Editor : Lukman Nur Hakim
- Desain Cover : Ardia Nur Ali Made Sudrajat
- Cetakan Pertama : Agustus 2022

Penerbit:

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Cilacap

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.200, Gobok, Donan, Kec. Cilacap

Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53213 Telp. (0282)

5390269. E-mail: set.cilacap@bawaslu.go.id.

Website: cilacap.bawaslu.go.id.

© Hak Pengarang dan Penerbit dilindungi Undang – Undang No.
19 Tahun 2002. Dilarang Memproduksi, Memperbanyak dalam
bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kata Pengantar

Penyelenggaraan pesta Demokrasi dalam pemilihan Presiden, Wakil Presiden, anggota DPD, Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi serta Kabupaten/Kota merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Sebagai salah satu unsur penyelenggara pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada, Bawaslu wajib membumikan pengawasan Partisipatif kepada semua *stakeholder* ataupun masyarakat. Selain melakukan pencegahan pelanggaran pemilu serta pemilihan, Bawaslu juga melaksanakan fungsi penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan.

Pengetahuan yang luas mengenai peristiwa-peristiwa penting yang terangkum dalam proses Demokrasi di tahun 2004 hingga 2019, dari posisi pengawas pemilu masih bersifat kepanitian hingga menjadi suatu Badan permanen tentu saja menorehkan sejarah yang di setiap kabupaten berbeda.

Demikian pula di Kabupaten Cilacap, selain profil panwas yang berganti sesuai masa, di dalam buku ini juga di ceritakan berbagai dinamika yang terjadi dan dicoba dikemas dalam bahasa yang ringan agar semua pihak, yang memiliki keingintahuan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Cilacap khususnya mendapatkan gambaran, informasi yang berguna.

Buku ini berjudul “Napak Tilas Sejarah Pengawas Pilkada dan Pemilu Kabuapten Cilacap Tahun 2004-2019” merupakan gambaran sekelumit tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilu yang mengedepankan fungsi pencegahan

Kata Pengantar

pelanggaran pemilu. Jika dalam proses pemilu maupun pemilihan kepala daerah berjalan dengan baik dan lancar, Maka Bawaslu telah menjalankan fungsi kerja pengawasan dengan baik. Meski tidak meninggalkan proses penanganan pelanggaran, menandakan kinerja pengawasan dan pencegahan Bawaslu berjalan sesuai dengan harapan.

Cilacap, Agustus 2022

Bachtiar Hastiarto, S.H., M.H.
Ketua Bawaslu Cilacap

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PROFIL PENGAWAS PEMILU	5
• Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004	7
• Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007	31
• Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2008	47
• Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009	67
• Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012	87
• Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013	109
• Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	127
• Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017	147
• Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018	169
• Pemilihan Umum Tahun 2019	193
Bab III Penutup	215
Daftar Pustaka	223

BAB I

PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

Semboyan Jas Merah (jangan sekali-kali meninggalkan sejarah) yang diucapkan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno pada peringatan hari ulang tahun ke 21 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus Tahun 1966 sampai saat ini masih terasa sarat makna. Bagi Bangsa Indonesia yang pernah mengalami masa penjajahan selama 350 tahun, semboyan jas merah tentu membawa ingatan kita akan perjuangan para pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan.

Selain evaluasi tentang masa lalu, jasmerah juga menjadi motivasi dan semangat kita para penerus bangsa untuk refleksi kemasa depan yaitu *spirit* meneruskan dan mengisi kemerdekaan.

Kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa kemerdekaan, berkembang dinamis selaras dengan konstelasi dan kontestasi elit politik, terutama pada saat pemilihan umum. Sebagai penyelenggara Pemilihan Umum semboyan jangan sekali - kali meninggalkan sejarah juga penting dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu yang ada di Indonesia.

Jejak pengawasan pemilu yang mulai dilakukan pada tahun 2004 oleh Panwas Pemilu tentunya penting untuk dicatat dan dibukukan dalam buku sejarah berdasarkan dokumen laporan pengawasan, kesaksian jajaran pengawas pemilu yang masif aktif dan juga berdasarkan informasi dari pengawas pemilu yang sudah paripurna.

Penulisan buku Sejarah Pengawas Pemilu di Kabupaten Cilacap mencakup 10 kegiatan pengawasan yang diawali pada kegiatan Panwas Pemilihan Umum Tahun 2004, kemudian berikutnya adalah Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007,

Pendahuluan

Panwas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa-Tengah Tahun 2008, Panwas Pemilihan Umum Tahun 2009, Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, Panwas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa-Tengah Tahun 2013, Panwas Pemilihan Umum Tahun 2014, Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017, dan Bawaslu Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Rentang waktu penulisan buku sejarah pengawas pemilu yang diawali pada kegiatan Panwas Pemilu Tahun 2004 atau sekitar 18 tahun yang lalu ini membawa kendala dan tingkat kesulitan yang beragam. Beberapa kendala tersebut diantaranya adalah, adanya mantan anggota panwas yang sudah tidak lagi tinggal di Cilacap dan tidak diketahui keberadaannya, bahkan ada juga yang sudah meninggal dunia. Mantan anggota panwas yang berhasil dilacak keberadaannya dan bersedia diwawancara rata-rata sudah berusia lanjut sehingga kurang bisa mengingat dan menceritakan kembali peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi pada saat itu.

Perjalanan panjang jejak pengawas pemilu menjadi penting untuk ditulis dan dibukukan mengingat masing masing periode panwas pemilu memiliki dinamika, tingkat kesulitan dan tantangan tersendiri yang harus dihadapi dan diperjuangkan oleh para anggota panwaslu yang bertugas pada saat itu.

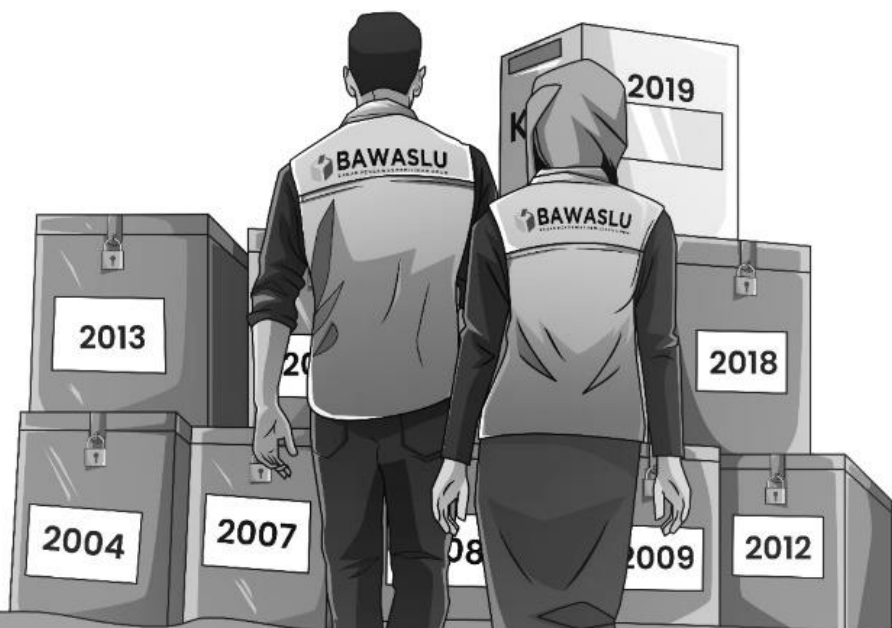
Buku sejarah pengawas pemilu akan menggambarkan rekam jejak personal dan lembaga baik itu yang berkaitan dengan, tantangan dan perjuangan, soliditas dan keberhasilan maupun kelebihan dan kekurangan yang ada pada personal maupun kelembagaan pengawas pemilu. Rekam jejak ini akan sangat bermanfaat bagi pengawas pemilu generasi berikutnya, guna menjadi bahan evaluasi dan refleksi membenahi kekurangan.

Buku Sejarah Pengawas Pemilu Kabupaten Cilacap Tahun 2004 hingga Tahun 2019 ditulis oleh Komisioner, staf melekat dan didukung sepenuhnya oleh Koordinator Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan seluruh staf Bawaslu Kabupaten Cilacap, semoga bermanfaat bagi para pembaca, khususnya yang ingin memperdalam tentang lika-liku dan dinamika pengawasan pemilu.

Pendahuluan

BAB II

PROFIL PENGAWAS PEMILU



PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2004

A. Konteks Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004

Untuk pertama kali Pemilu 2004 diselenggarakan secara langsung pada 5 April 2004 untuk memilih 550 Anggota DPR, 128 Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk masa jabatan 2004-2009. Sedangkan pemilu untuk memilih secara langsung Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2004-2009 yang digelar pada 5 Juli 2004 (putaran I) dan 20 September 2004 (putaran II).¹

Pemilu 2004 merupakan sejarah tersendiri bagi bangsa Indonesia, karena untuk pertama kalinya warga negara diberi kesempatan untuk memilih presidennya secara langsung. Pemilu pada tahun ini sekaligus membuktikan upaya serius untuk mewujudkan sistem pemerintahan presidensial yang dianut di dalam konstitusi Indonesia.

Sistem yang digunakan pada Pemilu 2004 adalah proporsional dengan daftar calon terbuka. Proporsional daftar yaitu sistem pemilihan mengikuti kuota kursi di tiap Daerah Pemilihan (Dapil). Jadi, suara yang diperoleh partai politik di tiap daerah selaras dengan kursi yang akan mereka peroleh di Parlemen. Untuk memilih Anggota Parlemen digunakan sistem pemilu proporsional dengan varian proporsional daftar terbuka. Untuk memilih anggota DPD, digunakan sistem pemilu lainnya, yaitu *Single Non Transferable Vote* (SNTV).

SNTV adalah sistem dimana setiap Pemilih memiliki satu suara bagi calon, tetapi terdapat lebih

¹ Laporan Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004

dari satu Kursi (kuota) yang harus diisi di tiap Dapil. Calon-calon dengan total 4 suara tertinggi pada Dapil tersebut yang akan mengisi kursi DPD. Sementara untuk memilih paket Presiden dan Wakil Presiden digunakan sistem pemilihan mayoritas atau suara terbanyak dengan *varian Two Round System* (Sistem Dua Putaran).

1. Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Cilacap

Pemilihan Umum Tahun 2004 dilaksanakan di seluruh penjurur Indonesia, salah satunya di Kabupaten Cilacap pada tanggal 5 April 2004, dengan Peserta Pemilu sejumlah 24 (dua puluh empat) Partai, yaitu :

1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
2. Partai Buruh Sosial Demokrat
3. Partai Bulan Bintang
4. Partai Merdeka
5. Partai Persatuan Pembangunan
6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan
7. Partai Persatuan Perhimpunan Baru
8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan
9. Partai Demokrat
10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia
12. Partai Persatuan Nahdlotul Ummah Indonesia
13. Partai Amanat Nasional
14. Partai Karya Peduli Bangsa
15. Partai Kebangkitan Bangsa
16. Partai Keadilan Sejahtera
17. Partai Bintang Reformasi
18. Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia
19. Partai Damai Sejahtera

20. Partai Golongan Karya
21. Partai Patriot Pancasila
22. Partai Sarikat Indonesia
23. Partai Persatuan Daerah
24. Partai Pelopor

Perolehan kursi hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Cilacap tahun 2004 adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Kursi
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	16 Kursi
2	Partai Golongan Karya	11 Kursi
3	Partai Amanat Nasional	5 Kursi
4	Partai Kebangkitan Bangsa	5Kursi
5	Partai Demokrat	1 Kursi
6	Partai Karya Peduli Bangsa	1 Kursi
7	Partai Keadilan Sosial	1 Kursi
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	1 Kursi

Sedangkan dari perolehan DPD dengan jumlah total Calon Anggota DPD adalah 55 orang:

No.	Calon Anggota DPD
1	Drs. I Wayan Sudana
2	Drs. H. Mintoro, H.S.
3	Bambang Eko Purnomo, S.E.
4	Dra. Hj. Nafisah Sahal
5	Dr. Djoko Soedijarto, DTM&H, M.Sc.
6	H. Soeroto, S.H.
7	Drs. Sanusi
8	Ir. Rio Irwan Karyono
9	Dra. Hj. Siti Fatimah, S.Ip
10	Drajat Harapan, S.H.
11	H. Suwanto, S.E.,M.M.
12	Drs. Napsun Setyono
13	DR. Drs. Tukiman Tarunosayogo, M.S.
14	H. Wisnu Suhardono, S.E.
15	KH. Achmad Chaiwani
16	Sutrisno
17	H. Soetjipto, S.H.
18	Mawahib, S.E.

19	Abu Salim, S.Ag.
20	P. Sarijo
21	H. Soewardi
22	
23	Sumartini, BBA
24	Sri Paduka Mangkoenegoro IX
25	Drs. Subiakto Tjakrawerdya
26	Abdul Ghofur, S.Ag.
27	H. Prawasono, S.H.
28	Drs. Suyatno ZA, M.S.
29	Ir. Kucuk Hendrayadi
30	H. Manito Amin
31	M. Arief Zaenal Arifin
32	Drs. Soeroto Haryosaputro, M.Si.
33	Taslim Syahlan, S.Ag.
34	Misbah Sukmadi
35	Ir. Luhur Pambudi M, M.M.
36	Teguh Raharjo, S.H.
37	Drs. H. Dahlan Rais, M.Hum.
38	Hermawan Triyono, S.E.
39	Ir. Hygnus Widyanto Budi Santoso

40	Drs. H. Sudharto, M.A.
41	Yahya Nurhadi, S.P.
42	Taruno, Ama, Pd.
43	Drs. Giri Iskandar
44	Mochammad Bisri, S.E.
45	Drs. Djawahir Muhammad
46	H. Ahmad Tohari
47	Ir. H.Budi Santoso
48	Ir. Zainudin Akhmad
49	H. Achmad Sulchan, S.H
50	H. M. Rusdi Rahayu
51	Drs. Rukani, S.Pd.
52	H. M. Syarif Darmawan, S.E.
53	Drs. Roestam Santiko
54	H. Fatchuddin Rosyidi
55	Hasan Toha Putra, M.B.A.

2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Cilacap

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Cilacap putaran pertama dilaksanakan pada Tgl 5 Juli 2004 dengan 5 calon yang sudah ditetapkan oleh KPU RI dengan nomor urut:

- a. Wiranto - Salahuddin Wahid diusung oleh Partai Golkar, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Patriot, dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia;
- b. Megawati Soekarnoputri - Hasyim Muzadi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Damai Sejahtera;
- c. Amien Rais - Siswono Yudo Husodo diusung oleh Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bintang Reformasi, Partai Nasional Benteng Kerakyatan dan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Sarikat Indonesia, dan Partai Buruh;
- d. Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla diusung oleh Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;
- e. Hamzah Haz - Agum Gumelar diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Cilacap tahun 2004 Yoes Sachri, S.H. mengatakan, jika melihat realitas kondisi sosial politik budaya masyarakat Cilacap yang beragam, kultur dan banyaknya masyarakat masih minim terhadap pemahaman politik dalam proses demokrasi. Panwaslu tidak ingin menjadi Lembaga yang seolah seperti “Pemadam Kebakaran” dengan mengatasi masalah setelah ada pelanggaran, dengan begitu upaya Panwaslu melakukan langkah konkrit dengan menjalin kerja sama dalam tugas tugasnya bersama Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu),

beserta tokoh masyarakat dan Organisasi Masyarakat.²

Muhammad Fatikhun, S.Ag Wakil Ketua Panwaslu Tahun 2004 menyatakan, bahwa Kontestasi Politik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang pertama kali dilaksanakan secara langsung ini pada saat itu menempatkan posisi pasangan calon Presiden dan wakil presiden sebagai *figure sentral*. Praktis hal ini akan meningkatkan tensi hubungan antar pendukung masing masing pasangan calon yang bersifat personal, sehingga hubungan antara pasangan calon dan pendukung tersebut lebih dominan oleh hubungan emosional ketimbang rasional. Atas kondisi tersebut maka pemetaan terhadap daerah rawan konflik sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya gejolak sosial yang berkembang di tengah masyarakat.³

Kabupaten Cilacap dengan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 1.137.635 pemilih yang tersebar di 23 Kecamatan, 280 Desa/Kelurahan, dan 4.210 Tempat Pemungutan Suara (TPS), dengan wilayah geografis yang sebagian Kecamatan berada di wilayah sulit secara transportasi maka akan menambah dinamika pengawasan menjadi lebih ekstra.

Dari kelima kontestan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan di KPU Kabupaten Cilacap hasilnya adalah seperti dalam tabel berikut:

² Wawancara dengan Yoes Sachri, tanggal 10 April 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

³ Wawancara dengan Muhammad Fatikhun, tanggal 10 April 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Suara	Persentase
1	Wiranto - Salahuddin Wahid	256.867	27.315
2	Megawati Soekarnoputri - Hasyim Muzadi	302.866	32,20
3	Amien Rais - Siswono Yudohusodo	83.031	8.35
4	Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla	263.342	28.00
5	Hamza Haz - Agum Gumelar	34.400	3.665

Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua dilaksanakan pada tanggal 20 September 2004, dengan peserta pasangan calon nomor urut 1 Megawati Soekarnoputri - Hasyim Muzadi dan nomor urut 2 Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	No Urut	Nama Pasangan Calon	Suara	Persentase
1	1	Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla	426,294	52.80%

2	2	Megawati Soekarnoputri - Hasyim Muzadi	423,294	47.20%
---	---	---	---------	--------

B. Profil Kelembagaan Panwaslu Kabupaten Cilacap Tahun 2004

Kelembagaan Pemilu dalam perkembangannya, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dilakukan perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga yang terlepas dari struktur Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lembaga itu terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.⁴

Panwaslu Tahun 2004 Kabupaten Cilacap dibentuk melalui beberapa tahapan seleksi antara lain: pendaftaran, seleksi administrasi, tes tertulis, tes wawancara hingga pengumuman pada tanggal 16 Juli 2005. Jumlah pendaftar Panwaslu Kabupaten Cilacap pada saat itu sebanyak 97 orang. Terdiri dari 88 laki laki dan 9 orang perempuan.

Menurut Tadzkirotul Azmi sebagai salah satu peserta dari unsur perempuan menganggap bahwa keterwakilan 30% perempuan sesuai amanat undang-undang tentu belum maksimal, di Cilacap sendiri pendaftar dari unsur perempuan sangat ksedikit, terbukti dari jumlah pendaftar yang hanya diikuti 9 orang dari total 97 pendaftar. Banyak alasan mengapa

⁴ Laporan Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004

partisipasi perempuan di kancah publik khususnya penyelenggara Pemilu sangat minim, mungkin karena kurangnya sosialisasi dan juga kultur masyarakat bahwa dunia politik itu keras, maka perempuan kurang berani dan bahkan kurang diperhitungkan kemampuannya.

Setelah proses seleksi selesai, ditetapkan tiga orang Panwaslu terpilih, yang terdiri dari dua laki-laki dan satu perempuan.⁵ Mereka adalah:

1. M. Fatikhun, S.Ag. sebagai perwakilan dari Perguruan Tinggi;
2. Yoes Sachri, S.H. sebagai perwakilan dari unsur Media;
3. Tadzkirotul Azmi, S.Ag. sebagai perwakilan dari tokoh masyarakat unsur Perempuan.

Selain itu Anggota Panwaslu juga ditambah dari unsur Kejaksaan dan Kepolisian dengan personil Mukti Wibowo, S.H., M.H. dari Unsur Kejaksaan dan IPTU Slamet Riyanto dari Unsur Kepolisian.

Kelima Anggota Panwaslu terpilih dilantik di ruang rapat Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah Jalan Veteran No. 9 Kota Semarang pada tanggal 16 Juli 2003. Panwaslu Kabupaten Cilacap dilantik oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yakni Nur Hidayat Sardini, S.H., M.Hum. bersama dengan 35 Panwaslu Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Setelah dilantik, lima orang anggota Panwaslu Kabupaten Cilacap mengikuti bimbingan teknis yang digelar Panwaslu Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya menggelar Rapat Pleno untuk membentuk Struktur

⁵ Wawancara dengan Tadzkirotul Azmi, tanggal 10 April 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

Panwaslu dengan Ketua terpilih adalah Yoes Sachri, S.H. dan Muhammad Fatikhun, S.Ag. sebagai Wakil Ketua. Sedangkan sebagai anggota adalah Tadzkirotul Azmi yang merangkap Koordinator Bidang Penerimaan dan Tindak Lanjut Laporan, Mukti Wibowo, S.H.,M.H. merangkap sebagai Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa, dan IPTU Slamet Iriyanto merangkap sebagai anggota sekaligus Kordiv Pengawasan.⁶

Setelah dilantik, Panwaslu Kabupaten Cilacap bergerak cepat melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kerja-kerja pengawasan, sebab KPU sudah memulai tahapan pemilu 2004. Untuk menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya, Panwaslu Kabupaten Cilacap 2004 menempati kantor di Jl. Jendral Sudirman No. 120 Cilacap. Saat itu Kantor Panwaslu bersebelahan dengan Kantor KPU Cilacap yang merupakan Gedung RSPD (Radio Siaran Pemerintah Daerah) dan juga dijadikan Kantor Sekretariat Organisasi Kepemudaan Kabupaten Cilacap seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

Ketua Panwaslu Kabupaten Cilacap Tahun 2004, Yoes Sachri mengapresiasi respon Pemerintah Daerah yang sudah memberikan fasilitas Kantor Sekretariat dan juga fasilitasi sumber daya manusia untuk mengisi kesekretariatan. Adapun fasilitasi Pemerintah Daerah yang diberikan diantaranya gedung yang representatif untuk anggota dengan fasilitas pendingin ruangan, serta dukungan alat transportasi berupa satu unit kendaraan roda empat,

⁶ Wawancara dengan Mukti Wibowo, tanggal 10 April 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

empat unit kendaraan roda dua dan fasilitas pendukung lainnya.

Sementara itu terkait SDM Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap memberikan tujuh Tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk mendukung kerja-kerja pengawasan, yang terdiri dari satu orang Sekretaris Kantor, dan dibantu enam orang staf sekretariat, yaitu:

1. Mubarok, S.E. sebagai Sekretaris Kantor;
2. Ninik Isriani, S.Sos., M.M, sebagai Kaur Administrasi dan KU;
3. Heru Baskoro, S.Sos. sebagai Kaur K4;
4. Muladi Santoso sebagai Kaur P3;
5. Edi Warno, S.H. sebagai Pelaksana Tindak Lanjut Laporan;
6. Rahman, S.H. sebagai Staf Penyelesaian Sengketa;
7. Kurniawan RGP, S.Si. sebagai Staf Penerima Laporan.

Terkait dengan anggaran, Panwaslu Kabupaten Cilacap mengelola anggaran sebanyak Rp 2.836.283.000,- yang berasal dari APBD sejumlah Rp 1.209.965.000,- dan Rp 1.626.318.000,- dari APBN. Anggaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan, mulai dari honor Panwaslu Kabupaten Cilacap, Panwaslu Kecamatan, Sosialisasi Partisipatif, pemenuhan kebutuhan kantor dan lain-lain.

Tadzkirotul Azmi menyatakan, anggaran tersebut tentu belum cukup memadai, sebab Kabupaten Cilacap memiliki 23 Kecamatan, 280 Desa/Kelurahan dan 4.210 TPS, namun hal itu tidak mengganggu kerja-kerja pengawasan yang dilakukan. Oleh karena itu Panwaslu Kabupaten Cilacap melakukan berbagai terobosan untuk memaksimalkan pengawasan. Misalnya dengan menggandeng *stakeholder* untuk ikut melakukan Pengawasan

Pemilihan Umum Tahun 2004, diantaranya komunitas sosial yang berada di Kabupaten Cilacap, baik organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, NU, KNPI maupun ormas kepemudaan lainnya. Panwaslu Cilacap juga menggandeng Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) untuk bekerjasama mempercepat komunikasi dalam rangka pengawasan di 23 Kecamatan.

Di samping itu ada juga lembaga pemantau seperti Jaringan Pemantau Pemilu untuk Rakyat (JPPR), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia (JAMPI), Forum Rektor dan Uni Eropa juga menjadi mitra dalam rangka kerja-kerja pengawasan di wilayah Cilacap.⁷

Menurut Yoes Sachri, selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Cilacap pada Pemilu Tahun 2004, mendapatkan honor sekitar Rp 3.000.000,- per bulan sedangkan keempat anggota lainnya mendapat honor sekitar Rp 2.500.000,- per bulan, yang bersumber dari APBN dan APBD. Panwaslu Kabupaten Cilacap bekerja selama 18 bulan dan saat itu tidak ada tunjangan maupun jaminan kesehatan untuk para anggota Panwas Pemilu Tahun 2004. Panwaslu juga membentuk jajarannya di 23 Kecamatan sejumlah 69 anggota Panwaslu Kecamatan.

⁷ Wawancara dengan Slamet Riyanto, tanggal 10 April 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

C. Peristiwa Menarik

1. Kasus Hilangnya Hak Pilih Karyawan dan Pasien RSUD

Pemilu Tahun 2004 adalah Pemilu yang dilaksanakan secara langsung untuk pertama kalinya dimana masyarakat bisa secara langsung memilih calon wakilnya lewat partai yang dikehendaki dalam pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta pemilihan secara langsung untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Tantangan bagi Pengawas Pemilu tahun 2004 secara peta politik lebih beresiko terhadap terjadinya konflik, baik konflik antar peserta pemilu, masyarakat sebagai pemilih langsung, dan gesekan kepentingan karena rakyat pertama kali diberikan hak politiknya untuk memilih wakilnya secara langsung.

Ketua Panwaslu Kabupaten Cilacap Yoes Sachri, S.H. menyatakan, kalau pengalaman yang tidak terlupakan adalah ketika menangani kasus serius terkait hilangnya hak pilih pasien RSUD Cilacap, kasus ini sangat menguras tenaga dan juga pikiran teman-teman di Panwaslu tahun 2004. Kasus ini bermula dari laporan pemantau terkait banyaknya pasien dan karyawan RSUD Cilacap yang tidak diberi kesempatan mencoblos karena tidak ada TPS khusus di tempat tersebut. Laporan yang ditindaklanjuti oleh panwaslu dengan mengadakan investigasi dan pengumpulan data dengan cara klarifikasi pihak-pihak

terkait, menempuh proses yang panjang dan menguras tenaga.⁸

Berdasarkan hasil koordinasi dan investigasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Cilacap, selanjutnya digelar rapat dengan KPU untuk melakukan klarifikasi terkait laporan dari masyarakat. KPU Cilacap menjelaskan kalau TPS khusus di Ruang RSUD memang tidak ada, akan tetapi TPS di sekitar RSUD telah diusahakan di dekatkan ke lokasi RSUD guna meringankan dan memudahkan pasien dan juga karyawan untuk menunaikan hak pilihnya.

Berdasarkan laporan pemantau di lapangan, khususnya di RSUD Cilacap banyak ditemukan pasien yang terbaring di ruang perawatan semestinya mendapatkan hak yang sama untuk menggunakan hak pilihnya, maka seharusnya pihak KPU dapat memfasilitasi pasien di ruang perawatan untuk bisa menunaikan haknya mencoblos di Pemilu Tahun 2004.

2. Rayuan Modal Rupiah dari Pengurus Partai

Siang menjelang sore kala itu ketua Panwaslu Kabupaten Cilacap Yoes Sachri, S.H. di jemput mobil sedan warna hitam dan dibawa ke sebuah bukit selok di kawasan Kecamatan Adipala. Yoes Sachri, S.H yang berlatar belakang Jurnalis, mengatakan bahwa dia tidak takut terhadap orang-orang yang menjemputnya, karena sudah terbiasa bertemu dengan para tokoh lokal maupun nasional dalam rangka peliputan berita. Ajakan pertemuan

⁸ Wawancara dengan Yoes Sachri, tanggal 10 April 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

yang dilaksanakan di sebuah tempat pegunungan sepi tersebut, ternyata sebuah penawaran untuk membuat kesepakatan atas putusan KPU Kabupaten Cilacap terkait pencalonan Anggota Legislatif yang diusung oleh partai yang memiliki kepengurusan ganda.

Salah satu Pimpinan Partai yang ganda tersebut merasa bahwa Panwaslu mempunyai kewenangan untuk bisa memutuskan dan membantu meloloskan pencalonan yang diusung dari pengurus partai yang ber-SK ganda tersebut. Bahkan pimpinan partai tersebut berusaha merayu dan memberikan uang agar kepengurusan partainya yang dinyatakan sah untuk mengikuti tahapan pencalonan. Namun demikian Yoes tidak terpengaruh dengan tawaran tersebut, karena tugas panwaslu adalah untuk menegakan aturan hukum dan perundang undangan yang berlaku.⁹

⁹ Wawancara dengan Yoes Sachri, tanggal 10 April 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

D. Profil Anggota Panwaslu Tahun 2004

1. Yoes Sachri, S.H.



Yoes Sachri, S.H. Adalah Nama lengkap yang menjabat sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilu tahun 2004, Bang Yoes nama panggilan untuk rekan rekan kerjanya. Pria kelahiran Cilacap, 16 Juli 1959 ini dikaruniai 4 orang anak dari

seorang Istri Illoh Watilah, kini tinggal di Desa Madusari RT 02 RW 10 Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap.

Yoes Sachri, S.H. mempunyai latar belakang Jurnalis, maka ketika pertama kali mendaftar menjadi Panwaslu pada tahun 2004 , Bang Yoes menggunakan representatif dari unsur media. Karena pada pemilu 2004 unsur perwakilan saat itu masih diberlakukan dari unsur Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi, Pers, Kejaksaan dan Kepolisian. Bang Yoes menamatkan Sarjana Hukumnya di Universitas Jenderal Soedirman pada Tahun 2003, pria memiliki kegemaran traveling, membaca berita dan jurnal sosial Politik.

2. Muhammad Fatikhun, S.Ag



Muhammad Fatikhun lahir pada tanggal 06 Januari 1975 di Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. Beliau adalah Dosen di Institut Agama Islam Imam AL Ghazali (IAIG) Kabupaten Cilacap sejak Tahun 2005, saat menjadi

mahasiswa beliau aktif di banyak organisasi kemahasiswaan di kampusnya yaitu IAIN Walisongo Semarang.

Pria yang menamatkan S1 pada Tahun 1999 di Fakultas Syari'ah, kini tinggal di Jalan Abdull Fatah No. 65 Desa Pahonjean, Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. Muhammad Fatikhun mempunyai hobi membaca dan tilawah, dengan *motto* "hidup akan lebih bermakna dengan cara terus berkarya". Pada saat mendaftar Panwaslu 2004 baginya merupakan pengalaman pertama kali bersentuhan dengan dunia penyelenggaraan pemilu.

Fatikhun menjabat sebagai wakil ketua dan ini merupakan pengalaman yang berharga untuk mengetahui dinamika politik di Kabupaten Cilacap. Semasa menjadi mahasiswa bahkan selepas wisuda, Ia aktif di Pemantau Pemilu sejak 1999, seperti Jaringan Pemantau Pemilu untuk Rakyat (JPPR), Komite Independen Pemantau

Pemilu (KIP), dan Juga Forum Rektor untuk demokrasi berkeadilan.

3. Mukti Wibowo, S.H.,M.H



Mukti Wibowo, S.H.,M.H, adalah salah satu Anggota Panwaslu Cilacap yang ditugaskan oleh Kejaksaan Cilacap untuk menjadi anggota Panwaslu pada tahun 2004, Pria kelahiran Cilacap, 02 Desember 1959 menjabat sebagai anggota dan menjadi koordinator bagian penanganan sengketa, Menamatkan S1 nya di Fakultas Hukum UNS, Beliau mempunyai kegemaran Olahraga dan musik saat itu tinggal di Jalan cermai 23 Cilacap.

4. IPTU Slamet Riyanto S.H



Iptu Slamet Riyanto S.H, adalah salah satu anggota Panwaslu Tahun 2004 yang ditugaskan oleh Polres Cilacap untuk mewakili POLRI menjadi Anggota Panwaslu dari unsur kepolisian. Pria kelahiran Cilacap, 11 Maret 1959 yang mempunyai kegemaran olahraga sekarang telah purna tugas pada Tahun 2018 dan mengakhiri jabatan sebagai Kasat intel POLRES Cilacap.

Slamet Riyanto menamatkan S1 di Fakultas Hukum UNWIKU Purwokerto pada Tahun 2004, Pensiunan Polisi yang tinggal di Jalan Anggrek No.23 Cilacap, kini telah menikmati hari tuanya dengan 1 anak yang sudah mandiri, prinsipnya hidup harus dinikmati, dan selalu bersyukur dengan apa yang telah digariskan olehnya.

5. Tadzkirutul Azmi, S.Ag



Azmi adalah panggilan di lingkungan teman-teman penyelenggara, akan tetapi mbak tadz adalah lebih familiar di kalangan teman teman bermain dan kesehariannya. Perempuan kelahiran Cilacap, 17 Januari 1971 ini adalah satu satunya

perempuan anggota Panwaslu Tahun 2004.

Bersama enam rekan perempuan lainnya azmi mengikuti proses seleksi dengan semangat dan optimisme tinggi, prinsipnya bahwa sebagai perempuan tidak akan minder jika harus bersaing dengan rekan laki laki yang jauh secara jumlah sangat tidak seimbang. Itu terbukti jika dalam perbandingan hasil nilai azmi selalu mendapat nilai tertinggi diantara 97 pendaftar lainnya.

Mbak Tadz menamatkan Pendidikan S1 di Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIG) Cilacap pada tahun 1998, kini mbak Tadz masih aktif sebagai Kepala

Perpustakaan di Universitas Nahdlatul Ulama (UNUGHA) Cilacap.

Tadzkirotul Azmi mempunyai kegemaran membaca dan memiliki suami bernama Muhyidin S.Ag. serta dikaruniai 3 orang putri, sampai saat ini aktif di berbagai kegiatan Ormas, bahkan seringkali menempati sebagai pimpinan organisasi ini, menjadi Koordinator Bidang Penerimaan Laporan dan Tindak Lanjut Pelanggaran pada Panwaslu Tahun 2004. Perempuan yang kini tinggal di Jalan Kepodang Desa Kesugihan Kecamatan Kesugihan, mempunyai prinsip dan motto hidup bahwa sebaik baiknya hidup adalah yang bermanfaat bagi orang lain.

DOKUMENTASI PEMILU 2004



Pemungupan Suara di RSUD Cilacap ketika Pasien tidak bisa menuju TPS untuk menggunakan hak pilihnya.



Penghitungan akhir di KPUD hasil penghitungan suara pemilihan presiden putaran 1



Pengawasan Putaran II Pilpres Mega-Hasyim melakukan kampanye dengan membagikan DoorPrice di Lapangan eks BP7 Cilacap



Pengawasan Deklarasi untuk memnangkan pasangan Mega-Hasyim dalam putaran II Pilpres di Hotel Peni Wijaya Cilacap

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2007

A. Konteks Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap 2007

Pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia pasca Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 terus mengalami perubahan, ini ditandai dengan pemilihan secara langsung Kepala daerah baik Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati di seluruh Indonesia sejak Tahun 2005, begitu pula Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat Cilacap yang telah memiliki hak pilih sebagai proses politik masyarakat Cilacap. Dalam menentukan pemimpin selama lima tahun kedepan. Untuk menjamin Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundangan maka dibentuklah Panwas untuk melaksanakan pengawasan dalam tiap tahapan.¹⁰

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diundangkan terakhir dengan peraturan pemerintah No. 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005.

¹⁰ Laporan Pengawasan Pilkada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2007

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dimulai dengan Tahapan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada tanggal 9 Agustus 2007 sejumlah 311.331 pemilih, yang tersebar di 24 Kecamatan dan 280 desa/kelurahan serta tersebar di 2.695 TPS, di antaranya 9 tempat adalah TPS khusus.

Yoes Sachri menyatakan “Pelaksanaan tahapan pendaftaran dan sampai pada penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap, tergolong sangat sarat dengan dinamika politik, terbukti adanya Calon pendaftar yang tidak lolos pada penetapan, disitulah gejala sosial mulai beruntun terjadi tidak hanya sekali.¹¹ Pendaftar Calon terdapat Tiga pasang yaitu:

1. H. Probo Yulastoro, S.sos, M.Sos.M.Si - H. Tatto Suwarto Pamuji
2. Dra. Hajah Fatimah - Drs. Sayidi, M.M.
3. Drs. Budi S. Gagak. Handoko, M.M-Subagyo, M.M

Berdasarkan hasil Keputusan KPU Kabupaten Cilacap, tertanggal 30 Juli 2007 menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Periode 2007-2012 menyatakan bahwa hanya dua pasang Calon yang lolos seleksi berdasarkan pada verifikasi penelitian data persyaratan yaitu pasangan H, Probo Yulastoro sebagai Calon Bupati beserta pasangan Wakilnya H. Tatto Suwarto Pamuji, yang diusung oleh DPC Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan pasangan calon Dra. Siti Fatimah sebagai Calon Bupati dan Dra. Sayidi, M.M. sebagai wakilnya, yang diusung gabungan Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat dan Partai Bintang Reformasi.

¹¹ Wawancara dengan Yoes Sachri, tanggal 10 April 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

Dari keputusan yang dibuat KPU itulah mulai banyak gejolak bermunculan di kalangan masyarakat yang protes atas ketidakpuasan putusan KPU dalam proses tidak lolosnya salah satu pasangan calon. "Saat itu Kantor KPU beberapa kali di geruduk massa pendukung pasangan calon yang tidak lolos penetapan tidak hanya sekali tapi berkali kali, untungya semua demonstrasi tidak menimbulkan hal yang merugikan secara fisik maupun materi, karena berjalan dengan damai tanpa anarkis, Ketua Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yoes Sachri menyatakan, "*kami sangat menyayangkan saat itu tidak dilibatkan dalam prosesnya, padahal tahapan itu sangat krusial dan bisa menimbulkan permasalahan di kemudian hari, baik menyangkut keabsahan administrasi riwayat pendidikan maupun administrasi dari partai pendukung*", tandas Yoes Sachri dalam wawancara.

Lebih lanjut bang Yoes juga menyatakan jika pada saat itu memang tidak ada aturan yang mengharuskan KPU melibatkan Panwas dalam menentukan lolos tidaknya calon, akan tetapi ketika Panwas dilibatkan dalam prosesnya tentu tidak menyalahi aturan.

Berdasarkan pada pelaksanaan pemungutan suara tanggal 9 September 2007 dan dilakukan penghitungan suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cilacap pada 14 September 2007, menghasilkan Pasangan Calon sebagai berikut:

No	No Urut	Nama Pasangan Calon	Suara	Persentase
1	2	H. Probo Yulastoro, S.Sos.MM, M.Si -	446.589	51.14%

		H. Tatto Suwarto Pamuji		
2	1	Dra Siti Fatimah - Dra. Sayidi, MM	424.703	48.86%

Pada tanggal 15 September 2007 KPU Kabupaten Cilacap memutuskan penetapan Pasangan Calon Bupati Cilacap Tahun 2007-2012 adalah H. Probo Yulastoro, M.Sos.M.Si- H. Tato Suwarto Pamuji, sebagai Bupati Cilacap dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007-2012.



Rapat Pleno KPU Kabupaten Cilacap tanggal 14 September 2007 dengan agenda pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara

B. Profil Kelembagaan Panwaslu Kabupaten Cilacap Tahun 2007

Sesuai dengan Amanat perundangan Tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan oleh DPRD Cilacap, proses rekrutmen Anggota Panwaslu dilakukan oleh Panitia khusus (PANSUS) XXIII DPRD Cilacap, diawali dengan proses pendaftaran yang dimulai pada tanggal 27 Juni s/d 29 Juni 2007, dilanjutkan tahapan tes tertulis pada

tgl 30 Juni 2007, serta Tes Wawancara yang digelar pada tgl 2 Juni 2007.¹²

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati terdiri dari unsur Kejaksaan, unsur Kepolisian, unsur Perguruan Tinggi, unsur Pers dan unsur Tokoh Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan 30% perempuan. Peserta Pendaftaran Panwaslu Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 23 orang terdiri dari 19 laki-laki dan 4 perempuan.

Setelah melalui seleksi dan rangkaian kegiatan tahapan, akhirnya ditetapkan 5 orang anggota panwas yang terdiri dari 4 laki-laki dan satu perempuan, dengan Surat Keputusan Pimpinan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 170/74/12/2007 tertanggal 3 Juli 2007, Tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Cilacap. Kelima Anggota yang terpilih yaitu,

1. Yoes Sachri, S.H. dari unsur Tokoh Masyarakat
2. Sarwo Mumpuni dari unsur Pers
3. Puji Zariat, S.H. dari unsur Kejaksaan
4. IPTU Sulistyono DC, dari unsur Kepolisian
5. Drs. Yusriani Nur Farida, Akt,M.Si dari Unsur Perguruan Tinggi

Anggota Panwas terpilih selanjutnya mereka dilantik di Gedung DPRD Kabupaten Cilacap dalam rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Cilacap pada Tanggal 4 Juli 2007 oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap.

¹² Laporan Pengawasan Pilkada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2007

Dari kelima Anggota tersebut, terlebih dahulu mengadakan Pleno pada Tanggal 3 Juli 2007 untuk membentuk organisasi di internal anggota untuk pemilihan ketua wakil ketua dan juga koordinator bidang. Yaitu Ketua terpilih adalah Yoes Sachri, wakil Ketua Sarwo Mumpuni, Bidang Penyelesaian Sengketa Puji Zariat SH merangkap Anggota, IPTU Sulistywo dwi cahyono bidang pengawasan merangkap anggota, dan Dra. Yusriati Nur Farida Akpt, M.Si bidang Penerimaan dan Tindak Lanjut Laporan merangkap Anggota.

Setelah dilantik selanjutnya Panwaslu Pilkada mengadakan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka untuk melaksanakan kerja pengawasan yang cukup berat menimbang pelaksanaan tahapan Pilkada yang sudah berjalan. Yoes Sachri Menyatakan, bahwa pemerintah daerah sudah memfasilitasi Panwaslu Pilkada dengan BackUp Kesekretariatan, dengan Team pendukung dari pegawai Negeri Sipil dengan jumlah 7 Personel di antaranya:

1. Bambang Tutoko, S.Sos.M.Si. yang berasal dari Unit Kesbanglinmas sebagai Sekretaris
2. Agus Sokhani, S.S. dari Unit Kerja PMD Kabupaten Cilacap sebagai Kaur Umum / Bendahara
3. Sukamto, S.E,M.M dari Unit kerja Dipenda Kabupaten Cilacap sebagai Kaur P3
4. Galih Gumanti, S.H dari Setda Cilacap sebagai Kaur P4
5. Ari Subronto S.Sos, dari Setda Cilacap sebagai Tenaga Pendukung
6. Edy Gayanto dari Setda Cilacap Sebagai Staf Pendukung
7. Tugiyono, dari Setda Cilacap sebagai Staf pendukung

Fasilitasi Pemerintah Daerah dirasakan sangat representatif terkait dengan Kantor sebagai sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang terletak menyatu dengan area Gedung DPRD Cilacap, dengan fasilitas memadai, seperti ruangan kerja yang sudah ada pendingin udara dengan peralatan kerja yang tergolong lengkap, sementara untuk ruang rapat panwas menggunakan fasilitas ruang rapat yang ada di Gedung DPRD.¹³

Selain itu Panwaslu juga mendapatkan fasilitas satu unit kendaraan operasional roda empat berupa mobil kijang dan 4 unit kendaraan roda dua, sebagai alat pendukung kinerja pengawasan. Yoes Sachri dan keempat Anggota lainnya pada saat itu di gaji dengan anggaran APBD kurang lebih sebesar Rp 1.500.000 selama 7 bulan, tanpa ada tunjangan pribadi maupun fasilitas pribadi lainnya. Pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Panwaslu mendapat Anggaran Penyelenggaraan dari APBD sebesar Rp 614.850.200.

C. Peristiwa Menarik Pengawasan Pemilu

1. Demo dan Protes yang Tak Kunjung Usai

Sejak Ditetapkannya Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Cilacap No. 270/310/VII/45/2007, tertanggal 30 Juli 2007 dan menyatakan salah satu calon tidak lolos maka sejak itu banyak masyarakat yang berduyun-duyun mengadakan aksi sosial dan demonstrasi damai maupun pernyataan sikap yang ditujukan kepada KPU

¹³ Laporan Pengawasan Pilkada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2007

maupun Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu di Cilacap.

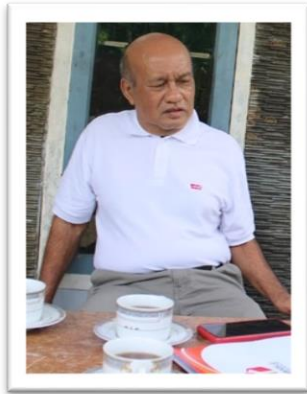
Menurut pernyataan Ketua Yoes Sachri dan Wakil Ketua Sarwo Mumpuni, Panwaslu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2007, demo dan aksi damai yang dilaksanakan secara terus menerus memang tidak dilakukan di kompleks Sekretariat Panwaslu, demo yang dilakukan oleh pendukung Budi Gagak - Subagyo tersebut selalu dilaksanakan di halaman KPU Kabupaten Cilacap.

Dari sikap pendemo yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Membangun Cilacap Bercahaya (KMMCB) Pendemo menuntut ditundanya Pilkada di Cilacap, secara tuntutan memang tidak ada menyebut nama Lembaga Panwas dalam setiap tuntutan, akan tetapi menurut Ketua Panwas Yoes Sachri menganggap bahwa Panwas ikut terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraannya. Sehingga apapun yang terjadi Panwas tetap memantau dan fokus mengawasi.¹⁴

¹⁴ Wawancara dengan Sarwo Mumpuni, tanggal 10 April 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

D. Profil Anggota Panwas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2007

1. Yoes Sachri, S.H.



Yoes Sachri Adalah Nama lengkap yang menjabat sebagai Ketua Panitia pengawas Pemilu tahun 2004, Bang Yoes nama panggilan untuk rekan rekan kerjanya, Pria kelahiran Cilacap 16 Juli 1959, Pertama kali mendaftar menjadi Panwas pada tahun

2004, bang Yoes mengawali kariernya di penyelenggara sebagai panwas menggunakan Pers/media sebagai representatif dari perwakilan unus media. Karena pada pemilu 2004 unsur perwakilan saat itu masih di berlakukan.

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2007 bang Yoes mendaftar lagi untuk menjadi Panwas Pilkada, dan dinyatakan lolos, sehingga untuk kali kedua bang Yoes menjadi panwas, dan menjabat dipilih lagi menjadi Ketua panwas, bang Yoes mendaftar mewakili Unsur Tokoh Masyarakat. Bang yoes menamatkan Sarjana hukumnya di Universitas Jenderal Soedirman pada Tahun 2003, pria yang dikaruniai anak 4 tersebut, dan mempunyai Hobi traveling kini tinggal di desa Madusari rt 02 Rw 10 Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap yang sebelumnya pada sebelum tahun 2012 bang

Yoes tinggal dan beralamat di Komplek perumahan Taman gading Cilacap.

2. Sarwo Mumpuni



Sarwo Mumpuni pria kelahiran Cilacap, 12 september 1969, adalah pria energik yang aktif berorganisasi dan terlibat di banyak komunitas organisasi, satu di antaranya adalah aktif menjadi wartawan di media Tabloid Kontras Jakarta saat

itu. Pria yang tinggal di Jln. Pemintalan, 38 Tambakreja Cilacap, mendaftar panwas pemilihan Bupati dan wakil Bupati Cilacap dari unsur Pers/media sebagaimana formasi yang diumumkan di pengumuman seleksi saat itu. Bung Sarwo menamatkan Sekolah Menengahnya tahun 1988 di SMA Negeri 1 Cilacap. Sejak kecil Bung Sarwo sangat menggemari buku dan suka membaca, maka tak elak lagi jika sampai saat ini, masih belumlah berubah kegemarannya, karena bagi bung sarwo dengan membaca akan bisa melihat dunia begitu luas., bung sarwo kini Tinggal di Jl Cempaka No. 7, RT 02 RW 12 kelurahan Sidakaya bersama 4 putra putrinya.

3. Puji Zariat, S.H.



Puji Zariat adalah salah satu Anggota Panwas Pe-milu Bupati dan wakil bupati 2007, Pria kela-hiran Malang 28 Desember 1964 itu mendapat tugas dari Kejak-saan untuk menjadi Anggota Panwas Bupati dan wakil Bupati serta menjadi koordinator bidang Penyelesaian sengketa, pria yang menjadi Hakim sejak 8 tahun lalu bertugas di kejaksaan Negeri cilacap dan telah purna tugas menjadi Jaksa pada tahun 2015 dan kini tinggal di kediaman Jalan Wijaya Kusuma Cilacap.¹⁵

4. IPTU. Sulistyو DC



IPTU Sulistyو sering dipanggil pak sulis, adalah anggota aktif Polres cilacap yang dilahirkan pada 19 Juli 1965, pak sulis menjadi panwas bupati mendapat tugas dari Kesatu-annya di Polres Cilacap yang saat itu menjadi KAUR BATAUD Intel POLRES Cilacap.

¹⁵ Wawancara dengan Puji Zariat, tanggal 10 April 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

Pria yang dulu tinggal beralamatkan di Jalan Rinjani No 119 Cilacap menjadi Koordinator bagian Pengawasan di Pemilu 2007.

Pak Sulis sempat mengenyam Pendidikan S1 di fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma (UNWIKU) Purwokerto selama enam semester, karena kesibukan pekerjaannya maka tidak selesai, pak Sulis yang pernah menjadi Bendahara di kepengurusan FORKI selama setahun kepengurusan mempunyai hobi sport dan music.

Perjalanan Karirnya sebagai anggota POLRI berawal dari pendidikan Sekolah Calon Perwira (SECAPA) POLRI, dan pindah pindah tugas dari Polres Cilacap, Polres Batang, Polres Banjarnegara, dan sampai sekarang menjabat sebagai Kasat Intel Polresta Banyumas, dengan pangkat terakhir Kopol. Kopol Sulistyio dikaruniai 2 putra yang sudah mandiri semua dan kini Tinggal di Jalan Makam no. 24 Rt.6 Rw.4 Watumas, Kel. Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas.¹⁶

¹⁶ Wawancara dengan Sulistyio Dwi Cahyo, tanggal 10 April 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

5. Dra. Yusriati Nur Farida Akp. M.Si



Yusriati Nur Farida adalah Ketua dan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Cilacap, bagi bu Ida panggilan akrab sehari harinya, ini adalah pengalaman Pertama kali menjadi penyelenggara Pemilu dan menjadi Panwas 2007 di Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Cilacap. Perempuan kelahiran Cilacap, 23 Agustus 1969, yang dulu tinggal di Perumahan KOMPERTA Donan dan dikaruniai 3 putri dan 1 putra ini, kini masih aktif menjadi Tenaga Pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto.

Bu Ida kini tinggal di Jalan Watu Gede Arcawinangun Purwokerto. Dari dulu sampai sekarang bu Ida sangat menggemari berkebun dan hobby mengoleksi tanaman hias. Sebagai seorang yang punya background tenaga pengajar di perguruan Tinggi perempuan ini telah menamatkan Strata satu di UNS dan Program Magisternya di UNY.¹⁷

¹⁷ Wawancara dengan Yusriati Nur Farida, tanggal 10 Mei 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

Dokumentasi Pemilihan Gubernur 2007



Suasana kampanye di beberapa tempat tampak meriah menunjukkan antusias calon pemilih masih tinggi



Panwas bersama Forkopimdan memantau kampanye



Kampanye paslon Probo dan Tatto didampingi oleh istri yang nampak kompak dan semangat



Pelantikan Paslon H.Probo Yulastoro dan H. Tatto Suwanto Pamuji dilantik Oleh Gubernur Jawa Tengah Atas nama Presiden RI

Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber



PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2008

A. Konteks Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2008 Kabupaten Cilacap

Di Indonesia untuk melaksanakan demokrasi, dengan mekanisme pemilu dan pemilihan, kalau pemilu dilaksanakan secara serentak dan nasional untuk memilih Legislatif yaitu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta berbarengan memilih Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan Pemilihan yaitu Pemilu yang dilaksanakan secara lokal pada daerah/wilayah tertentu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sehingga diadakannya penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan praktis pada tahun-tahun tertentu. Bawaslu Kabupaten Cilacap menelisik keberadaan mereka Pengawas Pemilu maupun Pemilihan pada saat mereka menjadi bagian dari Panwaslu Kabupaten, melalui literasi buku laporan, media daring sosial internet, serta wawancara dengan mereka yang menjadi Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa-Tengah pada tahun 2008.¹⁸

Dalam menelisik keberadaan mereka selaku Pengawas Pemilu dan/atau Pemilihan pada tahun 2008, Bawaslu Kabupaten Cilacap mencoba merangkum dalam Bunga Rampai Pengawas Pemilu

¹⁸ Wawancara dengan Sulistiyo Dwi Cahyo, tanggal 10 April 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

dan Pemilihan dari sisi fasilitas, sepak terjang mereka dalam melakukan pengawasan setiap tahapan pemilu dan/atau pemilihan. Terangkum sepenggal cerita dan kisah mereka sebagai Pengawas Pemilu dan/atau Pemilihan, tepatnya untuk tahun 2008 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa-Tengah.

B. Profil Panwaslu Kabupaten Cilacap Tahun 2008

Pemungutan suara 2008 digelar pada 22 Juni 2008 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Cilacap yang merupakan bagian wilayah Provinsi Jawa Tengah yang mengikuti pemilihan Kepala Daerah. Demokrasi ini dilaksanakan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur karena masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang ada akan berakhir. Tahapan Pengawasan Pilkada Tahun 2008 dilaksanakan oleh Panwaslu tingkat Kabupaten Cilacap, secara efektif baru bisa dilaksanakan pada tanggal 3 April 2008, karena Panwaslu baru terbentuk dan ditetapkan pada tanggal 3 April 2008. *Dasar pembentukan panitia pengawas Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk tingkat Kabupaten/Kota Kecamatan masing-masing dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah No. 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah 2008 Tingkat Kabupaten/Kota dan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah No. 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah.*¹⁹

¹⁹ Wawancara dengan Sugeng Hariyadi, tanggal 10 Mei 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Pilkada Provinsi Jawa Tengah, diikuti lima pasangan calon, **Pertama** adalah pasangan calon Bambang Sadono-Muhammad Adnan yang diusung Partai Golkar, Kedua pasangan calon Agus Soeyitno-Abdul Kholiq Arif yang diusung Partai PKB, Ketiga pasangan calon Sukawi Sutarip-Sudharto yang diusung Partai Demokrat dan Partai PKS, Keempat pasangan calon Bibit Waluyo-Rustriningsih yang diusung Partai PDIP, Kelima pasangan calon Muhammad Tamzil-Abdul Rozaq Rais yang diusung Partai PPP dan Partai PAN.

Jumlah hak pilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Kabupaten Cilacap sebanyak 1.345.773 (*satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga*), dengan jumlah tempat pemungutan suara adalah 2.810 TPS.

Penghitungan dan rekapitulasi suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Kabupaten Cilacap dimenangkan oleh Pasangan Calon Bibit Waluyo - Rustriningsih, dengan perolehan suara 367.215 (*tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima belas*) atau 47.89% (*empat puluh tujuh koma delapan sembilan*) persen.

Tabel Perolehan Suara Pilkada 2008

Kandidat		Partai Pengusung	Suara	Perse ntase
1	Calon Gubernur: Bambang Sadono Calon Wakil Gubernur: Muhammad Adnan	GOLKAR	3.192. 093	22.79 %

2	Calon Gubernur: Agus Soeyitno Calon Wakil Gubernur: Abdul Kholiq Arif	PKB	957.343	6.83%
3	Calon Gubernur: Sukawi Sutarip Calon Wakil Gubernur: Sudharto	Demokrat PKS	2.182.102	15.58%
4	Calon Gubernur: Bibit Waluyo Calon Wakil Gubernur: Rustriningsih	PDI-P	6.084.261	43.44%
5	Calon Gubernur: Muhammad Tamzil Calon Wakil Gubernur: Abdul Rozaq Rais	PPP PAN	1.591.243	11.36%

Pada pilkada tahun 2008, tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Cilacap 59,41 persen. Pasangan calon Bibit Waluyo-Rustriningsih terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, dengan perolehan suara 43,44% dan dilantik pada tanggal 23 Agustus 2008 oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, di Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, Jln Pahlawan No. 7 Semarang.

Unsur terpenting dalam penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah adalah pengawasan, karena dengan pengawasan tersebut untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada terlaksana sesuai aturan yang ada.

Pembentukan Pengawas Pemilihan di Kabupaten Cilacap melalui beberapa tahapan antara lain: pendaftaran, seleksi administrasi, tes tertulis,

wawancara hingga pengumuman. Pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa-Tengah 2008 setelah proses seleksi selesai, ditetapkan 5 Panwaslu terpilih yang kesemuanya laki-laki, mereka adalah Sarwo Mumpuni, Tunut Widodo, S.Ag. Sugeng Hariadi, S.H.,MH. Iptu Sulistiyo DC. Sani Ariyanto, S.T. Kelimanya dilantik oleh Moeldoko, S.H Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah pada 3 April 2008 bertempat di gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, Jln Pahlawan No. 7 Semarang. Setelah dilantik, 5 orang Panwaslu Kabupaten Cilacap mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Lima orang tersebut pasca pelantikan segera menggelar pleno untuk membentuk struktur, disepakati sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Sarwo Mumpuni	Ketua
Tunut Widodo, S.Ag.	Wakil Ketua
Sugeng Hariadi, S.H.,M.H.	Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa
Iptu Sulistiyo DC.	Koordinator Bidang Pengawasan
Sani Ariyanto, S.T.	Koordinator Bidang Penerimaan dan Tindak Lanjut Laporan

Setelah dilantik Panwaslu Kabupaten Cilacap, yang tugasnya melakukan pengawasan pada setiap tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah 2008 di Kabupaten Cilacap diberikan fasilitas gedung oleh Pemda Kabupaten

Cilacap terletak di Jl. MT Haryono, Nomor 75, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap.

Saat pertama kali menempati kantor yang terletak di Jln. MT Haryono Nomor 75, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, belum ada sarana dan prasarana yang tersedia, Sarwo Mumpuni bersama keempat anggota lainnya segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk mengajukan sarana prasarana guna mensukseskan kerja-kerja pengawasan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Cilacap.

Pemda Cilacap memfasilitasi kendaraan operasional 1 (satu) unit mobil jenis Avanza. Sedangkan terkait sumber biaya penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 sepenuhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 di Kabupaten Cilacap sebesar Rp. 1.622.529.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan rupiah). Anggaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan, mulai dari honor pengawas pemilihan, sosialisasi partisipatif, pemenuhan kebutuhan kantor dan lain-lain.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengawasi setiap penyelenggaraan tahapan pemilihan, Panwaslu Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2008 Kabupaten Cilacap selalu berusaha dan berdaya upaya melakukan langkah-langkah konkrit agar bisa menjalankan tugas secara independen dan selalu berusaha untuk meminimalkan berbagai pelanggaran terhadap proses demokrasi.

Koordinasi secara intensif dalam penegakan hukum pelanggaran Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah dengan GAKKUMDU dan Dinas/Instansi terkait serta bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan, Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon, Partai Politik dan Masyarakat. Langkah konkritnya meliputi:

1. Masa Pra Kampanye

- a. Pertemuan koordinasi dengan masing-masing tim sukses pasangan calon mengenai pemasangan alat peraga kampanye dan tata cara kampanye.
- b. Penertiban atribut yang tidak sesuai dan menyalahi ketentuan.

2. Masa Kampanye

- a. Memberikan teguran secara lisan maupun tertulis kepada tim sukses pasangan calon dana tau pasangan calon yang melanggar ketentuan yang berlaku dalam kampanye.
- b. Menyelesaikan permasalahan secara cepat dan tepat ditempat kejadian tanpa harus berkepanjangan.

Dalam menunjang kinerja pengawasan, tentu saja Panwas Kabupaten Cilacap memerlukan dukungan Kesekretariatan, adapun jajaran Kesekretariatan sebagai berikut:

Drs. Slamet Saefrudin	Koordinator Sekretariat
Edi Gayanto	Bendahara
Ari Subroto	Kepala Urusan Pengawasan Pemilihan (Kaur P3)

Galih Gumanti	Kepala Urusan Penanganan, Pengaduan Pelanggaran dan Penyelesaian (Kaur P4)
Edi Suprihono	Tenaga Teknik lainnya
Tugiyo	Driver
Hadi Pramono	Tenaga Pendukung
Suratman	Tenaga Pendukung
Supardi	Tenaga Pendukung

Menjadi Panwas Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2008 di Kabupaten Cilacap 2008, Sarwo Mumpuni dan empat rekannya menerima honorarium sebesar Rp 2,5 juta per bulan. Panwas Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2008 di Kabupaten Cilacap bekerja selama 12 bulan. Saat itu, tidak ada tunjangan maupun jaminan kesehatan untuk para Panwas Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah 2008. Untuk koordinasi di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan Panwas Kabupaten Cilacap membentuk jajaran di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Di tingkat kecamatan ada 72 anggota Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan 284 pengawas Desa/Kelurahan.

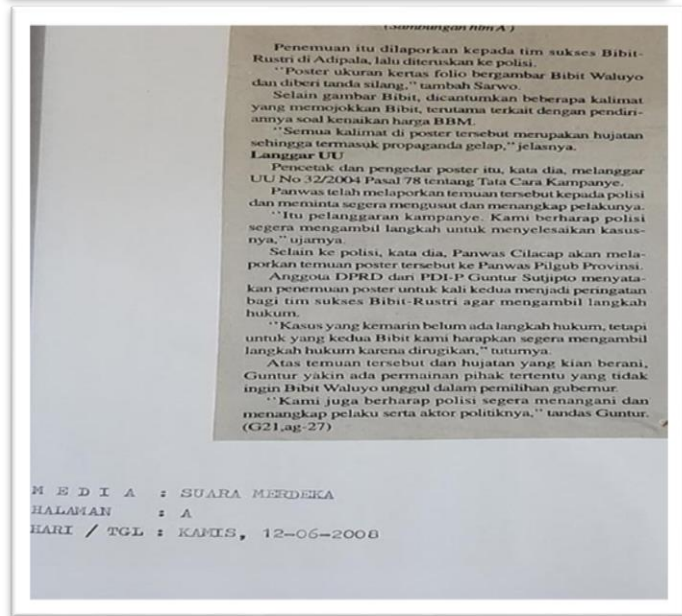
C. Peristiwa Menarik Pengawasan Pilkada 2008

1. Peristiwa menarik terkait pengawasan pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah 2008 di Kabupaten Cilacap

Menurut Sarwo mumpuni pada saat melakukan pengawasan ada peristiwa menarik ketika ditemukan 15.000 poster pojokan Bibit Waluyo ditemukan di perairan Bengawan Adiraja yang masuk Desa Karangbenda Kecamatan Adipala, awalnya nelayan Joyo Kusumo dan Miarjo tidak tahu isi karung tersebut. Setelah diambil dan dibuka ternyata di dalamnya berisi poster yang mendiskreditkan Bibit Waluyo, penemuan dilaporkan ke tim sukses Bibit Waluyo-Rustri di Adipala, lalu diteruskan ke Polisi.²⁰

Sarwo mumpuni bahwa pencetak dan pengedar poster itu melanggar Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 78 Tentang Tata Cara Kampanye. Panwas telah melaporkan temuan tersebut kepada polisi dan meminta segera mengusut dan menangkap pelakunya. Lebih lanjut Sarwo Mumpuni menyatakan itu pelanggaran kampanye, pihaknya berharap polisi segera mengambil langkah untuk menyelesaikan kasusnya ujarnya sebagaimana dilansir di Media Suara Merdeka Hal. A Kamis 12 Juni 2008.

²⁰ Wawancara dengan Sarwo Mumpuni, tanggal 10 April 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.



Pelaku yang menyebarkan selebaran atau poster yang mendiskreditkan pasangan calon Gubernur Bibit Waluyo-Rustriningsih, kali pertama tertangkap Imam Prasetyo (24) Warga Desa Setiadi, Kecamatan Puring, Kebumen. Dari hasil klarifikasi yang bersangkutan tidak menduga isinya mendiskreditkan Bibit Rustri “Kata Sriyanto di Kantor Panwas Pilgub Provinsi Jawa-Tengah Jalan Tri Lomba Juang Semarang.

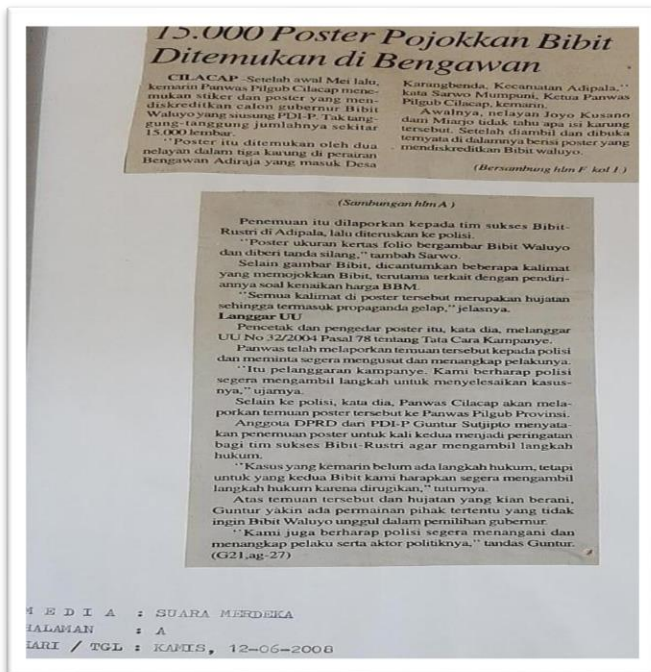
Dari pengembangan temuan itu, Panwas bersama polisi menangkap Ambar dan Jalil, Ambar

warga Desa Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, demikian pula Jalil Panwas tidak mengungkapkan identitas kedua orang itu secara terperinci. Baik Ambar maupun Jalil telah diperiksa di Polres Cilacap. Sriyanto mengungkapkan Imam mengaku bersedia memasang selebaran sebanyak 5000 lembar karena dijanjikan uang Rp 2 juta.

Selebaran yang mendiskreditkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusung PDI-P itu berasal dari Moch Kartono, informasi yang diperoleh Panwas orang itu berasal dari Tegal "Diduga otaknya Moch Kartono. Orang itulah yang memberi kepada Imam" jelas Sriyanto.

Menurut Sarwo Mumpuni selebaran yang memojokkan Bibit Waluyo dinilai Panwas Pilkada Gubernur Jawa Tengah 2008 Kabupaten Cilacap telah menodai nilai-nilai demokrasi. Asas bersaing secara sehat untuk menjadi pemenang dalam sebuah pemilu langsung seharusnya dijunjung tinggi oleh semua pihak "Selebaran itu sangat disayangkan, semestinya tidak muncul jika semua menghormati demokrasi"

Kemudian selebaran itu membuktikan ada pihak yang tidak siap mengusung asas demokrasi. Mereka belum dewasa dalam berpolitik sehingga melahirkan tindakan memalukan itu. "Lepas dari siapapun yang menjadi sasaran. Kami menilai perbuatan itu keliru dan menciptakan iklim tidak sehat" tandasnya. Pihaknya berharap selebaran itu tidak memicu konflik antar pendukung peserta pemilihan Gubernur. Pihak yang dirugikan diminta menjaga emosi sehingga Cilacap kondusif. Penanganan kasusnya dipercayakan kepada Polisi.



Panitia Pengawas sudah membuat laporan kepada pihak berwajib mengenai masalah itu. “Kami yakin semua bisa diselesaikan. Sebagaimana dilansir di Media Suara Merdeka Hal. A Jum’at 23 Mei 2008.

D. Profil Anggota Panwaslu Kabupaten Cilacap

Profil Anggota Panwas Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tahun 2008. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang, berpijak pada pepatah tersebut Bawaslu Kabupaten Cilacap mencoba menggali data-data pribadi dari Panwas Tahun 2008 yang terangkum dalam Profil Anggota Panwas sebagai berikut:

1. Sarwo Mumpuni



Sarwo Mumpuni, merupakan sosok pria yang energik, dia juga banyak menjadi pengurus di berbagai LSM maupun ORMAS. Selain itu pria kelahiran Cilacap, 12 September 1969. Pada saat itu masih aktif menjadi

Wartawan di Media Kontras Jakarta Pada saat menjadi Panwas Sarwo Mumpuni tinggal di Jln. Pemintalan, 38 Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap.

Bung Sarwo sapaan akrab Sarwo Mumpuni pada saat mendaftar Panwas Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2008 untuk Kabupaten Cilacap menggunakan jalur perwakilan dari unsur Media Masa/Pers dilihat dari formasi yang diumumkan pada saat pengumuman seleksi Panwas Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2008 untuk Kabupaten Cilacap.

Bung Sarwo menempuh pendidikan hingga SMA, dan menamatkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Cilacap. Sejak kecil Bung Sarwo sangat gemar dan suka membaca buku, maka sampai saat ini kegemaran membaca buku masih belum berubah sampai saat ini, karena bagi Bung Sarwo dengan membaca akan bisa membuka

wawasan dunia begitu luas dengan membaca tersebut semua pengetahuan tentang berbagai hal bisa dicari dengan mudahnya. Untuk saat ini Bung Sarwo tinggal di Jln. Cempaka No. 7 RT. 02 RW 12, Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan dan tinggal bersama dengan istri serta 4 putra-putrinya.²¹

Nama	Sarwo Mumpuni
Alamat	Jl. Pemintalan No. 32 Tambakreja Cilacap
Jabatan	Ketua
Instansi Asal	Unsur Pers
No. Telp	081548834404

2. Tunut Widodo, S.Ag



Tunut Widodo panggilan akrabnya Tunut, lahir di Cilacap 27 Oktober 1973. Mengenyam pendidikan S1 Fakultas Tarbiyah di IAIIG Cilacap lulus Tahun 1997, Terlahir dari seorang Ibu yang bernama Yatinem, Bpk Astra Negara Asli Warga Adipala. Tunut

²¹ Wawancara dengan Tunut Widodo, tanggal 10 Mei 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

dikarunia dua Orang anak yaitu satu putra dan satu putri, dari istrinya yang bernama Sulfatun Hikmah, pertama kali berorganisasi dan jadi pengurus di Remaja Masjid, Karang Taruna, IPNU ranting, anak cabang sampai di cabang, sampai sekarang masih pengurus MWCU Adipala, pernah juga menjabat di Lazismu Cilacap dari 2016-2017.

Pertama kali bergelut di bidang kepemiluan di Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), di Tahun 2004 di Panwascam Adipala, Tahun 2007-2008 di Panwas Kabupaten Cilacap pada saat itu untuk pemilihan Bupati Kabupaten Cilacap dan juga Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Mendaftar Panwaslu Tahun 2008 dari unsur Tokoh Masyarakat. Untuk seleksi dan tes di DPRD Kabupaten Cilacap Jumlah pendaftar sekitar kurang lebih 18 Orang, oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah diberikan pembekalan sekaligus dilantik di Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Setelah dilantik dalam perjalanan pulang dari pelantikan menuju Cilacap, untuk menyusun susunan Panwaslu diadakan pleno di rumah makan Rahayu di daerah Temanggung dan sepakat Sarwo Mumpuni menjadi Ketua. Untuk duduk di divisi-divisi menurut Tunut melihat backgroundnya dari masing-masing Panwas. Untuk masa jabatan di Panwas Kabupaten kurang lebih sembilan bulan. Di gaji tiga juta, tanpa tunjangan apapun. Berkantor di DPRD Kabupaten Cilacap dan beberapa bulan pindah yang saat

ini ditempati KPU Jln. MT Haryono Kabupaten Cilacap.

Di samping itu ada juga pelanggaran lainnya menurut pada saat pencoblosan masih banyak pemilih yang memakai kaos pasangan. Sebagai Panwas tentu saja ada suka dukanya, sukanya bisa menjadi penyelenggara karena disana ada pengalaman pengalaman yang baru tidak ada pada waktu kuliah, dukanya pengawas pemilu lembaga yang dibenci oleh siapapun, karena bisa dipastikan banyak orang yang tidak senang selalu diawasi padahal Panwas kerjanya mengawasi pada tahapan pemilu.

Nama	Tunut Widodo, S.Ag
Alamat	Jl. Sumbut Ds. Adiraja Adipala Cilacap
Jabatan	Wakil Ketua
Instansi Asal	Unsur LSM
No. Telp/HP	08156976868

3. Sugeng Hariyadi, S.H., M.H.



Sugeng Hariyadi lahir di Jombang 01 Januari 1968, Pendi-dikan yang ditempuh S2 Hukum saat menjabat sebagai Panwas pada Bidang Penyelesaian Sengketa,

beralamat di Jln. Wijaya Kusuma Cilacap.²²

Nama	Sugeng Haryadi, S.H.,M.H.
Alamat	Jl. Wijaya Kusuma, Cilacap
Jabatan	Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa
Instansi Asal	Kejaksaan Negeri Cilacap
No. Telp/HP	08164733429

4. Iptu Sulisty Dwi Cahyo



IPTU Sulisty dengan sapaan akrabnya pak sulis, adalah anggota aktif Polres Cilacap yang dilahirkan pada 19 Juli 1965, pak sulis menjadi panwas bupati mendapat tugas dari Kesatuannya di Polres Cilacap yang saat itu Menjadi Kaur Bataud Intel Polres Cilacap.

Pria yang dulu tinggal beralamatkan di Jalan Rinjani No 119 Cilacap, menjadi Koordinator Bidang Penerimaan dan tindak lanjut Laporan Koordinator Bidang Penerimaan dan tindak lanjut Laporan pada

²² Wawancara dengan Sulistiyo Dwi Cahyo, tanggal 10 April 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

pemilu 2009, sempat mengenyam Pendidikan S1 di fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma (UNWIKU) Purwokerto selama enam semester, karena kesibukan bekerja sebagai anggota Polri yang berpindah-pindah tugas, maka dalam menempuh pendidikan S1 tidak selesai.²³

Pak Sulis yang pernah menjadi Bendahara di kepengurusan FORKI selama setahun kepengurusan mempunyai hobi sport and music, Perjalanan Karirnya sebagai anggota POLRI berawal dari pendidikan Sekolah Calon Perwira (SECAPA) POLRI, dan pindah pindah tugas dari Polres Cilacap, Polres Batang, Polres Banjarnegara, dan sampai sekarang menjabat sebagai Kasat Intel Polresta Banyumas, dengan pangkat Kopol. Kopol Sulistyو mempunyai dua putra yang sudah mandiri semua dan untuk saat ini Tinggal di Jalan Makam no. 24 Rt.6 Rw.4 Watumas, Kel. Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas.

Nama	IPTU Sulistyو DC
Alamat	Jl. Rinjani No. 119 Sidareja Cilacap
Jabatan	Anggota Bidang Pengawasan
Instansi Asal	Unsur Kepolisian
No. Telp/HP	08164635011

²³ Wawancara dengan Sulistyو Dwi Cahyo, tanggal 10 April 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

5. Sani Arianto, ST



Sani Arianto panggilan biasa dipanggil Bang Sani lahir di Cilacap 3 Mei 1976. Bang Sani merupakan seorang yang energik dan menyukai kegiatan berorganisasi disamping itu juga menggeluti bidang Media, saat ini sebagai Pengurus PPWI Cilacap. Bang Sani saat ini dan keluarga beserta tiga orang anaknya mendiami rumah di Perum Rinenggo Asri Jln Bisma d6/88 RT 03 RW 10 Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap.

PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

A. Konteks Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 Kabupaten Cilacap

Di Indonesia untuk melaksanakan demokrasi, dengan mekanisme pemilu dan pemilihan, kalau pemilu dilaksanakan secara serentak dan nasional untuk memilih legislatif yaitu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta berbarengan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pemilihan yaitu pemilu yang dilaksanakan secara lokal pada daerah/wilayah tertentu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sehingga diadakannya penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan praktis pada tahun-tahun tertentu. Panwaslu Kabupaten Cilacap menelisik keberadaan mereka pengawas pemilu maupun pemilihan pada saat mereka menjadi bagian dari Panwaslu Kabupaten, melalui literasi buku laporan, media daring sosial internet, serta wawancara dengan mereka-mereka Pengawas Pemilu yang pada tahun 2009, menjadi Pengawas Pemilihan Umum.²⁴

Dalam menelisik keberadaan mereka selaku Pengawas Pemilu pada tahun 2009, Panwaslu Kabupaten Cilacap mencoba merangkum dalam Bunga Rampai Pengawas Pemilu dan Pemilihan dari sisi fasilitas, sepak terjang mereka dalam melakukan

²⁴ Laporan Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009

pengawasan setiap tahapan pemilu. Terangkum sepenggal cerita dan kisah mereka sebagai Pengawas Pemilu tepatnya untuk tahun 2009 sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemilu 2009

Pemilu tahun 2009 untuk memilih Legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) dan memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2009 (biasa disebut Pileg Pilpres), diselenggarakan untuk masa bakti periode 2009-2014. Pemungutan suara Pileg Pilpres diselenggarakan pada 8 Juli 2009.

Pemilu Pilpres 2009 diikuti tiga pasangan calon. Pertama, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono yang diusung Partai Demokrat. Kedua, pasangan Megawati Soekarnoputri - Prabowo Subianto yang diusung Partai PDI-P. Ketiga, pasangan Jusuf Kalla - Wiranto yang diusung Partai Golkar.

Untuk Kabupaten Cilacap sebanyak 1.391.399 warga yang memiliki hak pilih dan masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) diperebutkan tiga pasangan calon. Setelah melalui proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara, KPU Kabupaten Cilacap menetapkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono memperoleh suara sah sebanyak 495.807, adapun pasangan Megawati - Prabowo suara sah sebanyak 322.536, dan pasangan Jusuf Kalla - Wiranto memperoleh suara sah sebanyak 86.255.²⁵

²⁵ Laporan Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009

Sedangkan untuk warga nasional yang memiliki hak pilih dan masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) 176.367.056, diperebutkan tiga pasangan calon, setelah melalui proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara, KPU RI Sabtu 25 Juli 2009 menetapkan hasil rekapitulasi suara nasional Pilpres 2009 yang telah diselenggarakan pada 22 - 23 Juli 2009.

Hasil Pilpres 2009 berdasarkan penetapan tersebut sebagai berikut : pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan jumlah suara 73.874.562 (60,80%), sementara pasangan Megawati - Prabowo memperoleh suara 32.548.05 (26,79%), dan pasangan Jusuf Kalla - Wiranto memperoleh suara 15.081.814 (12,41%).

Untuk kehadiran pemilih secara nasional 127.983.655 (72,56%), sementara untuk Kabupaten Cilacap dengan DPT 1.391.399, yang menggunakan hak pilih 958.076 (69%), suara sah 904.598 (94%), suara tidak sah 53.478 (6%)

Pada Pemilu Presiden ada sengketa pasangan Jusuf Kalla - Wiranto dan Megawati - Prabowo Subianto mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2009 yang telah ditetapkan KPU ke Mahkamah Konstitusi (MK), masing-masing dengan nomor perkara 108/PHPU.B-VII/2009 dan 109/PHPU.B-VII/2009. Isi keberatan kedua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut antara lain:

1. Kekacauan masalah penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
2. Regrouping dan/atau pengurangan jumlah TPS;
3. Adanya kerjasama atau bantuan IFES;
4. Adanya spanduk buatan KPU mengenai tata cara pencontrengan;
5. Beredarnya formulir illegal model "C-1 PPWP";
6. Adanya berbagai pelanggaran administratif maupun pidana;
7. Adanya penambahan suara Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono serta pengurangan suara Megawati - Prabowo Subianto serta pengurangan suara Jusuf Kalla - Wiranto.

KPU berikut KPUD seluruh Indonesia menjadi termohon dan Bawaslu serta pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono menjadi pihak terkait, dalam sidang kedua perkara ini digabungkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena melihat adanya kesamaan pokok perkara.

Persidangan terbuka dilaksanakan sebanyak 4 kali yaitu tanggal 4 Agustus 2009 sidang pemeriksaan perkara, 5 Agustus 2009 sidang mendengar keterangan termohon, Pihak Terkait, keterangan Saksi dan Pembuktian, dan tanggal 6 - 7 Agustus 2009 Sidang Pembuktian, pada tanggal 12 Agustus 2009, Majelis Hakim Konstitusi (MK) membacakan putusannya dimana amar putusannya menyatakan bahwa permohonan ditolak seluruhnya. Putusan tersebut diambil secara bulat oleh seluruh Hakim Konstitusi.

Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut pada 18 Agustus 2009 KPU menetapkan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2009 - 2014. Penetapan ini kemudian diikuti ucapan selamat dari para Calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pilpres 2009 lainnya. Pelantikan Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono Periode 2009 - 2014 berlangsung hari Selasa 20 Oktober 2009 Pukul 10.00 WIB di Gedung Nusantara, Senayan dalam Sidang Paripurna MPR RI.

Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono selaku Presiden dan Wakil Presiden terpilih mengucapkan Sumpah/Janjinya di depan Pimpinan dan Anggota MPR dengan dihadiri Anggota MPR RI sejumlah 647 orang dari 692 orang.

Untuk lebih jelasnya perolehan suara yang dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berpasangan dengan Boediono berikut tabel perolehan suara tersebut :

Tabel Perolehan Suara Pilpres 2009

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase Suara
1	Megawati - Prabowo	32.548.105	26,79%
2	SBY - Boediono	73.874.562	60,80%
3	Jusuf Kalla - Wiranto	15.081.814	12,41%
JUMLAH		121.504.481	100,00%

2. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif 2009

Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2009 (biasa disingkat Pemilu Legislatif 2009 atau Pileg 2009), Pileg ini diselenggarakan untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 Anggota Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia periode 2009 - 2014. Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak hampir seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 9 April 2009 (sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 5 April 2009, tetapi jadwal berubah dan kemudian diundur menjadi 9 April 2009).

Pemilihan Umum Anggota DPR dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka yang perhitungannya didasarkan pada sejumlah daerah pemilihan, dengan peserta pemilu adalah Partai Politik. Pemilihan umum ini adalah yang pertama kalinya dilakukan dengan penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut (pemilih memilih calon Anggota DPR, bukan partai politik) untuk nasional Pemilihan Umum Anggota DPR 2009 diikuti oleh 38 Partai Politik.

Pada 7 Juli 2008, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengumumkan daftar 34 Partai Politik yang dinyatakan lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2009, dimana 18 partai diantaranya merupakan partai

politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu maupun baru mengganti namanya, sedangkan 16 partai lainnya merupakan peserta Pemilu 2004 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2004 - 2009, sehingga langsung berhak menjadi peserta Pemilu 2009.

Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa seluruh partai politik peserta Pemilu 2004 berhak menjadi peserta Pemilu 2009, sehingga berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta No. 104/VI/2008/PTUN. JKT, KPU menetapkan 4 partai politik lagi sebagai peserta Pemilu 2009.

Berikut daftar 38 partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota DPR 2009 beserta nomor urutnya.

Tabel Peserta Pemilihan Umum Legislatif 2009

No	Nomor Urut Partai	Partai Politik
1	1	Partai Hati Nurani Rakyat
2	2	Partai Karya Peduli Bangsa
3	3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
4	4	Partai Peduli Rakyat Nasional
5	5	Partai Gerakan Indonesia Raya
6	6	Partai Barisan Nasional
7	7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
8	8	Partai Keadilan Sejahtera
9	9	Partai Amanat Nasional
10	10	Partai Perjuangan Indonesia Baru
11	11	Partai Kedaulatan

12	12	Partai Persatuan Daerah
13	13	Partai Kebangkitan Bangsa
14	14	Partai Pemuda Indonesia
15	15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
16	16	Partai Demokrasi Pembaruan
17	17	Partai Karya Perjuangan
18	18	Partai Matahari Bangsa
19	19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia
20	20	Partai Demokrasi Kebangsaan
21	21	Partai Republika Nusantara
22	22	Partai Pelopor
23	23	Partai Golongan Karya
24	24	Partai Persatuan Pembangunan
25	25	Partai Damai Sejahtera
26	26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
27	27	Partai Bulan Bintang
28	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
29	29	Partai Bintang Reformasi
30	30	Partai Patriot
31	31	Partai Demokrat
32	32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia
33	33	Partai Indonesia Sejahtera
34	34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama
35	41	Partai Merdeka
36	42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia
37	43	Partai Sarikat Indonesia
38	44	Partai Buruh

Adapun untuk daerah Pemilihan Umum Anggota DPR adalah Provinsi atau gabungan Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi, dengan total 77 daerah pemilihan. Jumlah kursi untuk setiap

daerah pemilihan berkisar antara 3 - 10 kursi, yang ditentukan sesuai jumlah penduduk. Kabupaten Cilacap Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII bersama dengan Kabupaten Banyumas jumlah kursi yang diperebutkan.

Untuk Hasil Pemilihan Anggota DPR Pada 9 Mei 2009, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menetapkan hasil Pemilihan Umum anggota DPR 2009 setelah 14 hari (26 April 2009 - 9 Mei 2009) melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara secara nasional hasil yang diumumkan meliputi perolehan suara berikut jumlah kursi masing-masing partai politik di DPR. Penetapan jumlah kursi mengalami revisi oleh KPU RI pada 13 Mei 2009 setelah terjadi perbedaan pendapat mengenai metode penghitungannya. Revisi kemudian dilakukan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Keterangan Pembatasan garis hitam, karena adanya penerapan *parliamentary threshold* (PT) partai politik yang memperoleh suara persentase kurang dari 2,5% tidak berhak memperoleh kursi di DPR.

3. Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah

Pemilihan umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah 2009 dilaksanakan dengan sistem aturan dan peserta yang sama dengan pemilihan Anggota DPR, untuk pemilihan umum tahun 2009 perolehan suara partai politik dalam pemilihan Anggota DPRD Provinsi tahun 2009 di Kabupaten Cilacap.

4. Pemilihan Umum untuk Anggota DPRD Kabupaten Cilacap

Dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009, sesuai data dari KPU Kabupaten Cilacap, untuk Kabupaten Cilacap warga yang mempunyai hak pilih dan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.373.704 tersebar di 24 Kecamatan dan 284 Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Cilacap, dengan jumlah TPS awal 3.715 dan tambahan 2.372 sehingga untuk TPS berjumlah 6.087.

Pada penyelenggaraan Pemilu 2009 untuk masyarakat Kabupaten Cilacap juga mengadakan pemilihan untuk memilih anggota DPRD yang akan duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten masa bakti 2009 - 2014.

5. Pemilihan Umum Anggota DPD

Anggota DPD pemilihan umum dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak, dengan peserta pemilu adalah perseorangan, dengan jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 kursi, dengan daerah pemilihan adalah Provinsi, Kabupaten Cilacap masuk daerah pemilihan Provinsi Jawa Tengah. Untuk Kabupaten Cilacap perolehan suara anggota DPD pada pemilihan Umum Tahun 2009 Kabupaten Cilacap, Daftar nama calon dan perolehan suaranya sebagaimana tabel di bawah ini:

**Perolehan Suara Anggota DPD Pada Pemilihan
Umum Tahun 2009
Kabupaten Cilacap**

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1	KH. Achmad Chalwani	0
2	Drs. Achmad Prihatno, S.H., M.M.	44.289
3	dr. H. Anis Supriyadi	15.270
4	H. Athoillah Habib, S.H.	24.183
5	H. Aufal Marom	50.199
6	Ayu Koes Indriyah, GKR.	63.564
7	Denty Eka Widi Pratiwi, S.E.	64.534
9	Imam Sabtoso, S.H.	24.007
10	H. M. Aniq Syahuri, L.C.	22.902
11	Marpuji, Kh., Drs.	21.271
12	Mohammad Talkhis	15.461
13	Drs. Mudzakkir Ali, M.A	11.546
14	Ky. Muh. Ridwan	21.821
15	Drs. H. Munawart Sholeh, M.Pd.	11.054
16	Drs. Munawar	3.791
17	Ir. Ngadino	9.705
18	Popy Susanti Dharsono	43.761
19	H. RM. Pupung Suharis, S.H.	11.593
20	Putut Yono Baskoro, S.H.	21.140
21	Ki. R. Muhammad Hakim, S.Pdi., M.Ag.	27.476
22	Ririn Susanto, A.Md.	5.701
23	Drs. Sakhwani	24.861
24	Sri Susahid, S.H., M.H.	13.772
25	H. Sudir Santoso, S.H.	12.127
26	H. Sudjadi, S.E.	0
27	Drs. Sulisty, M.Pd.	109.272
28	Ulul Afa	59.223
29	H. Wardedjo TW, S.Pd., M.M.	6.100

30	H. Widhy Artono Andy Pratikto	8.117
Total Perolehan Suara		785.230

B. Profil Kelembagaan Panwaslu Kabupaten Cilacap Tahun 2009

1. Profil Pengawas Pemilu 2009

Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pileg pilpres adalah pengawasan, karena pengawasan adalah merupakan kerja konkrit dan sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan pileg pilpres sesuai dengan aturan yang ada. Pileg Pilpres 2009 di Kabupaten Cilacap juga ada pengawas pemilu tersebut, Pengawas Pemilu Pileg Pilpres 2009, sebelum menjadi panwaslu dilakukan beberapa tahapan seleksi antara lain: pendaftaran, seleksi administrasi, tes tertulis, tes wawancara hingga pengumuman hasil seleksi.

Setelah proses seleksi selesai ditetapkan tiga orang Panwaslu terpilih untuk Kabupaten Cilacap, yang terdiri terdiri dua orang laki-laki dan satu orang perempuan, ketiga Panwaslu tersebut adalah:

1. Yoes Sachri, S.H. menjabat sebagai Ketua sekaligus merangkap Bidang 1 yaitu Organisasi, SDM dan Kebijakan Umum;
2. Tadzkiroh, S.Ag. Bidang 2 yaitu Bidang Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga;
3. Soemarsono, S.H. Bidang 3 yaitu Bidang Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum.

Ketiganya diambil sumpah/janji anggota Panwaslu Pileg Pilpres 2009 dilantik oleh Panwaslu Pileg Pipres Provinsi Jawa Tengah bersama dengan 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang menggelar Pileg Pilpres 2009. Setelah pelantikan, tiga orang Panwaslu Pileg Pilpres Kabupaten Cilacap mengikuti bimbingan teknis yang digelar dan diselenggarakan Panwaslu Pileg Pilpres Provinsi Jawa Tengah.

Pasca pelantikan, ketiga orang panwaslu terpilih segera menggelar rapat pleno guna membentuk struktur kelembagaan. Hasil rapat pleno disepakati, sebagai Ketua adalah Yoes Sachri, S.H. merangkap 1. Bidang Organisasi, SDM dan Kebijakan Umum, 2. Sumarsono, S.H. Anggota, Bidang Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum, 3. Tadzkiroh, S.Ag. Anggota Bidang Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga.

Yoes Sachri menyatakan, saat pertama kali menjadi Anggota Panwaslu Pileg Pilpres, belum ada fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia guna mendukung tugas-tugas kelancaran pengawasan. Yoes Sachri bersama dua orang anggotanya mencoba melobi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk mengajukan segala fasilitas sarana dan prasarana guna mensukseskan kinerja pengawasan Pileg Pilpres 2009.

Dari hasil berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap mendapat fasilitasi kantor di Gedung DPRD Kabupaten Cilacap, dan beberapa bulan pindah di Jl. MT Haryono, No 75, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, yang saat ini

untuk Kantor KPU Kabupaten Cilacap, dan juga menerima fasilitas satu mobil operasional jenis Toyota Kijang.

Terkait dengan anggaran Panwaslu Pileg Pilpres 2009 dialokasikan dari dana APBN sebanyak Rp. 3.727.758.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Anggaran tersebut untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari honor pengawas, sosialisasi partisipatif, pemenuhan kebutuhan kantor dan lain-lain.

Menurut Yoes Sachri agar fungsi pengawasan dapat berjalan dengan optimal, perlu menjalin sinergi dengan para pemangku kepentingan dan lembaga penegak hukum serta membangun dan meningkatkan pengawasan pemilu yang partisipatif pada masyarakat, antara lain dengan:

- a. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan institusi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan);
- b. Membuat Komitmen antara Pengawas, KPU, dan Peserta Pemilu;
- c. Menjalinkan kerja sama dengan media;
- d. Menggalang dukungan dari Pemerintah Daerah;
- e. Menjalinkan koordinasi dengan lembaga legislatif;
- f. Membuat model dan instrumen partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- g. Membuat sistem dan mekanisme pengaduan yang memungkinkan masyarakat dapat menyampaikan laporan pengaduan dengan mudah;

- h. Membangun komunikasi dan penyediaan informasi kepada publik;
- i. Membangun mekanisme yang memungkinkan akses publik untuk mengetahui proses penanganan laporan pengaduan dan penyelesaian sengketa;
- j. Membuat laporan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu.

Untuk menunjang kinerja pengawasan Panwaslu Pileg Pilpres 2009 Kabupaten Cilacap dibantu dengan kesekretariatan, Kepala Sekretariat Panwaslu Pileg Pilpres 2009 Agus Mubarak, S.Sos., Bendahara Edi Gayanto, Bagian Umum Imam Supardi, Administrasi Suswanti, Driver Tugiyono, Keamanan Suratman dan Inyadi, sementara untuk Kurniawan membantu bidang-bidang dan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua/Kepala Sekretariat, Sentot Maryanto, A.Md., membantu bidang-bidang dan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua/Kepala Sekretariat.

Yoes Sachri menjadi Panwaslu Pileg Pilpres 2009 di Kabupaten Cilacap dengan dua anggotanya menerima honorarium sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan bekerja selama 12 bulan, pada saat itu tidak ada tunjangan maupun jaminan kesehatan untuk para anggota Panwaslu Pileg Pilpres 2009. Untuk memperlancar pelaksanaan pengawasan dan koordinasi Panwaslu Pileg Pilpres 2009 membentuk jajaran di tingkat Kecamatan terdiri dari 72 Orang Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan (PPL) berjumlah 284 Orang, dan Mitra PPL berjumlah 50 Orang.

C. Peristiwa Menarik

Peristiwa menarik terkait pengawasan pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah 2009 di Kabupaten Cilacap Soal Tambahan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Menurut Yoes Sachri dalam melakukan pengawasan ada peristiwa yang menarik yaitu terkait soal tambahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pihaknya belum merekomendasikan ke KPU Cilacap, terkait nasib 207 warga Desa Mulyadadi, Kecamatan Majenang yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Alasannya sampai sekarang KPU Cilacap sendiri belum mengajukan surat permohonan rekomendasi ke Panwas Pemilu agar ke 207 warga tadi dimasukkan ke dalam DPT, "KPU sampai sekarang belum mengajukan surat permohonan rekomendasi ke Panwas Pemilu. Selain itu Panwas Pemilu, pihaknya mendapat surat dari Panwas Pemilu Provinsi Jawa Tengah yang isinya agar semua Panwas Pemilu Kabupaten menunggu arahan dari Bawaslu terkait dengan pengajuan rekomendasi tambahan DPT dari KPU, pada prinsipnya panwas tidak menginginkan ada warga yang sudah mempunyai hak pilih tapi namanya tidak tercantum di DPT.

Panwas ingin semua warga yang punya hak pilih terdaftar di DPT dan menggunakan hak pilihnya secara benar sesuai pilihannya masing-masing. Namun pada kenyataannya, di Desa Mulyadadi, Kecamatan Majenang, ungkapnya ada 207 warga yang tidak terdaftar di DPT. Padahal

sebelumnya nama mereka tercantum di dalam daftar pemilih sementara (DCS)".²⁶

D. Profil Anggota Panwas Pemilu 2009

1. Yoes Sachri, S.H.



Yoes Sachri, menjadi pengawas pemilu tahun 2009 dipercaya oleh dua sesama Anggota Pengawas Pemilu untuk menjabat sebagai Ketua Pengawas Pemilu tahun 2009, Bung Yoes nama panggilan

biasa di panggil oleh dua rekan kerjanya, Pria kelahiran Cilacap 16 Juli 1959, Bung Yoes sapaan akrabnya menamatkan sarjana hukumnya di Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2003.

Selain itu Bung Yoes mempunyai latar belakang seorang jurnalis, boleh dikatakan jagonya dalam membuat berita di media maka ketika pertama kali mendaftar menjadi panwaslu pada tahun 2004 dan juga pada tahun 2009 Bung Yoes mengawali kariernya di penyelenggara sebagai panwaslu perwakilan unsur media. Karena pada pemilu 2004 dan 2009 unsur perwakilan saat itu masih di berlakukan.

²⁶ Wawancara dengan Yoes Sachri, tanggal 10 April 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

Yoes Sachri Seorang Bapak yang dikaruniai 4 orang, dan mempunyai hobi traveling, membaca berita, dan jurnal sosial politik. Kini Yoes Sachri tinggal di desa Msadusari RT 02 Rw 10 Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap yang sebelumnya pada tahun 2012 Bung Yoes bertempat tinggal di Komplek Perumahan Taman gading Cilacap.²⁷

2. Sumarsono, S.H.



Soemarsono panggilan akrabnya Bung Marsono masuk di Panwas Pemilu dipercaya oleh kedua rekannya, untuk mengampu Bidang Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum. Bung Marsono mewakili

unsur LSM ketika menjadi Panwas Pemilu.²⁸

²⁷ Wawancara dengan Yoes Sachri, tanggal 10 April 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

²⁸ Laporan Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009

3. Tadzkiroh, S.Ag.



Tadzkiroh oleh teman-teman sesama penyelenggara pemilu mempunyai sa-paan akrab Azmi, akan tetapi sebutan lebih akrab dan familiar mba Tadz di kalangan teman-teman bermain dan kesehariannya. Perempuan kelahiran Cilacap 17 Januari

1971 ini adalah satu-satunya perempuan anggota Panwaslu tahun 2009. Mbak Tadz menamatkan Pendidikan Strata 1 di Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap pada tahun 1998, kini mbak Tadz masih aktif sebagai Kepala Perpustakaan di Universitas Nahdlatul Ulama (UNUGHA) Cilacap.

Mba Tadz seorang ibu yang dikaruniai 3 putri, dan hobi membaca dulu dan kini masih aktif aktif di berbagai kegiatan Ormas, bahkan seringkali menempati sebagai pimpinan organisasi ini, menjadi Koordinator bidang Pengawasan dan hubungan antar lembaga pada Panwaslu Tahun 2009. Perempuan yang kini tinggal di Jalan kepudang Desa Kesugihan Kecamatan Kesugihan mempunyai moto dan semboyan hidup bahwa sebaik baiknya hidup adalah yang bermanfaat bagi orang lain.²⁹

²⁹ Wawancara dengan Tazkirotul Azmi, tanggal 10 April 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012

A. Konteks Penyelenggaraan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Cilacap

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 diawali dengan tahapan perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pilkada, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2012 batas akhir pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cilacap sampai dengan Komisi Pemilihan Umum Cilacap, menetapkan pasangan H. Tatto Suwarto Pamuji - Akhmad Edi Susanto, S.T. sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan kepala daerah setempat pada 9 September 2012 dilanjutkan dengan pelantikan dan mengambil sumpah pasangan calon terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Cilacap periode 2012-2017 di Pendopo Wijayakusuma Sakti Kabupaten Cilacap Senin 19 November 2012.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dilaksanakan pada Tanggal 9 September 2012 diikuti oleh 2 pasangan calon yaitu Hj. Novita Wijayanti, SE., M.M. – H. Mochamad Muslich. S.Sos., M.M. dengan nomor urut 1 dan H. Tatto Suwarto Pamuji - Akhmad Edi Susanto, S.T. dengan nomor urut 2.

Pasangan nomor urut 1 Hj. Novita Wijayanti, SE., M.M. – H. Mochamad Muslich. S.Sos., M.M. diusung oleh gabungan partai politik yang terdiri dari Partai PDI Perjuangan, Partai Demokrat, PPP, PKB, PKS, Gerindra, PNBK, PNI Marhaen dan Partai Bintang Reformasi, sedangkan pasangan nomor urut

2 H. Tatto Suwarto Pamuji - Akhmad Edi Susanto, S.T. diusung oleh gabungan Partai Politik yang terdiri dari Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Karya Peduli Bangsa.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cilacap Pilkada Tahun 2012 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung
1	Hj. Novita Wijayanti, SE., M.M. – H. Mochamad Muslich. S.Sos., M.M.	<ul style="list-style-type: none">• PDI Perjuangan• Partai Demokrat,• PPP• PKB• PKS• Gerindra• PNBK• PNI Marhaen dan• Partai Bintang Reformasi
2	H. Tatto Suwarto Pamuji - Akhmad Edi Susanto, S.T.	<ul style="list-style-type: none">• Partai Golongan Karya• Partai Amanat Nasional• Partai Hati Nurani Rakyat dan• Partai Karya Peduli Bangsa

Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 adalah 1.498.215 yang terdiri dari Laki-laki 747.150 Pemilih dan Perempuan 751.065 Pemilih. Adapun hasil perolehan suara terbanyak diraih oleh pasangan nomor urut 2 H. Tatto Suwanto Pamuji - Akhmad Edi Susanto, S.T. dengan perolehan suara 555.044 atau 60.75 persen mengalahkan pasangan nomor urut 1 Hj. Novita Wijayanti, SE., M.M. - H.Mochamad Muslich, S.Sos., M.M. dengan perolehan suara 358.562 atau 39.25 persen. Pasangan H. Tatto Suwanto Pamuji - Akhmad Edi Susanto, S.T. memperoleh kemenangan di 22 Kecamatan dari 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012

Nama Daerah	Jumlah DPT	Laki-Laki	Perempuan
Kabupaten Cilacap	1.498.215	747.150	751.065

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih H. Tatto Suwanto Pamuji - Akhmad Edi Susanto, S.T. Dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Cilacap periode 2012-2017 oleh Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo pada Hari Senin tanggal 19 November 2013 di Pendopo Wijayakusuma Sakti Cilacap.

Hasil Perolehan Suara Pilkada Cilacap Tahun 2012

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	<ul style="list-style-type: none">Hj. Novita Wijayanti, SE., M.M.H. Mochamad Muslich, S.Sos., M.M.	358.562	39.25 %
2	<ul style="list-style-type: none">H. Tatto Suwanto PamujiAkhmad Edi Susanto, S.T.	555.044	60.75 %

B. Profil Panitia Pengawas Pemilihan Tahun 2012

Untuk mengawasi proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia membentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Pembentukan Panwaslu yang mengacu pada Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, diawali dengan seleksi tertulis calon anggota panwaslu di Hotel Wijayakusuma Cilacap yang diikuti oleh sekitar 15 peserta laki-laki dan 5 peserta perempuan.

Proses seleksi calon anggota panwaslu dilakukan beberapa tahap diawali dengan seleksi tertulis dan pada tahap berikutnya seleksi wawancara yang dilakukan oleh Bambang Eka Cahya dan Tim. Hasil proses seleksi terpilih sebagai

Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012 yaitu Muhammad Fatikhun, Sani Ariyanto dan Tadzkirotul Azmi.

Pelantikan Muhammad Fatikhun, S.Ag., Sani Ariyanto dan Tadzkirotul Azmi sebagai anggota panwaslu dilakukan di Hotel JW Marriot Surabaya pada bulan Oktober 2011 oleh Muhammad Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Beberapa bulan menjabat sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cilacap, pada bulan Juli 2012, dua anggota yaitu Muhammad Fatikhun dan Tadzkirotul Azmi mengundurkan diri, alasan pengunduran diri Muhammad Fatikhun adalah ada ketidakcocokan dengan rekan kerjanya, sedangkan Tadzkirotul Azmi mengundurkan diri dengan alasan kesehatan.³⁰

Munduranya Muhammad Fatikhun dan Tadzkirotul Azmi sebagai anggota panitia pengawas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap digantikan oleh Bachtiar Hastiarto dan Helmy Nur Adiansyah yang pada proses seleksi menduduki ranking 4 dan 5, sebelum mengawali tugas sebagai anggota Panitia Pengawas antar waktu, Bachtiar Hastiarto dan Helmy nurdiansyah pada bulan Juli tahun 2012 dilantik oleh Ketua Bawaslu RI Muhammad di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat

Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012 bertempat di Jl. Jenderal Sudirman No 200 Cilacap yang sampai saat

³⁰ Wawancara dengan Muhammad Fatikhun, tanggal 10 April 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

ini masih ditempati sebagai kantor Bawaslu Kabupaten Cilacap. Sarana dan Prasarana untuk Panitia Pengawas pada saat itu meskipun tidak mewah namun terbilang cukup, dengan gedung kantor berukuran sekitar 15 X 20 meter dan halaman sekitar 8 x 20 meter, dilengkapi dengan perabotan dan beberapa ruangan serta dilengkapi pendingin ruangan.

Anggaran Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cilacap awalnya hanya sebesar Rp 800.000.000,- kemudian saat anggota Panitia Pengawas Pemilihan terbentuk mengajukan tambahan anggaran dan disetujui menjadi Rp1.800.000.000,- Program unggulan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 diantaranya adalah penguatan partisipasi publik dalam ikut mengawasi tahapan pilkada, hal ini dilakukan dengan kegiatan sosialisasi untuk memberikan pemahaman dan membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa pilkada adalah hajat kita bersama yang perlu dukungan dan keterlibatan segenap komponen masyarakat.

Hubungan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dengan mitra lain seperti KPU, Polres, Kejaksaan Negeri, Pemerintah Kabupaten Cilacap, Ormas, LSM Media dan tokoh Masyarakat secara umum berlangsung harmonis bersifat timbal balik, saling membantu dan saling berbagi informasi.

Untuk menunjang kinerja pengawasan, Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 difasilitasi tenaga kesekretariatan yaitu Anang Spto Winarno S.Sos. karyawan Kesbangpol Kabupaten Cilacap sebagai

Sekretaris dan didukung 4 staf ASN serta dibantu 4 staf non ASN. Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 juga memiliki anggota Panitia Pengawas Kecamatan sejumlah 74 orang dan Panitia Pengawas Lapangan sejumlah 852 berdasarkan data PPL 2014.

Masa jabatan anggota Panitia Pengawas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012 untuk Tadzkirotul Azmi dan Fatikun adalah 8 bulan, Sani Ariyanto, ST, M.Si. 12 bulan, sedangkan Bachtiar Hastiarto dan Helmy Nur Adiansyah, S.E. selama 4 Bulan. Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 mendapat gaji dari anggaran APBD Kabupaten cilacap sebesar Rp 2.500.000,- untuk ketua dan Rp 2.200.000,- untuk anggota Panitia Pengawas.

C. Peristiwa Menarik Pengawasan Pilkada Tahun 2012

Pada tengah malam menjelang pemungutan suara, sekitar pukul 03.00 WIB kantor Panwaslu Kabupaten Cilacap didatangi anggota Panitia Pengawas Kecamatan dari kecamatan Bantarsari bersama anggota Polsek Bantarsari, mereka membawa tersangka dugaan pelaku tindak pidana politik uang beserta barang bukti stiker dan uang tunai pecahan Rp 10.000,- sejumlah Rp 214.000.000,- Meskipun kasus tersebut sudah diserahkan ke Panwaslu namun pihak terlapor justru melakukan intimidasi kepada ketua panwaslu untuk mengembalikan barang bukti tersebut pada malam itu juga, permintaan pihak terlapor ditolak dan kasus tersebut tetap diproses lebih lanjut.

Penanganan kasus ini diawali dengan undangan klarifikasi kepada terlapor dan para saksi,

namun meskipun telah diundang 3 kali terlapor tidak pernah mau hadir, Panwaslu Kabupaten Cilacap hanya bisa melakukan klarifikasi kepada para saksi yaitu pihak-pihak yang mengetahui langsung peristiwa tersebut. Setelah para saksi di klarifikasi Panwaslu menyerahkan berkas dan barang bukti berupa uang pecahan Rp10.000,- sejumlah Rp 214.000.000,- dan stiker ke Polres Cilacap.

Penyerahan berkas ini dimaksudkan untuk memastikan kelanjutan penanganan kasus dugaan tindak pidana politik uang yang dilakukan oleh terlapor, Jika berkas diterima maka kasus dugaan politik uang tersebut berlanjut ke tahap berikutnya, namun jika tidak memenuhi unsur dan ditolak maka kasus dugaan politik uang tersebut akan dihentikan, sehingga barang bukti berupa uang dan stiker tersebut akan dikembalikan kepada terlapor.

Polres Cilacap tidak mau menerima penyerahan berkas dan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 214.000.000,- dan stiker dugaan tindak pidana politik dari Panwaslu kabupaten Cilacap, karena berkas perkara tidak diterima maka Panwaslu Kabupaten Cilacap meminta surat penolakan, namun Polres Cilacap juga tidak mau memberikan surat penolakan tersebut.

Selanjutnya demi alasan keamanan Panwaslu juga menitipkan barang bukti berupa uang Rp 214.000.000,- namun permintaan tersebut juga ditolak dan disarankan untuk disimpan di kantor Panwaslu saja dengan alasan di kantor Panwaslu juga ada anggota polisi yang berjaga. Untuk beberapa saat barang bukti berupa uang sejumlah Rp 214.000.000,- tersimpan di kantor Panwaslu

Kabupaten Cilacap sampai akhirnya diketahui hilang diambil oleh pencuri.

Alih-alih menindaklanjuti proses penanganan dugaan politik uang yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Cilacap, Polres Cilacap atas dasar laporan terlapor justru menetapkan 3 anggota Panwaslu Cilacap sebagai tersangka tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan (awal proses penyidikan disangkakan dengan tindak pidana kejahatan dalam jabatan), dan sampai tahun 2022 ini penetapan tersangka kepada 3 anggota Panwaslu Kabupaten Cilacap ini belum ada tindak lanjutnya.³¹

D. Profil Anggota Panwas Kabupaten Cilacap

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, Panitia Pengawas Kabupaten Cilacap dijabat oleh 5 orang anggota, 2 orang anggota diantaranya adalah Panitia Pengawas Pemilihan Pengganti Antar Waktu. Berikut Profil Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Tahun 2012:

1. Tadzkirotul Azmi S.Ag., M.Sos. (Divisi SDM)



Tadzkirotul Azmi lahir di Cilacap pada Tanggal 8 Juni Tahun 2071, menempuh pendidikan dasar di MI, SMP dan SMA Ya Bakii Kesugihan Cilacap, selanjutnya menempuh Pendidikan Tinggi Strata 1 di Institut Agama Islam Imam Ghozali

³¹ Wawancara dengan Hastiarto, Bachtiar, tanggal 10 Mei 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

Kesugihan Cilacap dan Strata 2 di Universitas Islam Negeri SAIZU Purwokerto.

Bidang pekerjaan, Tadzkirotul Azmi mengawali sebagai Divisi Perdagangan Kp. Ya Bakii Kesugihan Cilacap, Panwaslu Kabupaten Cilacap pada Pemilu Legislatif Tahun 2004, Panwaslu Kabupaten Cilacap pada Pemilu Legislatif Tahun 2009, Panwaslu Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 dan Panwaslu Kabupaten Cilacap pada Pemilu Legislatif tahun 2014.

Beberapa organisasi yang pernah diikuti Tadzkirotul Azmi diantaranya : Ketua IPPNU Kabupaten Cilacap Tahun 1995, Pengurus DPD KNPI Kabupaten Cilacap, Ketua Forum Perempuan Peduli Air Bersih Kabupaten Cilacap, Sekretaris Fatayat Kabupaten Cilacap, Pengurus Karang Taruna Kabupaten Cilacap, dan Pengurus LKKNU Kabupaten Cilacap.

Tadzkirotul Azmi dikaruniai 3 orang anak, saat ini menjalani profesi sebagai Tenaga Pengajar Tetap di Perpustakaan Universitas Nahdlatul Ulama Imam Ghozali Kesugihan Cilacap, dan Aktif di berbagai organisasi Keagamaan di bawah naungan Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap.³²

³² Wawancara dengan Tadzkirotul Azmi, tanggal 10 April 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

2. Muhammad Fatikhun, S.Ag., M.H.



Fatikhun lahir di Cilacap Tanggal 6 Januari 1974 Muhammad Fatikhun adalah dosen di Institut Agama Islam Imam AL Ghozali (IAIIG) Kabupaten Cilacap sejak Tahun 2005, saat menjadi mahasiswa sosok ini aktif di banyak organisasi kemahasiswaan di kampusnya yaitu IAIN Walisongo Semarang. Pria yang menamatkan S1 pada Tahun 1999 di Fakultas Syari'ah, kini tinggal di Jalan Abdul Fatah No 65 Pahonjean Majenang Cilacap.

Pada saat mendaftar panwaslu 2004 baginya merupakan pengalaman pertama kali bersentuhan dengan dunia penyelenggaraan pemilu. Pada Panwaslu 2004 Fatikhun menjabat sebagai wakil ketua dan ini merupakan pengalaman yang berharga untuk mengetahui dinamika politik di daerah Cilacap.

Semasa menjadi mahasiswa bahkan selepas wisuda, Ia aktif di Pemantau Pemilu sejak 1999, seperti Jaringan Pemantau Pemilu untuk Rakyat (JPPR), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), dan Juga Forum Rektor untuk demokrasi berkeadilan. Fatikhun lahir di Desa Karangjati Kecamatan Sampang Cilacap pada 6 Januari 1975, mempunyai hobi membaca dan tilawah, dengan motto "hidup akan lebih bermakna dengan cara terus berkarya". Karya tulisan dan Opini Fatikhun

pernah diterbitkan di media dan beberapa hasil penelitian di jurnal.³³

3. Sani Ariyanto, S.T., M.Si. (Divisi Pengawasan)



Sani Ariyanto lahir di Cilacap Tanggal 3 Mei 1976, Pria penghobi menulis dan organisasi ini menempuh pendidikan formal di SD Donan 5 Cilacap, SMP Negeri 2 Cilacap, SMA Negeri 3 Cilacap, Program Strata 1 Fakultas Teknik Univer-

sitas Muhammadiyah Malang, dan Program Strata 2 Kebijakan Publik UNISRI Solo, lulus dengan Predikat *Cumlaude*.

Beberapa Organisasi yang pernah diikuti Sani sejak masa kuliah hingga saat ini diantaranya adalah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Cilacap, Dewan Pendidikan Kabupaten Cilacap, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) Kabupaten Cilacap dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Cilacap.

Kiprah Sani di kepemiluan diawali sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Cilacap Tengah Tahun 2004, Panitia Pengawas Kabupaten Cilacap pada Pemilihan

³³ Wawancara dengan Muhammad Fatikhun, tanggal 10 April 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, Panitia Pengawas Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 dan Panitia Pengawas Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

Atas prestasinya pada penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 Sani memperoleh penghargaan berupa **“The Best Achievement On The Year 2012”**, Panitia Pengawas Pemilihan Tahun 2012 dari Yayasan Citra Anak Bangsa Jakarta, setelah sebelumnya juga menerima penghargaan sebagai Juara 1 Pemuda Pelopor Kabupaten Cilacap. Saat ini Sani tinggal di Perum Rinenggo Asri D6 / 88 Gumilir Cilacap menjalani profesi sebagai CEO Journal Media.³⁴

4. **Bachtiar Hastiarto, S.H., M.H. (Divisi Penanganan Pelanggaran) Pengganti Antar Waktu (PAW)**



Bachtiar Hastiarto lahir di Cilacap Tanggal 24 Desember 1966, menempuh pendidikan di TK dan SD Pius Bersubsidi Cilacap, SMPN 1 Cilacap, SMAN 1 Cilacap, Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Pada saat kuliah di fakultas Hukum Ia bercita-

³⁴ Wawancara dengan Sani Arianto, tanggal 10 Mei 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah

cita menjadi Hakim dengan pertimbangan seandainya polisi dan jaksa masih bisa memanipulasikan hukum tapi jika hakim sebagai penjaga terakhir mempunyai integritas yang kuat maka keadilan masih bisa didapatkan, namun cita citanya menjadi hakim sampai saat ini belumlah tercapai.

Pada saat di sekolah dasar Bachtiar menyukai olahraga catur dan bulutangkis, olahraga catur yang dia geluti ini mengantarnya menjadi juara catur di tingkat Kabupaten Cilacap dan Karesidenan Banyumas, sehingga pada tahun 1977 dipercaya untuk berlomba di ajang porseni SD tingkat Provinsi Jawa Tengah di kota Magelang. Memasuki usia remaja Bachtiar aktif di kegiatan sosial kepemudaan dalam wadah Karang Taruna, dari aktivitas ini pada Tahun 1987 Ia dipercaya untuk menjadi anggota KPPS yang ditugaskan sebagai anggota Pantarlih.

Mengeluti dunia kepemiluan di tingkat paling dasar membuat mata hatinya terbuka, pemilu yang oleh pemerintah waktu itu diklaim sebagai pesta demokrasi yang ***luber*** dan jurdil ternyata justru penuh rekayasa, tipu daya dan kecurangan untuk kepentingan penguasa. Prihatin atas pengingkaran demokrasi yang dilakukan oleh penguasa secara terstruktur, sistematis dan masif, menjadikan nalurnya bangkit untuk memberikan penolakan dan perlawanan. Salah satunya dengan menuliskan berbagai rekayasa, tipu daya dan kecurangan pemilu dalam sebuah buku humor politik yang diberi judul “Lelucon Orde Baru”, buku yang diberi pengantar oleh budayawan Darmanto

Jatman tersebut diterbitkan oleh Tabloid Bangkit dari Surabaya.

Untuk menggugah daya kritis para mahasiswa terhadap kondisi bangsa dan negara, pada tanggal 31 Desember 1999 Bachtiar menyelenggarakan lomba humor politik **tingkat** nasional di gedung Patra Graha Pertamina Cilacap. Adapun dewan Juri pada lomba humor politik tersebut adalah Darmanto Jatman (budayawan UNDIP Semarang) sebagai ketua, Yami Wahyono (redaksi Tabloid Politik Bangkit, Surabaya) sebagai anggota, dan Satrio Saptohadi SH (dosen Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto) sebagai anggota.

Lomba Humor Politik dipilih sebagai sarana untuk mengkritik pemerintah karena kritik melalui humor dirasakan lebih santun sekaligus menghibur bagi masyarakat maupun bagi pihak yang dikritik, sehingga harapan pihak yang dikritik dengan kesadaran sendiri mau memperbaiki kesalahannya.

Beberapa organisasi dan profesi yang pernah dijalani Bachtiar sejak masa remaja hingga saat ini diantaranya, Karang Taruna, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Forum Lintas Pelaku (FLP) pemantau program jaring pengaman sosial, PT Berca **Indonesia** pada pengerjaan *debottlenecking* proyek di Pertamina RU 4 Cilacap, Wartawan Cilacap TV, Wartawan Banyumas TV, Panitia Pengawas Kabupaten Cilacap dan Bawaslu Kabupaten Cilacap.

Sementara itu untuk aktifitas kepemiluan Bachtiar sejak Tahun 1987 hingga saat ini adalah, anggota KPPS pada tahun 1987, Panitia

Pengawas Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, Panitia Pengawas Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, Panitia Pengawas Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Umum Tahun 2014, Panitia Pengawas Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017 dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Cilacap dari Tahun 2018 hingga sekarang.³⁵

5. Helmy Nur Adiansyah, S.E. (Divisi Pengawasan)



Helmy Nur Adiansyah Lahir di Malang Provinsi Jawa Timur pada Tanggal 17 Januari 1970, Helmy mengawali pendidikannya di Sekolah Dasar Muhammadiyah Sumberpucung Malang lulus tahun 1982, SMP Negeri Singosari Malang lulus Tahun 1985, SMA Islam Malang lulus Tahun 1988, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Satria Purwokerto Lulus tahun 2011.

Pengalaman organisasi Helmy sebelum menjadi anggota Panwaslu Kabupaten Cilacap adalah : Ketua 2 OSIS SMP Negeri Singosari

³⁵ Wawancara dengan Hastiarto, Bachtiar, tanggal 10 Mei 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

Malang, Pengurus bidang dakwah Islam SMA Islam Malang, Pengalaman Pekerjaan: Bendahara pengurus Cabang PRSSNI Banyumas periode 2008-2011, Badan Pengawas Keuangan Pengurus Daerah PRSSNI Jawa Tengah 2008-2011, Penyiar Reporter Radio KDS 8 Malang 1992-1994, Marketing Manager Radio Yasfi Cilacap 1994-1998, General manager Radio Yasfi Cilacap 1998-2008, Direktur Utama Radio Yasfi (YES FM) 2008-2012.

Adapun aktivitas Helmy bidang pengawasan pemilu yaitu, menjadi anggota Panitia Pengawas Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, Panitia Pengawas Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, Panitia Pengawas Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden Tahun 2014.

Helmy mempunyai seorang istri Risnawati Dwi Novita dan 2 orang anak yaitu Verly Aulia Rahmawati dan Atha'llah Calista Viansyah, saat ini tinggal di Perum Joyogrand blok A-11 Merjosari Lowokwaru Malang Jawa-Timur, menjalani profesi sebagai *Event Organizer, Advertising* "Orbit" Malang.³⁶

³⁶ Wawancara dengan Helmy Nur Adiyansyah, tanggal 10 Mei 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

Profil Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Cilacap
Tahun 2012

No	Nama Panwas	Tugas Divisi	Pendidikan	Organisasi
1	Tadzkirotul Azmi S.Ag.	Divisi Sumber Daya Manusia (SDM)	<ul style="list-style-type: none">• MI Ya Bakii• SMP Ya Bakii• SMA Ya Bakii Cilacap,• Institut Agama Islam Imam Ghozali Cilacap• Universitas Islam Negeri SAIZU Purwokerto	<ul style="list-style-type: none">• IPPNU Kabupaten Cilacap• DPD KNPI Kabupaten Cilacap,• Forum Perempuan Peduli Air Bersih Kabupaten Cilacap• Fatayat Kabupaten Cilacap,• Karang Taruna Kabupaten Cilacap,• Pengurus LKKNU Kabupaten Cilacap
2	Muhammad Fatikhun, S.Ag., M.H.	Divisi Penanganan Pelanggaran	<ul style="list-style-type: none">• IAIN Walisongo Semarang	<ul style="list-style-type: none">• PMII• Jaringan Pemantau Pemilu untuk Rakyat (JPPR)

3	Sani Ariyanto, ST. M.Si.	Divisi Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • SD Donan 5 Cilacap, • SMP Negeri 2 Cilacap, • SMA Negeri 3 Cilacap, Universitas Muhammadiyah Malang, • Program Strata 2 Kebijakan Publik UNISRI Solo 	<ul style="list-style-type: none"> • Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), • Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Cilacap, • Dewan Pendidikan Kabupaten Cilacap, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) Kabupaten Cilacap • dan Persatuan Pemuda Warga Indonesia (PPWI) Cilacap
4	Bachtiar Hastiarto, S.H.,M.H.	Divisi Penanganan Pelanggaran (PAW)	<ul style="list-style-type: none"> • TK dan SD Pius Bersubsidi Cilacap, • SMPN 1 Cilacap, 	<ul style="list-style-type: none"> • Karang Taruna, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI),

			<ul style="list-style-type: none"> • SMAN 1 Cilacap, • Fakultas Hukum • dan Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto 	<ul style="list-style-type: none"> • Forum Lintas Pelaku (FLP) • pemantau program jaring pengaman sosial, • PT Berca Indonesia pada pengerjaan debottlenecking proyek di Pertamina RU 4 Cilacap, • Wartawan Cilacap TV, • Wartawan Banyumas Tv, • Panwas Kabupaten Cilacap dan • Bawaslu Kabupaten Cilacap
5	Helmy Nur Adiansyah, S.E.	Divisi Pengawasan (PAW)	<ul style="list-style-type: none"> • SD Muhammadiyah Sumberpucung Malang 	<ul style="list-style-type: none"> • Bendahara pengurus Cabang PRSSNI Banyumas • Badan Pengawas

			<ul style="list-style-type: none">• SMP Negeri Singosari Malang• SMA Islam Malang• STIE Satria Purwokerto•	Keuangan Pengurus Daerah PRSSNI Jawa Tengah • Penyiar Reporter Radio KDS 8 Malang • Marketing Manager Radio Yasfi Cilacap • General manager Radio Yasfi Cilacap • Direktur Utama Radio Yasfi (YES FM) 2008-2012.
--	--	--	---	---

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2013

A. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013

Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2013 menggelar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di 35 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah, salah satunya adalah Kabupaten Cilacap. Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 dimulai sejak bulan Oktober 2012 dan untuk pemungutan suara diselenggarakan pada Tanggal 26 Mei Tahun 2013.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 diikuti oleh 3 Pasangan calon yaitu Pasangan nomor urut 1 Drs. H. Hadi Prabowo, M.M. - DR. H. Don Murdono, S.H., M.Si. yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Pasangan nomor urut 2 H. Bibit Waluyo – Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si. diusung oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional, Pasangan nomor urut 3 H. Ganjar Pranowo, S.H. – Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si. diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

**Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
serta Partai Pengusung Pilkada Jawa Tengah 2013**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung
1	Drs. H. Hadi Prabowo, M.M, - DR. H. Don. Murdono, S.H., M.Si.	<ul style="list-style-type: none">• Partai Keadilan Sejahtera• Partai Gerindra• Partai Persatuan Pembangunan• Partai Kebangkitan Bangsa• Partai Hati Nurani Rakyat• partai Kebangkitan Nasional Ulama
2	H. Bibit Waluyo – Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si.	<ul style="list-style-type: none">• Partai Demokrat• Partai Golkar• Partai Amanat Nasional
3	Ganjar Pranowo. S.H. – Drs. H Heru Sudjatmoko M.Si.	<ul style="list-style-type: none">• Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 berjumlah **1.485.599** dengan jumlah laki-laki **740.911** jumlah perempuan **744.688**

**Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur Tahun 2013**

Nama Daerah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kabupaten Cilacap	740.911	744.688	1.485.599

Adapun Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Jawa Tengah Tahun 2013 berjumlah 27.385.985. dengan perincian laki-laki 13.611.320 dan Perempuan 13.774.665 dengan jumlah TPS sebanyak 61.951. perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Kabupaten Cilacap: Pasangan nomor urut 1 Drs. H. Hadi Prabowo, M.M, dan DR. H. Don Murdono, S.H., M.Si. memperoleh 178.180 suara, pasangan nomor urut 2 H. Bibit Waluyo – Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si. memperoleh 323.240 suara, dan pasangan nomor urut 3 H. Ganjar Pranowo, S.H. – Drs. H.Heru Sudjarmoko, M.Si. memperoleh 261.361 suara.

Perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di tingkat Provinsi Jawa Tengah : Pasangan nomor urut 1 Drs. H. Hadi Prabowo, M.M, dan DR. H. Don Murdono, S.H., M.Si. memperoleh 2.982.751 atau 20.92% suara, pasangan nomor urut 2 H. Bibit Waluyo – Prof.Dr.H.Sudijono Sastroatmodjo, M.Si. memperoleh 4.314.813 atau 30.26% suara, pasangan nomor urut 3 H. Ganjar Pranowo, S.H. – Drs. H Heru Sudjarmoko, M.Si. memperoleh 6.962.417 atau 48.82% suara.

**Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur Jawa Tengah**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Drs. H. Hadi Prabowo, M.M. dan DR. H. Don. Murdono, S.H.	2.982.751	20.92%
2	H. Bibit Waluyo – Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si.	4.314.813	30.26%
3	H. Ganjar Pranowo, S.H. – Drs. H Heru Sudjatmoko, M.Si.	6.962.417	48.82%

Gubernur Jawa Tengah terpilih adalah Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko, pada Hari Jumat Tanggal 23 Agustus 2013 dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di lantai IV-V Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah Semarang.

B. Profil Panwaslu Kabupaten Cilacap Tahun 2013

Panwaslu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Kabupaten Cilacap dibentuk mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Untuk membentuk Panwaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah membentuk tim seleksi calon anggota Panwaslu

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan susunan sebagai berikut:

**Tim Seleksi Calon Anggota Panwaslu
Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah**

Nomor	Nama Timsel	Perwakilan	Jabatan
1	Ir. Sriyanto Saputro, M.M.	Profesional	Ketua Tim Seleksi
2	Edi Pranoto, SH.,M.Hum.	Akademisi	Sekretaris Tim Seleksi
3	Dra. Fitriyah, M.A.	Akademisi	Anggota
4	Hasyim Asy'ari, SH.,MH., Ph.D.	Akademisi	Anggota
5	Dr. Abu Rokhmad, M.Ag.	Akademisi	Anggota

Seleksi pembentukan Panwas Pemilihan Gubernur Tahun 2013 di Kabupaten Cilacap diikuti oleh 6 Peserta yaitu Sani Ariyanto, S.T., M.Si, Bachtiar Hastiarto, Helmy Nur Adiansyah. S.E. Sumarsono Seger, SH., Tadzkiroh, S.Ag. dan Slamet Saefudin, tiga nama pertama pada saat itu masih menjabat pengawas pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012. Setelah melalui seleksi tertulis di Kota Pekalongan dan tes wawancara di Kota Salatiga peserta seleksi yang terpilih menjadi anggota Panwas pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 adalah Sani Ariyanto, S.T.,

M.Si. Bachtiar Hastiarto, S.H., M.H. dan Helmi Nur Adiansyah S.E.³⁷

Anggota Panwas Kabupaten Cilacap terpilih dilantik bersama 105 anggota Panwas dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 12 November 2012 Hotel Quest Kota Semarang oleh ketua Panwaslu Jawa Tengah Abhan Misbah, S.H., dan dilanjutkan pembekalan hingga tanggal 14 November 2012. Pada Tahun 2013 Sani Ariyanto, S.T., M.Si. mengundurkan diri dan digantikan oleh Tadzkiroh, S.Ag. adapun alasan Sani mengundurkan diri sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Cilacap dikarenakan menjadi calon anggota legislatif Kabupaten Cilacap dari Partai Amanat Nasional.

Kantor Panwas Pemilu Gubernur Tahun 2013 beralamat di Jl.Jenderal Sudirman No 200 Cilacap yang sebelumnya juga digunakan sebagai kantor Panwas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012. Sarana dan prasarana untuk panwas pada saat itu meskipun tidak mewah namun terbilang cukup, dengan gedung kantor berukuran sekitar 15 X 20 meter dan halaman sekitar 8 x 20 meter, dilengkapi dengan peralatan dan beberapa ruangan juga dilengkapi pendingin ruangan, dua kendaraan roda empat dan satu sepeda motor, anggaran Panwas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Cilacap dialokasikan sejumlah 7 miliar rupiah.

³⁷ Wawancara dengan Hastiarto, Bachtiar, tanggal 10 Mei 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

Hubungan Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa-Tengah Tahun 2013 dengan mitra lain seperti KPU, Polres, Kejaksaan Negeri, Pemerintah Kabupaten Cilacap, Ormas, LSM Media dan Tokoh Masyarakat secara umum berlangsung harmonis bersifat timbal balik, saling membantu dan saling berbagi informasi.³⁸

Untuk menunjang kinerja pengawasan, Panwaslu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Kabupaten Cilacap difasilitasi tenaga kesekretariatan yaitu Agus Mubarok, S.Sos., M.M. yang menjadi karyawan Kesbangpol Kabupaten Cilacap sebagai sekretaris dan didukung 4 staf PNS serta dibantu 4 staf non PNS. Panwaslu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Kabupaten Cilacap juga memiliki anggota Panwascam sejumlah 74 orang dan Panitia Pengawas Lapangan sejumlah 852 berdasarkan data PPL 2014.

Masa jabatan anggota Panwaslu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Kabupaten Cilacap, untuk Bachtiar Hastiarto dan Helmy Nur Adiansyah, S.E. selama 12 bulan dan Sani Ariyanto, S.T.,M.Si. Anggota Panwaslu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Kabupaten Cilacap mendapat Honorarium dari anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 2.700.000,- untuk ketua dan Rp 2.500.000,- untuk anggota.

³⁸ Wawancara dengan Helmy Nur Adiansyah, tanggal 10 Mei 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

C. Peristiwa Menarik Pilkada 2013

Pilkada Tahun 2013 merupakan Pagelaran kontestasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah berjalan dengan kondusif, hal tersebut berdasarkan data dari Bawaslu Kabupaten Cilacap bahwasanya pada Tahun tersebut tidak ada laporan terkait pelanggaran pemilu, baik pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi maupun pelanggaran Kode Etik.

Keberhasilan tersebut diperoleh dari beberapa faktor, **Pertama**, Pengawasan dan pencegahan yang dilakukan aparat Bawaslu cilacap berjalan dengan maksimal, sehingga dapat mereduksi pelanggaran yang terjadi, **Kedua**, kesadaran dari peserta Pilkada yang mengedepankan kondusifitas dalam berkontestasi, hal tersebut terbukti dengan tidak adanya gesekan sosial yang diakibatkan dari residu politik di Pilkada 2013.³⁹

D. Profil Anggota Panwas Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, Panwaslu Kabupaten Cilacap dijabat oleh 4 orang anggota (satu diantaranya anggota antar waktu) yaitu:

³⁹ Wawancara dengan Hastiarto, Bachtiar, tanggal 10 Mei 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

1. Bachtiar Hastiarto, S.H., M.H. (Divisi Penanganan Pelanggaran)



Bachtiar Hastiarto lahir di Cilacap Tanggal 24 Desember 1966, menempuh pendidikan di TK dan SD Pius Bersubsidi Cilacap, SMPN 1 Cilacap, SMAN 1 Cilacap, Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas

Jenderal Soedirman Purwokerto. Pada saat kuliah di Fakultas Hukum Ia bercita-cita menjadi Hakim dengan pertimbangan seandainya polisi dan jaksa masih bisa memanipulasikan hukum tapi jika hakim sebagai penjaga terakhir mempunyai integritas yang kuat maka keadilan masih bisa didapatkan, namun cita-citanya menjadi hakim sampai saat ini belumlah tercapai.

Pada saat duduk di Sekolah Dasar Bachtiar menyukai olahraga catur dan bulutangkis, Olahraga catur yang dia geluti ini mengantarnya menjadi juara catur di tingkat Kabupaten Cilacap dan Karesidenan Banyumas, sehingga pada tahun 1977 dipercaya untuk berlomba di ajang porseni SD tingkat Propinsi Jawa Tengan di kota Magelang. Memasuki usia remaja Bachtiar aktif di kegiatan sosial kepemudaan dalam wadah Karang Taruna, dari aktivitas ini pada tahun 1987 Ia dipercaya untuk menjadi anggota KPPS yang ditugaskan sebagai anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).

Menggeluti dunia kepemiluan di tingkat paling dasar membuat mata hatinya terbuka, pemilu yang oleh pemerintah waktu itu diklaim sebagai pesta demokrasi yang luber dan jurdil ternyata justru penuh rekayasa, tipu daya dan kecurangan untuk kepentingan penguasa. Prihatin atas pengingkaran demokrasi yang dilakukan oleh penguasa secara terstruktur, sistematis dan masif, menjadikan nalurnya bangkit untuk memberikan penolakan dan perlawanan.

Salah satunya dengan menuliskan berbagai rekayasa, tipu daya dan kecurangan pemilu dalam sebuah buku humor politik yang diberi judul “Lelucon Orde Baru”, buku yang diberi pengantar oleh budayawan Darmanto Jatman tersebut diterbitkan oleh Tabloid Bangkit dari Surabaya

Beberapa organisasi / profesi yang pernah dijalani Bachtiar sejak masa remaja hingga saat ini diantaranya, Karang Taruna, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Forum Lintas Pelaku (FLP) pemantau program jaring pengaman sosial, PT Berca Indonesia pada pengerjaan debottlenecking proyek di Pertamina RU 4 Cilacap, Wartawan Cilacap TV, Wartawan Banyumas TV, Panwas Kabupaten Cilacap dan Bawaslu Kabupaten Cilacap

Sementara itu untuk aktifitas kepemiluan Bachtiar sejak tahun 1987 hingga saat ini adalah, anggota KPPS pada tahun 1987, Panwas Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012, Panwas Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2013,

Panwas Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Umum tahun 2014, Panwas Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2017 dan Bawaslu Kabupaten Cilacap dari tahun 2018 hingga sekarang.

2. Helmy Nur Adiansyah, S.E. (Divisi Pengawasan)



Helmy Nur Adiansyah Lahir di Malang Propinsi Jawa Timur pada Tanggal 17 Januari 1970, Helmy mengawali pendidikannya di Sekolah Dasar Muhammadiyah Sumberpucung Malang lulus tahun 1982, SMP Negeri

Singosari Malang lulus Tahun 1985, SMA Islam Malang lulus Tahun 1988, STIE Satria Purwokerto lulus tahun 2011.

Pengalaman organisasi Helmy sebelum menjadi anggota Panwaslu Kabupaten Cilacap adalah: Ketua 2 OSIS SMP Negeri Singosari Malang, Pengurus bidang dakwah Islam SMA Islam Malang, Pengalaman Pekerjaan: Bendahara pengurus Cabang PRSSNI Banyumas periode 2008-2011, Badan Pengawas Keuangan Pengurus Daerah PRSSNI Jawa Tengah 2008-2011, Penyiar Reporter Radio KDS 8 Malang 1992-1994, Marketing Manager Radio Yasfi Cilacap 1994-1998, General manager Radio Yasfi Cilacap 1998-2008, Direktur Utama Radio Yasfi (YES FM) 2008-2012.

Adapun aktivitas Helmy dibidang pengawasan pemilu yaitu, menjadi anggota Panwas Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, Panwas Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, Panwas Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden Tahun 2014.

Helmy mempunyai seorang istri Risnawati Dwi Novita dan 2 orang anak yaitu Verly Aulia Rahmawati dan Atha'illah Calista Viansyah, saat ini tinggal di Perum Joyogrand blok A-11 Merjosari Lowokwaru Malang Jawa-Timur, menjalani profesi sebagai Event Organizer, Advertising "Orbit" Malang.

3. Sani Ariyanto, ST. M.Si. (Divisi SDM)



Sani Ariyanto lahir di Cilacap pada Tanggal 3 Mei 1976, Pria penghobi menulis dan organisasi ini menempuh pendidikan formal di SD Donan 5 Cilacap, SMP Negeri 2 Cilacap, SMA Negeri 3 Cilacap, Program Strata 1 Fakultas Teknik

Universitas Muhammadiyah Malang, dan Program Strata 2 Kebijakan Publik UNISRI Solo, lulus dengan Predikat *Cumlaude*.

Beberapa Organisasi yang pernah diikuti Sani sejak masa kuliah hingga saat ini diantaranya adalah, Ikatan Mahasiswa

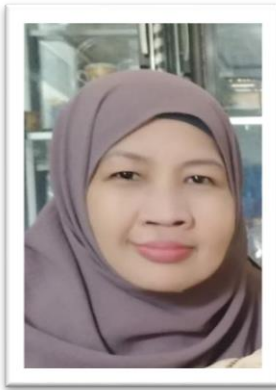
Muhammadiyah (IMM), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Cilacap, Dewan Pendidikan Kabupaten Cilacap, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) Kabupaten Cilacap dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Cilacap.

Kiprah Sani di kepemiluan diawali sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Cilacap Tengah Tahun 2004, Panwas Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, Panwas Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cilacap Tahun 2012 dan Panwas Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

Atas prestasinya pada penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 Sani memperoleh penghargaan berupa "*The Best Achievement On The Year 2012*", Panwaslukada Tahun 2012 dari Yayasan Citra Anak Bangsa Jakarta, setelah sebelumnya juga menerima penghargaan sebagai Juara 1 Pemuda Pelopor Kabupaten Cilacap. Saat ini Sani tinggal di Perum Rinenggo Asri D6 / 88 Gumilir Cilacap menjalani profesi sebagai CEO Journal Media.⁴⁰

⁴⁰ Wawancara dengan Sani Arianto, tanggal 10 Mei 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah

4. Tadzkirotul Azmi,S.Ag, M.Sos. (Divisi SDM) Antar Waktu



Tadzkiroh lahir di Cilacap pada Tanggal 8 Juni Tahun 2071, menempuh pendidikan dasar di MI, SMP dan SMA Ya Bakii Kesugihan Cilacap, selanjutnya menempuh pendidikan tinggi Strata 1 di Institut Agama Islam Imam Ghozali Kesugihan Cilacap dan Strata 2 di

Universitas Islam Negeri SAIZU Purwokerto.

Di Bidang pekerjaan, Tadzkiroh mengawali sebagai Divisi Perdagangan Kp. Ya Bakii Kesugihan Cilacap, Panwaslu Kabupaten Cilacap pada Pemilu Legislatif Tahun 2004, Panwaslu Kabupaten Cilacap pada Pemilu Legislatif Tahun 2009, Panwaslu Kabupaten Cilacap pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012 dan Panwaslu Kabupaten Cilacap pada Pemilu Legislatif tahun 2014.

Beberapa organisasi yang pernah diikuti Tadzkiroh diantaranya: Ketua IPPNU Kabupaten Cilacap Tahun 1995, Pengurus DPD KNPI Kabupaten Cilacap, Ketua Forum Perempuan Peduli Air Bersih Kabupaten Cilacap, Sekretaris Fatayat Kabupaten Cilacap, Pengurus Karang Taruna Kabupaten Cilacap, dan Pengurus LKKNU Kabupaten Cilacap.⁴¹

⁴¹ Wawancara dengan Tadzkirotul Azmi, tanggal 10 April 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

Tadzkirotul Azmi dikaruniai 3 orang anak, saat ini menjalani profesi sebagai Tenaga Pengajar Tetap di Perpustakaan Universitas Nahdlatul Ulama Imam Ghozali Kesugihan Cilacap, dan Aktif di pelbagai organisasi Keagamaan dibawah naungan nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap.

Profil Panwaslu Kabupaten Cilacap 2012

No	Nama Panwas	Tugas Divisi	Pendidikan	Organisasi
1	Tadzkirotul Azmi S.Ag	Divisi Sumber Daya Manusia (SDM)	<ul style="list-style-type: none"> • MI Ya Bakii • SMP Ya Bakii • SMA Ya Bakii Cilacap, • Institut Agama Islam Imam Ghozali Cilacap • Universitas Islam Negeri SAIZU Purwokerto 	<ul style="list-style-type: none"> • IPPNU Kabupaten Cilacap • DPD KNPI Kabupaten Cilacap, • Forum Perempuan Peduli Air Bersih Kabupaten Cilacap • Fatayat Kabupaten Cilacap, • Karang Taruna Kabupaten Cilacap, • Pengurus LKKNU Kabupaten Cilacap

2	Sani Ariyanto, ST. M.Si	Divisi Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • SD Donan 5 Cilacap, • SMP Negeri 2 Cilacap, • SMA Negeri 3 Cilacap, Universitas Muhammadiyah Malang, • Program Strata 2 Kebijakan Publik UNISRI Solo 	<ul style="list-style-type: none"> • Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), • Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Cilacap, • Dewan Pendidikan Kabupaten Cilacap, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) Kabupaten Cilacap • dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Cilacap
3	Bachtiar Hastiarto	Divisi Penanganan Pelanggaran (PAW)	<ul style="list-style-type: none"> • TK dan SD Pius Bersubsidi Cilacap, • SMPN 1 Cilacap, • SMAN 1 Cilacap, • Fakultas Hukum • dan Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal 	<ul style="list-style-type: none"> • Karang Taruna, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), • Forum Lintas Pelaku (FLP) • pemantau program jaring pengaman sosial, • PT Berca Indonesia pada pengerjaan

			Soedirman Purwokerto	debottlenecking proyek di Pertamina RU 4 Cilacap, <ul style="list-style-type: none"> • Wartawan Cilacap TV, • Wartawan Banyumas Tv, • Panwas Kabupaten Cilacap dan • Bawaslu Kabupaten Cilacap
4	Helmy Nur Adiansyah SE	Divisi Pengawasan (PAW)	<ul style="list-style-type: none"> • SD Muhammadiyah Sumberpucung Malang • SMP Negeri Singosari Malang • SMA Islam Malang • STIE Satria Purwokerto 	<ul style="list-style-type: none"> • Bendahara pengurus Cabang PRSSNI Banyumas • Badan Pengawas Keuangan Pengurus Daerah PRSSNI Jawa Tengah • Penyiar Reporter Radio KDS 8 Malang • Marketing Manager Radio Yasfi Cilacap • General manager Radio Yasfi Cilacap • Direktur Utama Radio Yasfi (YES FM) 2008-2012.

PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

A. Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014

1. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Pesta Demokrasi untuk memilih Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014. Pemilu Pilpres secara langsung ini merupakan pemilihan presiden secara langsung yang ketiga, menggantikan Presiden petahana Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak dapat mencalonkan diri kembali karena dalam undang-undang pemilu 2008 mengatur bahwa presiden terpilih tidak boleh 3 periode. Sejarah ditorehkan hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di DPR atau 25% memenangi suara populer dapat mencalonkan kandidatnya.⁴²

Pemilihan Umum ini diikuti oleh dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Prabowo Subianto, mantan Panglima Kostrad yang berpasangan dengan Hatta Rajasa, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2009-2014, serta Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009.

Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 31 Mei 2014 menetapkan dua pasang Presiden dan

⁴² Wawancara dengan Hastiarto, Bachtiar, tanggal 10 Mei 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

Wakil Presiden, serta melakukan pengundian nomor urut pada 1 Juni 2014. Pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto - Hatta Rajasa diusung oleh Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sosial, Partai Persatuan Pembangunan, dan partai Demokrat. Sedangkan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo - Jusuf Kalla diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, Partai Hanura dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Kabupaten Cilacap adalah 1.484.527 yang terdiri dari laki-laki 741.199 dan perempuan 743.328 dengan jumlah TPS sebanyak 3232 tersebar di 284 kelurahan dan desa. Sedangkan jumlah pemilih Khusus yang terdaftar di Kabupaten Cilacap adalah 508 yang terdiri dari 262 laki-laki, 246 perempuan, tersebar di 184 TPS, 59 desa/kelurahan dan 13 kecamatan.

Perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Cilacap : pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto - Hatta Rajasa 381.863 (39,58%) dan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo - Jusuf Kalla 585.252 (60,52%). Partisipasi warga Kabupaten Cilacap dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebesar 65% dengan rincian suara sah 61.137.646, tidak sah 51.005.832, tidak dipakai 12.728.913.

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla dilantik di Gedung DPR/MPR pada tanggal 20 Oktober 2014. Dengan dilantiknya presiden ke-7 sebagai tanda

berakhirnya masa bakti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

2. Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif Tahun 2014

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014 (biasa disingkat Pemilu Legislatif 2014) diselenggarakan pada 9 April 2014 untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten se-Indonesia periode 2014-2019.⁴³

Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar Partai politik yang mengikuti Pemilu tahun 2014 sebanyak 46 Partai pada tanggal 7 September 2014. Namun, setelah melalui proses verifikasi faktual partai politik, di tanggal 28 Oktober 2012 hanya ada 16 Partai yang lolos untuk dilakukan verifikasi faktual. Hasil dari verifikasi faktual, KPU menetapkan peserta pemilu tahun 2014 hanya ada 10 partai saja. Sedangkan beberapa partai politik yang dinyatakan tidak lolos, mengajukan gugatan kepada PTUN, dan hasilnya di tanggal 18 Maret 2013 Partai Bulan Bintang dinyatakan lolos, menyusul tanggal 25 Maret 2013 Partai Persatuan dan Keadilan Indonesia ditetapkan sebagai partai

⁴³ Wawancara dengan Helmy Nur Adiyansyah, tanggal 10 Mei 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

peserta pemilu 2014. Jadi total Partai dalam pesta demokrasi legislatif 2014 sebanyak 12. Berikut tabel partai dan nomor urut nya dalam pemilu 2014.

No	Nomor Urut Partai	Nama Partai
1	1	Partai Nasional Demokrasi
2	2	Partai Kebangkitan Bangsa
3	3	Partai Keadilan Sosial
4	4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5	5	Partai Golongan Karya
6	6	Partai Gerakan Indonesia Raya
7	7	Partai Demokrat
8	8	Partai Amanat Nasional
9	9	Partai Persatuan Pembangunan
10	10	Partai Hati Nurani Rakyat
11	11	Partai Bulan Bintang
12.	12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Daftar pemilih tetap dalam pemilu legislatif Tahun 2014 sebanyak 186.612.255 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki 93.439.610 dan perempuan 93.172.645 orang. DPT ini tersebar di 33 Provinsi, 497 Kabupaten Kota, 6980 Kecamatan, 81.034 Desa dan Kelurahan, serta 545.778 Tempat Pemungutan Suara di seluruh Indonesia.

Perolehan suara nasional dalam pemilu legislatif 2014, Partai Nasdem 8.402.812 (6,72%), Partai Kebangkitan Bangsa 11.298.957 (9,04%), Partai Keadilan Sejahtera 8.480.204 (6,79%), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 23.681.471(18,95%), Partai Golkar 18.432.312

(14,75%), Partai Gerindra 14.760.371 (11,81%), Partai Demokrat 12.728.913 (10,19%), Partai Amanat Nasional 9.481.621 ((7,59%), Partai Persatuan Pembangunan 8.157.488 (6,53%), Partai Hanura 6.579.498 (5,26%), Partai Bulan Bintang 1.825.750 (1,46%).⁴⁴

B. Profil Kelembagaan Panwas 2014

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 dan Pemilu legislatif 2014 dalam tatanan kesekretariatan tidak banyak memiliki perubahan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Dilihat dari komisioner yang menjabat merupakan perpanjangan dari komisioner Panwaskab pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013. Hal ini karena memang tahapan dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 beririsan.

Hal menarik yang terjadi pada pemilihan legislatif 2014 adalah kesulitan kesekretariatan untuk mencari ASN yang mau dijadikan sebagai Koordinator Sekretariat di masing masing kecamatan. Agus Mubarok, Korsek Panwas Kabupaten Cilacap kala itu mengatakan, beliau harus menjemput bola dengan cara menelpon satu persatu camat di 24 Kecamatan di Kabupaten Cilacap dan memastikan kesanggupannya untuk bergabung dengan Panwascam pemilu legislatif 2014.

Pengelolaan APBN pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Legislatif 2014 sebesar kurang

⁴⁴ Wawancara dengan Hastiarto, Bachtiar, tanggal 10 Mei 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

lebih 7 Milyar membutuhkan kefokusannya penyerapan anggaran. Apalagi menelisik peristiwa bersejarah di Kabupaten Cilacap pada tahun 2012 yang ditemukannya dugaan Politik Uang salah satu calon Bupati kala itu. Dengan kehati-hatian, menerapkan segala pos anggaran sesuai dengan alokasi nya, Agus Mubarak menerangkan kegiatan pemilu 2014 berlangsung dengan aman, kondusif dan sangat memuaskan. Bahkan ada salah satu peristiwa bersejarah penting yang terjadi di Kabupaten Cilacap sebagai suatu upaya meningkatkan jiwa forsa kepengawasan.

Kegiatan bertajuk Evaluasi dan Pembekalan bagi 852 anggota Pengawas Pemilu Lapangan Se Kabupaten Cilacap dilaksanakan pada hari Minggu 2 Februari 2014 hingga Senin 3 Februari 2014 di komplek Pusdik Kopassus Jalan Veteran Cilacap. Maksud dari kegiatan ini agar kekurangan dan kelemahan yang ada pada anggota pengawas pemilu lapangan dapat diperbaiki dan disempurnakan. Pembekalan yang bersifat komprehensif dari segi mental dan kedisiplinan maupun pengetahuan tentang perundang-undangan pemilu dan strategi pengawasan yang efektif.

Kegiatan ini diisi oleh Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Abhan Misbah, Anggota Reskrim Polres Cilacap, Bambang Listiono SH dan Komisioner Panwaslu Kabupaten Cilacap. Harapannya dari kegiatan yang dihadiri oleh Bupati Cilacap H. Totto Suwanto Pamuji, Muspida dan pejabat terkait lainnya ini adalah Pengawas Pemilu dari seluruh jajaran paham dan mengerti dalam menjalankan tugas dan fungsi kerja sebagai Pengawas Pemilu.



Kegiatan Evaluasi dan Pembekalan anggota Pengawas Pemilu Lapangan Se-Kabupaten Cilacap dilaksanakan pada hari Senin 3 Februari 2014 di komplek Pusdik Kopassus Jalan Veteran Cilacap.



Kegiatan Evaluasi dan Pembekalan anggota Pengawas Pemilu Lapangan Se-Kabupaten Cilacap dilaksanakan pada hari Minggu 2 Februari 2014

C. Peristiwa Penting Pengawasan Pemilu 2014

1. Laporan Ijazah Palsu

Pada Saat tahapan pendaftaran calon anggota Legislatif, Bachtiar Hastiarto menceritakan Panwaslu Kabupaten Cilacap menerima laporan dari masyarakat bahwa salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada saat mendaftar sebagai calon anggota legislatif menggunakan ijazah palsu. Dalam laporan, pelapor mengatakan bahwa ijazah yang digunakan oleh terlapor sebagai syarat mendaftar calon anggota legislatif adalah ijazah ujian persamaan, namun yang melakukan ujian persamaan adalah bukan terlapor namun orang lain (joki).

Menindaklanjuti laporan ini Panwaslu Kabupaten Cilacap berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Cilacap meminta foto copy ijazah yang digunakan oleh terlapor, atas permintaan ini KPU memberikan izin kepada Panwaslu untuk memfoto ijazah tersebut, yaitu ijazah ujian persamaan yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.

Berbekal informasi awal ini Panwaslu Kabupaten Cilacap melakukan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur dan memperoleh jawaban bahwa Ijazah terlapor adalah asli, dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur melalui proses ujian persamaan.

Permasalahan ijazah palsu yang dituduhkan kepada terlapor menurutnya juga sudah ada putusan Pengadilan Negeri Cianjur

yang menyatakan bahwa ijazah terlapor adalah asli.⁴⁵

Informasi tentang adanya putusan Pengadilan Negeri Cianjur yang menyatakan bahwa ijazah terlapor adalah asli, ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Cilacap yang diwakili oleh Bachtiar Hastiarto, Helmy Nur Adiansyah, Agus Mubarok dan Ali Darmawan dengan cara mendatangi Pengadilan Negeri Cianjur untuk meminta salinan putusan yang menyatakan bahwa ijazah terlapor adalah asli dan putusan terhadap pelaku yang menjadi joki ujian persamaan untuk menggantikan terlapor. Permohonan Panwaslu Kabupaten Cilacap disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur namun karena arsip putusan yang dicari sudah lama dan banyaknya arsip yang ada maka kami rombongan dari Panwaslu Kabupaten Cilacap dipersilahkan untuk menunggu.

Agus Mubarok yang saat itu menjabat Sekretaris Panwas, menceritakan pada saat menunggu dan sambil beristirahat Ia ditelpon oleh terlapor yang menanyakan saat ini sedang dimana dan untuk kepentingan apa, atas pertanyaan ini Agus menjawab bahwa saat ini sedang berada di Pengadilan Negeri Cianjur mengantar komisioner untuk mendapatkan salinan putusan Pengadilan terkait ijazah terlapor, mengetahui bahwa Panwaslu Kabupaten Cilacap sedang berada di Pengadilan Negeri Cianjur, Agus kembali ditanya pergi ke

⁴⁵ Wawancara dengan Hastiarto, Bachtiar, tanggal 10 Mei 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

Cianjur menggunakan uang dari mana, Agus hanya menjawab singkat menggunakan anggaran wilayah terjauh yaitu Kecamatan Dayeuhluhur, lalu terlapor kembali menimpali jika begitu berarti kamu korupsi, korupsi waktu.

Agus merasa telepon yang dilakukan oleh terlapor bermaksud untuk menakut nakuti dirinya sehingga Ia menjelaskan kepada penelpon bahwa jika laporan tersebut tidak ditindaklanjuti maka Panwaslu Kabupaten Cilacap akan dilaporkan ke DKPP dan ini juga akan berimbas pada dirinya sebagai Sekretaris Panwaslu.

Peristiwa di Pengadilan Negeri Cianjur juga diceritakan oleh Helmy Nur Ardiansyah, menurutnya bahwa selama masa menunggu salinan putusan, suasana mencekam sempat terjadi terutama setelah Agus menerima telepon dari terlapor dan mengatakan terlapor sudah mengetahui keberadaan mereka di Pengadilan Negeri Cianjur sehingga kemungkinan buruk bisa saja terjadi oleh karena itu Agus berinisiatif agar rombongan dari Panwaslu Cilacap menempati tempat duduk berjauhan dan berpencar.

Setelah menunggu sekitar 3 jam, petugas Pengadilan Negeri Cianjur memberikan salinan putusan terkait Ijazah terlapor dan Joki yang menggantikan terlapor mengikuti ujian, salinan putusan pengadilan ini segera dibawa ke mobil dan rombongan bergegas pulang ke Cilacap.

Pulang dari Pengadilan Negeri Cianjur menjelang masuk Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap Helmy yang saat itu menyetir mobil merasakan suasana mencekam, menurut

Helmy saat menjelang memasuki Kecamatan Karangpucung, Agus menginformasikan ada mobil yang sepertinya membuntuti mobil yang dikendarainya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Agus berinisiatif memecah tim Panwaslu yang berjumlah 4 orang menjadi dua kelompok.

Agus dan Ali memutuskan untuk turun di sekitar terminal Karang Pucung, Helmy dan Bachtiar meneruskan perjalanan ke Cilacap. Namun sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke Cilacap Bachtiar mengambil alih kemudi dengan alasan jika sesuatu hal buruk terjadi maka Ia lebih siap untuk menghadapinya, alhamdulillah meskipun berpencar semua personil sampai ke Cilacap dengan selamat.

Langkah lebih lanjut menurut Bachtiar, setelah mendapat dua putusan Pengadilan Negeri Cianjur, Panwaslu (Bachtiar dan Helmy) membawa persoalan ini ke Bawaslu Republik Indonesia untuk melakukan konsultasi. Sesampai di Kantor Bawaslu ternyata pimpinan Bawaslu Republik Indonesia sedang tidak berada di kantor karena sedang mengikuti rakor di sebuah hotel, oleh karena itu Bachtiar dan Helmy menuju ke hotel tempat rakor tersebut dan berkesempatan menemui Anggota Bawaslu RI Nasruloh yang saat itu sedang berdiri berdua dengan ketua Bawaslu Jawa Tengah Abhan.

Kepada Nasruloh Bachtiar menyampaikan maksud kedatangannya ke Jakarta untuk melakukan konsultasi terkait laporan masyarakat tentang penggunaan ijazah palsu oleh salah seorang calon anggota legislatif di Cilacap, dan beberapa langkah yang sudah

dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Cilacap, salah satu diantaranya adalah salinan putusan Pengadilan Negeri Cianjur. Alih alih memberikan bimbingan atau petunjuk Nasruloh justru marah dan terkesan menakutkan dengan suara keras mengatakan, nanti kalo ada resiko siapa yang akan menanggung, mendapat respon yang diluar ekspektasi nya Bachtiar dengan nada keras kemudian menjawab, siap menanggung resiko apapun karena itu adalah bagian dari tanggung jawabnya selaku anggota panwaslu.

Selain berkonsultasi dengan Bawaslu RI, Panwaslu Kabupaten Cilacap juga membuat surat yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta yang isi suratnya menyampaikan fakta bahwa Ijazah ujian persamaan terlapor dilakukan oleh seorang joki sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Cianjur, oleh karena itu terlapor tidak berhak atas ijazah ujian persamaan tersebut sehingga ijazah tersebut haruslah dicabut/dibatalkan. Namun berbagai upaya tersebut belumlah membuahkan hasil, bahkan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017 terlapor juga mendaftar sebagai Calon Bupati Cilacap.⁴⁶

⁴⁶ Wawancara dengan Hastiarto, Bachtiar, tanggal 10 Mei 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

2. Polisi Berseragam Partai

Kampanye terbuka Calon Presiden dari Partai Gerindra di Lapangan Krida Nusantara Cilacap menurut Bachtiar, menyisakan persoalan tentang netralitas PNS/TNI/POLRI, pasalnya usai kampanye yang menghadirkan Prabowo Subianto, calon presiden yang juga sebagai juru kampanye nasional, Panwaslu Cilacap mendapatkan rekaman Video yang memperlihatkan 2 orang anggota Polres Cilacap menggunakan kaos seragam partai Gerindra. Video ini didapatkan dari salah seorang wartawan televisi yang pada saat itu meliputi kegiatan kampanye terbuka calon presiden dari Partai Gerindra tersebut

Terkait penggunaan kaos partai oleh dua orang anggota polisi, menurut anggota Panwascam Kecamatan Cilacap Utara hal tersebut juga sudah diingatkan tetapi peringatan tersebut tidak diindahkan. Mendasari video ini menurut Bachtiar, Panwaslu langsung melakukan koordinasi dengan anggota Gakkumdu dari unsur kepolisian namun tidak mendapat jawaban yang rasional, atas alasan mengapa dalam melaksanakan tugas 2 orang anggota polisi tersebut menggunakan kaos partai yang saat itu sedang melaksanakan kampanye.

Bersamaan dengan temuan peristiwa tersebut Panwaslu Kabupaten Cilacap menurut Helmy ada agenda yang sudah terjadwal untuk melakukan perjalanan dinas ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sehingga sekaligus mengkolaborasi temuan video yang memperlihatkan 2 orang anggota polisi menggunakan kaos partai.

Atas temuan ini Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Juga sudah menyampaikan ke Polda Jawa Tengah tetapi tidak diketahui bagaimana tindak lanjutnya. Setelah melalui berbagai proses yang berliku akhirnya atas temuan video yang memperlihatkan 2 anggota polisi memakai seragam partai ini Panwaslu Kabupaten Cilacap memberikan surat rekomendasi kepada Kapolres Cilacap agar hal tersebut tidak terulang kembali.⁴⁷

3. Kualitas Surat Suara

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, kualitas surat suara yang terlalu tipis membuat mudah rusak saat digunakan. Selain surat suara yang tipis, kotak suara yang ringan juga rawan akan air. Tadzkiroh menerangkan ada satu buah kejadian di daerah atas kecamatan Cimanggu, karena saat pemungutan suara sedang hujan dan mengakibatkan banjir, keadaan ini membuat surat suara di daerah tersebut banyak yang rusak. Langkah sigap Panwas kala itu langsung menghubungi PPK untuk melaksanakan rekomendasi dari pengawas kecamatan untuk menyelamatkan kotak suara yang basah tersebut.

Di Kecamatan Cilacap tengah sempat ramai karena ada kotak suara yang ringan jika diangkat, sebagai langkahantisipasi agar tidak terjadi hal yang mengakibatkan fatal, maka dengan instruksi dari panwaskab, panwaslu kecamatan mengundang beberapa saksi, parpol

⁴⁷ Wawancara dengan Helmy Nur Adiyansyah, tanggal 10 Mei 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

bersama dengan jajaran KPU membuka kotak suara tersebut dan memperbaikinya.⁴⁸

D. Profil Anggota Panwas Kabupaten Cilacap Presiden Tahun 2014

Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Panwas Kabupaten Cilacap dijabat oleh 3 orang anggota panwas yaitu:

1. Bachtiar Hastiarto (Ketua serta Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran)



Bachtiar Hastiarto lahir di Cilacap Tanggal 24 Desember 1966, menempuh pendidikan di TK dan SD Pius Bersubsidi Cilacap, SMPN 1 Cilacap, SMAN 1 Cilacap, Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Pada saat kuliah di fakultas Hukum Ia bercita-cita menjadi Hakim dengan pertimbangan seandainya polisi dan jaksa masih bisa memanipulasikan hukum tapi jika hakim sebagai penjaga terakhir mempunyai integritas yang kuat maka keadilan masih bisa didapatkan, namun cita citanya menjadi hakim sampai saat ini belumlah tercapai.

⁴⁸ Wawancara dengan Tazkirotul Azmi, tanggal 10 April 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

Pada saat di sekolah dasar Bachtiar menyukai olahraga catur dan bulutangkis, olahraga catur yang dia geluti ini mengantarnya menjadi juara catur di tingkat Kabupaten Cilacap dan Karesidenan Banyumas, sehingga pada tahun 1977 dipercaya untuk berlomba di ajang porseni SD tingkat Provinsi Jawa Tengah di kota Magelang. Memasuki usia remaja Bachtiar aktif di kegiatan sosial kepemudaan dalam wadah Karang Taruna, dari aktivitas ini pada Tahun 1987 Ia dipercaya untuk menjadi anggota KPPS yang ditugaskan sebagai anggota pantarlih.

Mengeluti dunia kepemiluan di tingkat paling dasar membuat mata hatinya terbuka, pemilu yang oleh pemerintah waktu itu diklaim sebagai pesta demokrasi yang luber dan jurdil ternyata justru penuh rekayasa, tipu daya dan kecurangan untuk kepentingan penguasa. Prihatin atas pengingkaran demokrasi yang dilakukan oleh penguasa secara terstruktur, sistematis dan masif, menjadikan nalurnya bangkit untuk memberikan penolakan dan perlawanan.

Salah satunya dengan menuliskan berbagai rekayasa, tipu daya dan kecurangan pemilu dalam sebuah buku humor politik yang diberi judul "Lelucon Orde Baru", buku yang diberi pengantar oleh budayawan Darmanto Jatman tersebut diterbitkan oleh Tabloid Bangkit dari Surabaya

Untuk menggugah daya kritis para mahasiswa terhadap kondisi bangsa dan negara, pada tanggal 31 Desember 1999 Bachtiar menyelenggarakan lomba humor politik tingkat nasional di gedung Patra Graha Pertamina

Cilacap. Adapun dewan Juri pada lomba humor politik tersebut adalah Darmanto Jatman (budayawan UNDIP Semarang) sebagai ketua, Yami Wahyono (redaksi Tabloid Politik Bangkit, Surabaya) sebagai anggota, dan Satrio Saptohadi, S.H. (Dosen Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto) sebagai anggota. Lomba Humor Politik dipilih sebagai sarana untuk mengkritik pemerintah karena kritik melalui humor dirasakan lebih santun sekaligus menghibur bagi masyarakat maupun bagi pihak yang dikritik, sehingga harapan pihak yang dikritik dengan kesadaran sendiri mau memperbaiki kesalahannya

Beberapa organisasi atau profesi yang pernah dijalani Bachtiar sejak masa remaja hingga saat ini diantaranya, Karang Taruna, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Forum Lintas Pelaku (FLP) pemantau program jaring pengaman sosial, PT Berca Indonesia pada pengerjaan debottlenecking proyek di Pertamina RU 4 Cilacap, Wartawan Cilacap TV, Wartawan Banyumas Tv, Panwas Kabupaten Cilacap dan Bawaslu Kabupaten Cilacap

Sementara itu untuk aktifitas kepemiluan Bachtiar sejak Tahun 1987 hingga saat ini adalah, anggota KPPS pada tahun 1987, Panwas Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012, Panwas Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, Panwas Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Umum Tahun 2014, Panwas Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap

Tahun 2017 dan Bawaslu Kabupaten Cilacap dari Tahun 2018 hingga sekarang.⁴⁹

2. Tadzkiroh S.Ag (Koordinator Divisi SDM)



Tadzkiroh lahir di Cilacap pada Tanggal 8 Juni Tahun 2071, menempuh pendidikan dasar di MI,SMP dan SMA Ya Bakii Kesugihan Cilacap, selanjutnya menempuh pendidikan tinggi strata 1 di Institut Agama Islam Imam Ghozali Kesugihan Cilacap dan Strata 2 di

Universitas Islam Negeri SAIZU Purwokerto.

Di bidang pekerjaan, Tadzkiroh mengawali sebagai Divisi Perdagangan Kp. Yabakii Kesugihan Cilacap, Panwaslu Kabupaten Cilacap pada Pemilu Legislatif Tahun 2004, Panwaslu Kabupaten Cilacap pada Pemilu Legislatif Tahun 2009, Panwaslu Kabupaten Cilacap pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012 dan Panwaslu Kabupaten Cilacap pada Pemilu Legislatif tahun 2014

Wanita yang sangat menyukai profesi kepengawasan ini suka sekali kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan organisasi. Jika seorang perempuan bisa menjalankan fungsi kepengawasan ini dirasa memiliki bargaining

⁴⁹ Wawancara dengan Hastiaro, Bachtiar, tanggal 10 Mei 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

power dihadapan Partai politik. Karena alasan tersebutlah menjadikan tadzkiroh menjadi wanita yang sering terpilih menjadi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten dari jaman ke jaman.

Beberapa organisasi yang pernah diikuti Tadzkiroh diantaranya: Ketua IPPNU Kabupaten Cilacap Tahun 1995, Pengurus DPD KNPI Kabupaten Cilacap, Ketua Forum Perempuan Peduli Air Bersih Kabupaten Cilacap, Sekretaris Fatayat Kabupaten Cilacap, Pengurus Karang Taruna Kabupaten Cilacap, dan Pengurus LKKNU Kabupaten Cilacap.⁵⁰

3. Helmy Nur Ardiansyah, S.E (Koordinator Divisi Pengawasan)



Helmy Nur Ardiansyah Lahir di Malang Propinsi Jawa Timur pada Tanggal 17 Januari 1970, Helmy mengawali pendidikannya di Sekolah Dasar Muhammadiyah Sumberpucung Malang lulus tahun 1982, SMP Negeri Singosari Malang lulus Tahun 1985, SMA Islam Malang lulus Tahun 1988, STIE Satria Purwokerto Lulus tahun 2011.

⁵⁰ Wawancara dengan Tazkirotul Azmi, tanggal 10 April 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

Pengalaman organisasi Helmy sebelum menjadi anggota Panwaslu Kabupaten Cilacap adalah: Ketua 2 OSIS SMP Negeri Singosari Malang, Pengurus bidang dakwah Islam SMA Islam Malang, Pengalaman Pekerjaan: Bendahara pengurus Cabang PRSSNI Banyumas periode 2008-2011, Badan Pengawas Keuangan Pengurus Daerah PRSSNI Jawa Tengah 2008-2011, Penyiar Reporter Radio KDS 8 Malang 1992-1994, Marketing Manager Radio Yasfi Cilacap 1994-1998, General manager Radio Yasfi Cilacap 1998-2008, Direktur Utama Radio Yasfi (YES FM) 2008-2012.

Adapun aktivitas Helmy dibidang pengawasan pemilu yaitu, menjadi anggota Panwas Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, Panwas Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, Panwas Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden Tahun 2014

Helmy mempunyai seorang istri Risnawati Dwi Novita dan 2 orang anak yaitu Verly Aulia Rahmawati dan Atha'illah Calista Viansyah, saat ini tinggal di Perum Joyogrand blok A-11 Merjosari Lowokwaru Malang Jawa-Timur, menjalani profesi sebagai Event Organizer, Advertising "Orbit" Malang.⁵¹

⁵¹ Wawancara dengan Helmy Nur Adiyansyah, tanggal 10 Mei 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2017

A. Konteks Penyelenggaraan Pilbup Cilacap Tahun 2017

Semenjak DPR menyetujui bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan secara serentak pada pertengahan Februari 2015, konstelasi politik lokal di Indonesia segera berubah. Perdebatan tentang keberlanjutan langsung tidaknya Pilkada selesai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.

Sampai dengan perubahan kedua terhadap undang - undang tersebut yakni dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016, disebutkan bahwa proses Pilkada serentak akan dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2015 bagi Kepala Daerah yang akhir masa jabatannya (AMJ) berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016. Tahap kedua dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2017 bagi Kepala Daerah yang AMJ-nya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017. Sedangkan tahap ketiga dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2018 bagi

Kepala Daerah yang AMJ-nya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019.⁵²

Kabupaten Cilacap yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir pada tanggal 19 November 2017, pelaksanaan Pilkada masuk pada tahap kedua yakni mengikuti penyelenggaraan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2017. Pada gelaran Pilkada serentak tahun 2017 di Indonesia, tercatat ada 101 daerah yang melaksanakan Pilkada dan tersebar di 7 Provinsi, 18 Kota dan 76 Kabupaten. Di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap melaksanakan Pilkada serentak bersama dengan 5 Kabupaten dan 1 Kota lainnya, yakni Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati dan Kota Salatiga.

Pilkada diselenggarakan melalui dua tahapan, yakni tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan. Pilkada serentak pada tahap kedua ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sebagaimana jadwal tahapan Pemilihan yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016. Melihat Peraturan KPU tersebut, tahapan pemilihan serentak tahun 2017 ini dimulai pada bulan Mei 2016.

⁵² Laporan Pengawasan Pilkada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017

Pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017 (Pilbup Cilacap 2017), jumlah pemilih di Kabupaten Cilacap yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.466.869 yang tersebar di 3.217 TPS dengan rincian pemilih laki-laki 733.152 dan pemilih perempuan 733.717. Jika disandingkan dengan Pemilu terakhir sebelum Pilkada 2017, maka terdapat penurunan jumlah pemilih dalam DPT sebesar 17.658 pemilih. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena persoalan ketentuan pemilih, yakni jika dalam Pilpres 2014 siapapun yang berhak memilih dan berada di wilayah Kabupaten Cilacap maka didaftar sebagai pemilih, sedangkan pada Pilbup Cilacap 2017 hanya penduduk Cilacap saja yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih yang didaftar.⁵³

Sementara itu pada tahapan pencalonan pada Pilbup Cilacap 2017, untuk pertama kalinya dibuka pencalonan dari jalur perseorangan di samping pencalonan dari jalur partai politik. Khusus di Cilacap, berdasarkan UU Pilkada bahwa dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan adalah sebesar 6,5% dari jumlah DPT Pilpres tahun 2014 atau sebanyak 96.495 dukungan.

Namun sampai dengan batas berakhirnya masa pendaftaran pasangan calon di Cilacap, tidak ada yang mendaftar melalui jalur perseorangan ini. Sesuai hasil pengawasan pada perhelatan Pilbup Cilacap 2017, diperoleh hasil bahwa KPU Kabupaten

⁵³ Laporan Pengawasan Pilkada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017

Cilacap telah menerima, memverifikasi dan menetapkan 3 pasangan calon peserta Pilbup Cilacap 2017 sekaligus melakukan pengundian nomor urut pasangan calon dengan hasil sebagai berikut:

NO URUT	PASANGAN CALON	PARPOL PENGUSUNG	JML KURSI DPRD	WAKTU PENDAFTARAN
1	Taufik Nurhidayat & Hj. Faiqoh Subky, S.H, M.Pd.	PDI Perjuangan	9	Jumat, 23 Sept 2016 Pukul 10.56 WIB
		PPP	6	
		Jumlah	15	
2	H. Tatto Suwarto Pamuji & Syamsul Auliya Rachman, S.STP, M.Si.	P Golkar	9	Rabu, 21 Sept 2016 Pukul 11.01 WIB
		PAN	6	
		PKB	6	
		P Demokrat	4	
		Jumlah	25	
3	H. Fran Lukman, S.Sos, M.M. & Bambang Sutanto	P Gerindra	7	Jumat, 23 Sept 2016 Pukul 15.24 WIB
		PKS	3	
		Jumlah	10	

Selanjutnya menjelang pelaksanaan tahapan kampanye, KPU Kabupaten Cilacap melakukan rapat koordinasi dengan para tim kampanye dan pemangku kepentingan lainnya termasuk Panwas Kabupaten Cilacap untuk membahas persiapan kampanye dan usulan agar dalam kampanye Pilbup Cilacap 2017, wilayah kabupaten Cilacap dibagi menjadi 3 zona kampanye.

Terkait dengan hal ini Panwas Kabupaten Cilacap menyatakan tidak setuju dengan pandangan tersebut karena semestinya menjadi hak peserta Pilbup untuk berkampanye di wilayah Kabupaten Cilacap tanpa ada batasan yang tidak berdasar.

Namun para peserta rapat dari Tim Kampanye bersepakat untuk tetap melaksanakan zonasi kampanye tersebut.

Kemudian kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Cilacap Nomor 78/BA/XI/2016 tentang Kesepakatan Bersama Jadwal dan Zona Kampanye di Luar Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017 yang ditandatangani oleh tiga Tim Kampanye Pasangan Calon dan KPU Kabupaten Cilacap, sementara Panwas diminta tanda tangan bukan sebagai persetujuan atas kesepakatan tersebut, namun sebagai pihak yang ikut menyaaksikan adanya kesepakatan itu.

Berdasarkan hasil pengawasan jajaran Pengawas Pilbup Cilacap 2017, secara umum pelaksanaan tahapan kampanye berjalan dengan lancar dan kondusif, meski masih terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon, Tim Kampanye maupun oleh masyarakat. Namun pelanggaran yang sering terjadi adalah tidak adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian yang harus dipenuhi oleh pasangan calon dan tim kampanyenya. Terhadap hal ini Panwas Kabupaten Cilacap telah berupaya melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait dengan persoalan STTP.

Kemudian berkaitan dengan dukungan logistik Pilbup Cilacap tahun 2017, hasil pengawasan menyimpulkan bahwa terhadap proses pengadaan logistik di KPU Kabupaten Cilacap berjalan dengan lancar dan transparan. Sedangkan terhadap proses distribusi logistik tersebut ditemukan adanya kekurangan surat suara dan beberapa kelengkapan pemungutan suara lainnya.

Namun demikian kekurangan tersebut dapat dipenuhi oleh KPU Kabupaten Cilacap walaupun sempat terjadi penundaan distribusi karena ada kelengkapan yang belum datang, namun akhirnya sampai dengan hari pemungutan dan penghitungan suara semua kelengkapan logistik dapat terpenuhi dengan baik.

Sedangkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pilbup Cilacap 2017 yang dilaksanakan pada hari Rabu 15 Februari 2017 terpantau lancar tidak ditemukan kejadian atau peristiwa khusus yang dapat mengakibatkan penghitungan atau pemungutan suara ulang. Hanya memang ada beberapa TPS yang dalam menuangkan hasil pemungutan suara ke dalam Formulir C-1 KWK belum sesuai ketentuan, khususnya pengisian pada kolom data pemilih dan penggunaan surat suara. Namun untuk pengisian kolom perolehan suara sah pasangan calon tidak ditemukan persoalan yang berarti.

Selanjutnya untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara, laporan dari Panwascam relatif tidak ada masalah, artinya rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon yang berakibat terhadap tertundanya proses rekapitulasi.

Namun justru pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten ternyata masih ada koreksi dari Panwas Kabupaten Cilacap terhadap hasil rekapitulasi, baik terkait dengan data pemilih, data penggunaan surat suara maupun data perolehan suara pasangan calon peserta Pilbup Cilacap 2017. Terhadap koreksi tersebut para saksi pasangan calon dan KPU Kabupaten Cilacap telah menerima dan memperbaiki kekeliruan dimaksud tanpa ada

keberatan dari para saksi. Data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pilbup Cilacap 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Uraian	Jumlah
I	Jumlah Pemilih (DPT + DPTb)	1.471.409
II	Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih	937.929
III	Partisipasi	63,74%
IV	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon	
	1. Taufik Nurhidayat dan Hj. Faiqoh Subky, S.H., M.Pd.	249.81 (27,24%)
	2. H. Tatto Suwanto Pamuji dan Syamsul Auliya Rachman, S.STP, M.Si.	515.059 (56,32%)
	3. H. Fran Lukman, S.Sos, M.M. dan Bambang Sutanto	150.367 (16,44%)

Kemudian berdasarkan Berita Acara Nomor 21/BA/III/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017, KPU Kabupaten Cilacap menerbitkan Keputusan Nomor 10/Kpts/KPU.Kab-012.329382/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017. Selanjutnya melalui suratnya Nomor 201/KPU.Kab-012.329382/2017 tanggal 17 Maret 2017, Pasangan Calon terpilih diusulkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Cilacap untuk dilakukan

pengesahan pengangkatan pasangan Bupati dan Wakil Bupati untuk masa jabatan tahun 2017 - 2022.

B. Profil Kelembagaan Panwas Kabupaten Cilacap

Berdasarkan Pasal 23 UU Nomor 1 Tahun 2015 dinyatakan bahwa Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS. Adapun keanggotaan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS berasal dari kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota Partai Politik. Keanggotaan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang, PPL berjumlah 1 (satu) orang setiap Desa atau sebutan lain/Kelurahan dan Pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang setiap TPS.

Pengawasan menjadi salah satu unsur penting dalam gelaran pemilihan kepala daerah guna memastikan dan menjamin penyelenggaraannya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Pada Pilbup Cilacap 2017 juga terdapat Pengawas Pemilihan yang proses pembentukannya oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dimulai dari tahapan pengumuman pendaftaran pada 7 - 13 April 2016 sampai dengan terpilihnya Anggota Panwaslu Kabupaten pada 23 Mei 2016.

Rangkaian tahapan pembentukan Panwaslu Kabupaten yang meliputi pendaftaran, seleksi administrasi, tes tertulis, tes wawancara hingga pengumuman, menghasilkan 21 orang dari 7

kabupaten/kota yang ber pilkada di Jawa Tengah. Tiga Anggota Panwas terpilih dari Kabupaten Cilacap diantaranya adalah Bachtiar Hastiarto, Umi Fadila dan Warsid.

Pada saat pelantikan Anggota Panwas Kabupaten/Kota di Hotel Patrajasa Semarang, hadir Ketua Bawaslu RI Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si, Anggota DKPP RI Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si,



dan unsur Forkopimda Provinsi Jawa Tengah. Pesan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Abhan, SH, bahwa setelah Panwas Kabupaten/Kota dilantik, maka dalam waktu dekat agar melakukan konsolidasi ke dalam dengan baik. Koordinasi dilakukan dengan KPU Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota dan dengan Stakeholder lainnya, serta koordinasi dengan Polres, Kejari untuk sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu).

Setelah dilantik, Anggota Panwas Kabupaten/Kota mendapatkan pembekalan selama tiga hari, Senin – Rabu, (23 – 25 Mei 2016) oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Di tengah pembekalan tersebut, Panwas Kabupaten Cilacap

menggelar rapat pleno menyusun struktur Panwas, yang hasilnya disepakati bahwa Ketua merangkap Anggota dipercayakan kepada Warsid sedangkan Bachtiar Hastiarto dan Umi Fadilah sebagai Anggota.⁵⁴ Di samping itu, juga disepakati pembagian divisi dan koordinator wilayah masing-masing anggota sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Nama Pengawas	Divisi	Wilayah Kerja (Kecamatan)
1	Warsid	Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga	Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Kawunganten, Bantarsari, Gandrungmangu, Karangpucung dan Kampunglaut
2	Bachtiar Hastiarto	Penindakan Pelanggaran	Sidareja, Kedungreja, Patimuan, Cipari, Cimanggu, Majenang, Wanareja dan Dayeuhluhur
3	Umi Fadila	Organisasi dan SDM	Nusawungu, Binangun, Kroya, Adipala, Sampang, Maos, Kesugihan dan Jeruklegi

⁵⁴ Wawancara dengan Warsid, tanggal 10 Mei 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.



Pasca pembekalan, Panwas Kabupaten Cilacap melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan kantor kesekretariatan Panwas, dukungan operasional, dan staf pegawai kantor kesekretariatan. Atas fasilitasi Pemda, Panwas Kabupaten Cilacap menempati kantor di jalan Jenderal Sudirman nomor 200 bekas kantor PMI Kabupaten Cilacap yang kondisinya jauh dari representatif untuk sekretariat Panwas Kabupaten. Oleh karenanya Panwas Kabupaten melakukan koordinasi dengan pihak Pemda untuk perbaikan kantor dan perlengkapan kantor sekaligus

komunikasi terkait dengan tenaga pendukung kesekretariatan guna menunjang kinerja Panwas Kabupaten. Hasil komunikasi dan koordinasi tersebut diantaranya adalah Pemda berkenan memperbaiki kantor sehingga menjadi lebih layak dan representatif, memberikan enam tenaga PNS yang diperbantukan di sekretariat Panwas, pemberian meja kursi kerja, komputer, kamera, CCTV, dua sepeda motor, dua mobil operasional dan sebagainya. Yang pada intinya dukungan Pemda terhadap hal di atas sangat mendukung kinerja Panwas Kabupaten dan

dukungan tersebut patut mendapat apresiasi yang layak.⁵⁵

Terkait dengan anggaran, Panwas Kabupaten Cilacap mendapat hibah untuk Pilbup Cilacap 2017 dari Pemda sebesar Rp 7.142.175.000,00 dengan rincian peruntukannya sebagai berikut :

NO	TINGKATAN		ANGGARAN	
			Jumlah (Rp)	(%)
1	Panwas Kabupaten	1 Kab	1.679.965.000,00	23,52
2	Panwas Kecamatan	24 Kec	3.350.030.000,00	46,90
3	Pengawas Pemilihan Lapangan	284 Des/Ke I	1.141.680.000,00	15,99
4	Pengawas TPS	3.215 TPS	970.500.000,00	13,59
Jumlah			7.142.175.000,00	100

Anggaran tersebut dirasa cukup memadai untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengawasan pada Pilbup Cilacap 2017 guna melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung kerja pengawasan yang lebih baik.

Panwas Kabupaten Cilacap dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berusaha melakukan berbagai upaya komunikasi dan koordinasi dengan *stakeholder* pada Pilbup Cilacap 2017 baik dengan Forkopimda, Parpol pengusung pasangan calon maupun dengan para Paslonnya. Upaya membangun komunikasi dengan masyarakat

⁵⁵ Wawancara dengan Erina Hastuti, tanggal 10 Mei 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

juga dilakukan dengan mengadakan sosialisasi, diskusi dan pendidikan politik bersama masyarakat luas, baik ormas, LSM, togamas, kaum marginal dan masyarakat pemilih lainnya yang tersebar di 24 kecamatan. Dukungan lain yang memadai dalam menjalankan tugas kepengawasan juga datang dari jajaran Sekretariat Panwas Kabupaten Cilacap. Beberapa personil yang terlibat dalam sekretariat ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Nama	Asal Instansi	Posisi di Panwas Kabupaten
1	Testyana Intani	Bagian Tata Pemerintahan Setda Cilacap	Kepala Sekretariat
2	Irni Isriana Sari	Bagian Pertanahan Setda Cilacap	Bendahara Pengeluaran Pembantu
3	Agus Triyanto	Kecamatan Dayeuhluhur Cilacap	Staf Pendukung
4	Rusyantoro	Bagian Humas Setda Cilacap	Staf Pendukung
5	Imam Sapii	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap	Staf Pendukung
6	Yusuf Nurrohman	Satpol PP Kabupaten Cilacap	Staf Pendukung
7	Imam Supardi		Sopir
8	Rizatmoko Nugrahatama		Satpam
9	Sugesti Pangastuti		Pramusaji
10	Subur		Satpam

Dukungan sekretariat terhadap Panwas Kabupaten Cilacap patut diapresiasi, khususnya dalam hal tata kelola administrasi keuangan. Hal ini terbukti bahwa Panwas Kabupaten Cilacap mendapatkan penghargaan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam kategori Administrasi Keuangan Terbaik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

C. Peristiwa Menarik Terkait Pengawasan Pilkada 2017

Satu diantara revisi kedua Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak gelombang kedua melalui UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah jangka waktu larangan penggantian pejabat atau mutasi oleh Petahana sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2). Jangka waktu larangan mutasi sebelumnya adalah 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir, kemudian berubah menjadi 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Dan bagi Petahana yang melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Ada beberapa daerah dalam pilkada yang dihelat pada 15 Februari 2017 ini, terdapat peristiwa penggantian pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh petahana yang waktunya melanggar ketentuan di atas. Setidaknya daerah tersebut bisa disebutkan yakni Kota Kupang-NTT, Kabupaten Boalemo - Gorontalo dan Kabupaten Cilacap - Jateng.

Di tengah kebimbangan Panitia Pengawas Pilkada terhadap peristiwa tersebut, Bawaslu RI menerbitkan Surat Edaran (SE) nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/ 2016 tertanggal 20 Oktober 2016 perihal Pedoman Penanganan Pelanggaran Terkait Perbuatan Penggantian Pejabat Sebagaimana Diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Yang pada intinya SE tersebut menyatakan bahwa Petahana yang mengembalikan Pejabat pada posisi semula maka perbuatan penggantian Pejabat tersebut tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016.

Pada saat Penetapan Paslon Peserta Pilbup Cilacap 2017 tanggal 24 Oktober 2016, KPU Kabupaten Cilacap memberikan kesempatan kepada Panwas Kabupaten Cilacap menyampaikan sambutan di hadapan para Pimpinan Parpol Pengusung, Paslon Peserta Pilbup, dan tamu undangan lainnya. Panwas Kabupaten Cilacap menyampaikan beberapa hal diantaranya adalah agar peserta berkompetisi secara sehat dan jika ada pihak yang merasa keberatan/tidak puas terhadap keputusan KPU Cilacap terkait dengan penetapan paslon peserta pilkada cilacap 2017 agar mengajukan sengketa ke Panwas Kabupaten Cilacap. Namun sampai dengan penyelenggaraan Pilbup Cilacap 2017, tidak ada parpol, tim kampanye maupun paslon yang mengajukan sengketa atas penetapan paslon peserta Pilbup Cilacap 2017 yang telah dilaksanakan KPU Kabupaten Cilacap.

Walaupun tidak ada yang mengajukan sengketa, namun sebenarnya ada tembusan surat pengaduan dari masyarakat kepada Panwas

Kabupaten Cilacap terkait dengan penetapan Paslon dan kejadian mutasi pejabat oleh petahana yang ditujukan ke KPU Kabupaten Cilacap. Terhadap surat tersebut Panwas Kabupaten Cilacap menjadikannya temuan dan menindaklanjuti dengan memastikan bahwa mutasi dimaksud memang benar terjadi, tetapi Petahana telah mencabut keputusan mutasi dengan keputusan Bupati tertanggal 20 Juli 2016.

Selanjutnya Panwas Kabupaten Cilacap berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah maupun Bawaslu RI, yang hasil konsultasi dijawab dengan diberikannya SE Bawaslu RI di atas. Berdasar SE tersebut Panwas Kabupaten Cilacap menghentikan laporan dugaan pelanggaran tersebut karena tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU nomor 10 Tahun 2016. Walhasil Petahana ditetapkan menjadi peserta Pilkada Cilacap Tahun 2017 bersama dua pasangan calon lainnya dan bahkan Petahana telah ditetapkan menjadi pasangan calon terpilih kembali pada Pilkada tersebut.

Ada hal menarik terkait dengan pemahaman terhadap Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 dan SE Bawaslu RI di atas, terlebih jika disandingkan dengan salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016, yakni: "Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) yang sanksinya ditentukan dalam ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, begitu tindakan dilakukan maka konsekuensinya lahir dan berakibat hukum. Walaupun dicabut kembali akibat hukumnya telah ada dalam rentang waktu tertentu.

Karena itu pelanggaran sudah terjadi dan tidak hapus karena dicabut.”

Semoga catatan implementasi ketentuan larangan mutasi ASN oleh Petahana pada Pilkada 2017 ini menjadi pengalaman berharga dan memberikan pelajaran yang baik, sehingga peristiwa mutasi yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terulang kembali.⁵⁶

D. Profil Anggota Panwas Kabupaten pada Pilbup Cilacap Tahun 2017

1. Bachtiar Hastiarto



Terlahir sebagai anak ke 8 dari delapan bersaudara hasil pernikahan M Yusuf Purnawirawan TNI (waktu itu ABRI) dan Ibu Suratmi, menjadikan kehidupan di keluarganya kental akan nilai-nilai kedisiplinan dan kemanusiaan. Mengawali pendidikan di TK Pius Jalan Ahmad Yani Cilacap dan melanjutkan Sekolah Dasar juga pada sekolah yang sama, kemudian dilanjutkan ke SMP N 1 Cilacap, SMA N 1 Cilacap, Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

⁵⁶ Wawancara dengan Warsid, tanggal 10 Mei 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

Mengawali kiprah penyelenggaraan pemilu dimulai ketika menjadi anggota pantarlih (panitia pendaftaran pemilih) pada pemilihan umum tahun 1987, kemudian pada tahun 2012 hingga tahun 2017 menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap. Pengalaman pertama sebagai penyelenggara pemilu pada Tahun 1987 membuat Bachtiar begitu prihatin, karena slogan pemilihan umum Luber Jurdil ternyata hanya pepesan kosong belaka.

Penguasa Orde Baru saat itu ternyata justru menyelenggarakan Pemilu dengan penuh kecurangan, bahkan intimidasi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Bachtiar mulai berkebutakan di dunia pengawasan saat menjadi anggota Forum Lintas Pelaku (FLP) pada program jaring pengaman sosial (JPS) dan selanjutnya menjadi wartawan televisi di media televisi lokal Cilacap TV dan Banyumas TV.

Melalui saluran media ini berbagai penyimpangan yang dilakukan penguasa disampaikan secara santun dan halus dengan harapan ada kesadaran dari penguasa untuk memperbaiki diri, sementara untuk Pengawasan di bidang kepemiluan baru diawali sejak tahun 2012 hingga tahun 2017. Pada Pilbup Cilacap 2017, disamping menjadi Anggota juga merangkap sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran.⁵⁷

⁵⁷ Wawancara dengan Hastiarto, Bachtiar, tanggal 10 Mei 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

2. Umi Fadilah



Lahir di Cilacap, 19 April 1974 merupakan Anggota Panwas Kabupaten Cilacap merangkap Koordinator Divisi Organisasi dan SDM, alumni IAIG Cilacap prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam serta Magister Administrasi

Publik dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Bagi perempuan yang bekerja sebagai dosen di IAIG Cilacap ini, menjadi Anggota Panwas dan sebagai Kordiv Organisasi dan SDM merupakan tanggung jawab yang besar. Namun dengan berbekal pengalaman organisasi yang dimiliki selama ini, Umi mampu mengemban dan melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan baik.

Banyak pengalaman organisasi yang pernah diikutinya seperti aktif di organisasi kelompok perempuan, Perkumpulan NU dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Di samping itu juga memiliki pengalaman kepemiluan yang mumpuni di tingkat kecamatan. Pengalaman berorganisasi dan kepemiluan inilah yang membuat Umi memiliki modal dasar yang sangat cukup untuk menjalankan tugas kepengawasan dalam Pilbup Cilacap 2017.⁵⁸

⁵⁸ Wawancara dengan Erina Hastuti, tanggal 10 Mei 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

3. Warsid



Warsid lahir di Cilacap tahun 1976, anak pertama dari tiga bersaudara yang dibesarkan dalam keluarga nelayan yang sederhana. Pada tahun 1982 memasuki bangku SD N 3 Tritih Kulon Cilacap, kampung di mana ia tinggal. Selesai dari SD melanjutkan ke SMP Negeri Jeruklegi Cilacap selama 3 tahun. Setelah lulus SMP melanjutkan sekolah di STM Negeri Cilacap dari tahun 1991-1994.⁵⁹

Hampir di setiap jenjang pendidikannya, Warsid muda sering dipercaya menjadi ketua kelas dan beberapa kali menjadi juara kelas. Di usia remajanya lebih banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di Al-Mu'minuun, salah satu masjid di kampung halamannya. Selesai sekolah dari STM melanjutkan pendidikan di IKIP Negeri Yogyakarta melalui program Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD).

Pada jenjang pendidikan inilah Warsid banyak mendapat pengalaman berorganisasi baik mulai menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan, Ketua Senat Mahasiswa Fakultas, Ketua Himpunan Mahasiswa Cilacap di Yogyakarta serta kegiatan sosial dan politik lainnya. Pengalaman menjadi Penyelenggara Pemilu

⁵⁹ Wawancara dengan Warsid, tanggal 10 Mei 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

sejak 2003-2013 sangat mendukung kinerjanya di Panwas Kabupaten Cilacap selaku Ketua merangkap Anggota yang mengkoordinir Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga.⁶⁰

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018

A. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 merupakan pemilihan kepala daerah ketiga bagi Jawa Tengah yang dilakukan secara langsung menggunakan sistem pencoblosan, jadwal pemilihan periode ini mengikuti jadwal pilkada serentak gelombang ketiga pada Juni 2018. Tahapan Pemilihan Gubernur 2018 dimulai pada bulan September 2017, serta pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Juni 2018.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 diikuti 2 pasangan calon yaitu,

1. Pasangan Nomor urut 1 Ganjar Pranowo - Taj Yasin. Partai Pengusung: PDI Perjuangan, PPP, Demokrat, Nasdem.
2. Pasangan Nomor urut 2 Sudirman Said - Ida Fauziyah. Partai Pengusung: Gerindra, PKB, PKS, PAN

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 Daftar Pemilih Tetap (DPT) di wilayah Kabupaten Cilacap berjumlah 1.442,974 pemilih dengan rincian laki-laki 721.803 dan Perempuan 721.171. Pada Pemilihan Gubernur ini Kabupaten Cilacap memiliki 24 kecamatan dan 284 desa/kelurahan dengan tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 3235 TPS.

Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara, KPU Kabupaten Cilacap menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

No.	Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Suara	Persentase
1	1	Ganjar Pranowo-Taj Yasin	512.146	55,38 %
2	2	Sudirman Said-Ida Fauziyah	412.675	45,62 %

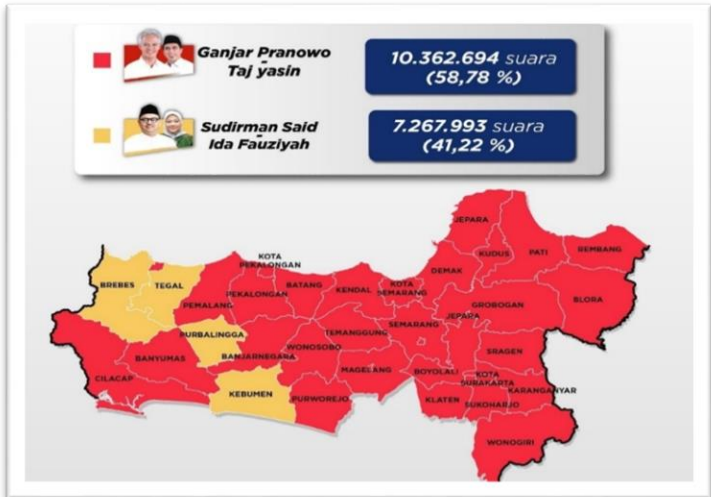
Partisipasi pemilih masyarakat Cilacap pada Pemilihan Gubernur Jateng 2018 ini mencapai 65,6%, angka ini jauh lebih besar dibandingkan persentase pemilih pada Pemilihan Gubernur Jateng 2013 sebesar 53 %.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 di seluruh Jawa Tengah dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 27.069.500 dan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 63.973 TPS. Pada 8 Juli 2018 KPU Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin sebagai pemenang Pemilihan Gubernur Jawa Tengah, berdasarkan laporan hasil rekapitulasi suara dan penetapan hasil penghitungan suara adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Suara	Persentase
1	1	Ganjar Pranowo-Taj Yasin	10.362.694	58,78 %

2	2	Sudirman Said-Ida Fauziyah	7.267.993	41,22 %
---	---	----------------------------	-----------	---------

Rabu, 5 September 2018, Ganjar Pranowo dan Taj Yasin dilantik sebagai Gubernur - Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023 oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara bersama kepala daerah terpilih lainnya yang menggelar pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.



Infografik Peta Kemenangan Pilkada Jawa Tengah 2018. Sumber: Kompas.com

B. Profil Panwas Kabupaten Cilacap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018

Unsur penting dalam penyelenggaraan pemilihan adalah pengawasan, kerja-kerja pengawasan sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan aturan yang ada. Melalui amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dibentuklah Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota. Panwas Kabupaten/Kota sebagai lembaga *Ad hoc* dibentuk paling lambat satu bulan sebelum tahapan persiapan penyelenggaraan pemilihan dimulai dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan selesai.⁶¹

Bawaslu membentuk tim seleksi guna menyeleksi anggota panwas Kabupaten/Kota, anggota tim seleksi terdiri dari kalangan akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat. Proses Rekrutmen anggota Panwas Kabupaten/Kota melalui beberapa tahapan seleksi yaitu: pendaftaran, seleksi administrasi, tes tertulis, tes wawancara hingga pengumuman. Proses pembentukan Panwas Kabupaten/Kota dimulai pada tanggal 10 Juni 2017, penerimaan berkas pendaftaran dibuka pada tanggal 17-24 Juni 2017. Tim seleksi Panwas menerima sebanyak 1.183 orang pendaftar yang tersebar di 35

⁶¹ Laporan Pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah 2018

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Setelah melalui proses seleksi administrasi, terpilih sebanyak 1.047 pendaftar yang memenuhi syarat administrasi, tim seleksi segera menyelenggarakan tes tertulis pada Kamis 13 Juli 2017 yang berlangsung di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan terpilih 498 orang yang lolos tes tertulis tersebut.

Setelah proses tes tertulis, dilaksanakanlah tes wawancara selama empat hari dari tanggal 14 hingga 20 Juli 2017 melalui Tim Seleksi yang dibagi menjadi dua, yaitu: Tim Seleksi Jateng Selatan yang akan bertugas di wilayah eks Karesidenan Banyumas, Kedu dan Surakarta, yang dilaksanakan di Hotel Grand Artos Magelang. Sementara Tim Jateng Utara bekerja di wilayah eks Karesidenan Pekalongan, Pati dan Semarang yang dilaksanakan di Hotel Laras Asri Salatiga. Setelah melalui tes wawancara terpilih 6 nama di masing-masing 35 kabupaten/kota dan akan diseleksi lagi menjadi tiga melalui proses uji kepatutan dan kelayakan (*Fit and Proper Test*), adapun yang akan menetapkan adalah dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Sebelum melaksanakan proses uji kepatutan dan kelayakan para calon Panwas diminta untuk membuat makalah tentang visi dan misi sebagai Panwas dengan ketentuan: menggunakan kertas ukuran A4, jumlah halaman antara 3-5 lembar, jenis huruf arial ukuran 12 dengan spasi 1,5. Makalah tersebut diserahkan kepada Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melalui email: bawaslujateng@yahoo.com selambat-lambatnya dua hari sebelum pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan. Uji kepatutan dan kelayakan akan dilakukan Bawaslu Jawa Tengah pada 31 Juli hingga 7 Agustus 2017. Saat itu, jumlah pendaftar Panwas

Kabupaten Cilacap sebanyak 27 orang, terdiri dari 10 perempuan dan 17 laki-laki. Setelah proses seleksi selesai, ditetapkan tiga orang Panwas Kabupaten Cilacap terpilih, yang terdiri dari dua laki-laki dan satu perempuan. Mereka adalah:

1. Warsid, S.Pd
2. Miftah Nuryanto, S.H
3. Erina Hastuti, S.S.,M.Pd



Swafoto Anggota Panwas Kabupaten Cilacap terpilih pada Pemilihan Gubernur Tahun 2018 Warsid - Miftah Nuryanto - Erina Hastuti

Ketiganya dilantik di Hotel MG Setos Kota Semarang pada 25 Agustus 2017. Panwas Kabupaten Cilacap dilantik oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Abhan, S.H.,M.H. Pelantikan Panwas Kabupaten Cilacap dilakukan bersama dengan 34 Panwas Kabupaten/Kota lainnya se-Jawa Tengah.



Foto Pelantikan Panwas Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah di Hotel MG Setos Semarang.

Setelah dilantik, Anggota Panwas Kabupaten Cilacap mengikuti bimbingan teknis yang digelar Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan segera menggelar rapat pleno untuk membentuk struktur organisasi. Disepakati sebagai ketua adalah Miftah Nuryanto, S.H. sekaligus sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran, Warsid, S.Pd. ditugasi sebagai Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga dan Erina Hastuti, S.S.M.Pd. sebagai Koordinator Divisi SDM dan Organisasi.

Setelah membentuk struktur organisasi, Panwas Kabupaten Cilacap segera melaksanakan tugasnya, sebab KPU sudah memulai tahapan pemilihan Gubernur pada bulan September 2017. Untuk menjalankan tugas-tugasnya, Panwas Kabupaten Cilacap menempati sebuah kantor dengan luas 614 m² yang bertempat di Jalan Jend. Sudirman no.200 Cilacap, ini merupakan kantor yang dipakai juga oleh Panwaslu dalam pemilihan Bupati Cilacap tahun 2017.



Foto Kantor Sekretariat Panwas Kabupaten Cilacap Tahun 2018

Ketua Panwas Kabupaten Cilacap, Miftah Nuryanto menilai kondisi kantor saat itu sudah representatif, sudah ada beberapa sarana dan prasarana yaitu berupa 3 buah komputer beserta Meubelair dan ruangan berpendingin ruangan, tetapi Sekretariat belum terbentuk. Untuk menunjang kinerja pengawasan Ketua Panwas Kabupaten Cilacap Miftah Nuryanto bersama dua rekannya segera berkoordinasi dengan Pemerintah

Kabupaten Cilacap untuk membentuk sekretariat demi mensukseskan kinerja pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018.

Karena Sekretariat belum terbentuk pada saat itu, Anggota Panwas Kabupaten Cilacap Erina Hastuti membuat surat permohonan fasilitas kepada pemerintah kabupaten Cilacap di toko milik suaminya. Setelah proses permohonan fasilitasi, terbentuklah Sekretariat Panwas Kabupaten Cilacap, Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Panwas Kabupaten/Kota.

Sekretariat Panwas Kabupaten Cilacap dipimpin oleh Koordinator Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwas Kabupaten Cilacap. Koordinator Sekretariat Panwas Kabupaten Cilacap pada saat itu dijabat oleh Testyana Intani, S.STP.,M.Si dia merangkap menjadi Staf di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DISPERMADES) Kabupaten Cilacap dan Irni Isriana Sari, S.E sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Panwas Kabupaten Cilacap juga menerima sewa pinjam pakai kendaraan operasional Kantor dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berupa mobil avanza masing masing diberikan untuk Ketua, Anggota Panwas Kabupaten Cilacap dan Koordinator Sekretariat, dan satu unit sepeda motor dari Pemerintah kabupaten Cilacap. Saat itu, Sekretariat Panwas Kabupaten Cilacap menurut *“Laporan Akhir Pelaksanaan Hasil Pengawasan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018”* adalah sebagai berikut:

**Struktur Organisasi Panwas Kabupaten Cilacap
pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018**

No	Nama	Jabatan
1.	Miftah Nuryanto, S.H	Ketua dan Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran
2.	Warsid, S.Pd	Koordinator Divisi Pengawasan & Hubungan Antar Lembaga
3.	Erina Hastuti, S.S .M.Pd	Koordinator Divisi SDM & Organisasi
4.	Testyana Intani, S.STP.M.Si	Koordinator Sekretariat Panwas Kabupaten Cilacap
5.	Irni Isriana Sari, SE	Bendahara Pengeluaran Pembantu
6.	Indra Pamungkas, S.Sos	Staf IT Keuangan
7.	Galang Luh Prasetyo,S.Pd	Staf Keuangan
8.	Abu Mutolib Yahya	Staf SDM & Organisasi
9.	Joko Waluyo, S.H	Staf Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran
10.	Sansan Sanjaya	Staf Divisi Pengawasan & Hubungan Antar Lembaga
11.	Ainun Muarifah	Pramusaji
12.	Imam Supardi	Driver
13.	Subur	Penjaga Malam

Terkait dengan anggaran, Panwas Kabupaten Cilacap diberi anggaran total sebesar Rp 10.568.291.000 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Satu Ribu Rupiah) anggaran tersebut diberikan secara bertahap untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari honor pengawas pemilihan, sosialisasi partisipatif, pemenuhan kebutuhan kantor dan lain-lain.

Panwas Kabupaten Cilacap melakukan berbagai terobosan untuk memaksimalkan pengawasan, menggandeng berbagai stakeholder untuk ikut melakukan pengawasan pemilihan Gubernur, yaitu rapat koordinasi dengan Kepala BKPPD (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah) Kabupaten Cilacap tentang pentingnya netralitas ASN dalam pemilu/ pilkada serta Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Perguruan Tinggi.

Menjadi Anggota Panwas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 di Kabupaten Cilacap, Miftah Nuryanto dan 2 anggotanya diberi honor kurang lebih Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) per bulan dengan masa kerja selama 12 bulan, saat itu tidak ada tunjangan maupun jaminan kesehatan untuk para anggota Panwas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018.

Panwas Kabupaten Cilacap dilantik pada tanggal 25 Agustus 2017 hingga 14 Agustus 2018, setelah dilantik dan membentuk Sekretariat 3 bulan setelah masa kerjanya, Panwas kabupaten Cilacap membentuk Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) sebagai pengawas di tingkat

Kecamatan dengan masing masing 3 personil di 24 kecamatan di wilayah kabupaten Cilacap.⁶²

Untuk memaksimalkan pengawasan, Panwas Kabupaten Cilacap memberikan instruksi kepada Panwascam adalah sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan informasi terkait pelayanan penerimaan pengaduan daftar pemilih pemilihan melalui website dan akun resmi media sosial masing- masing Panwas Kecamatan;
2. Mendirikan posko penerimaan pengaduan daftar pemilih pemilihan (P2DP2) di setiap Kantor Sekretariat Panwascam agar dapat menjaring laporan masyarakat;
3. Membuat jadwal piket bagi Anggota Panwascam dan dibantu oleh Panitia Pengawas Desa (PPD) untuk secara bergantian untuk melakukan piket setiap harinya dari jam 08.00 s.d 17.00 WIB mulai tanggal 27 Maret s.d 7 April 2018;
4. Melakukan inventarisir dan rekapitulasi terkait dengan daftar pemilih bermasalah yang diterima dari posko Aduan P2DP2;
5. Menyampaikan rekomendasi apabila masih terdapat daftar pemilih yang bermasalah dan belum ditindaklanjuti oleh PPK hingga rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) selesai dilaksanakan.

Panwascam mempunyai tugas dan kewajiban adalah membentuk pengawas di jajarannya yaitu membentuk Pengawas Pemilihan

⁶² Laporan Pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah 2018

Lapangan (PPL), pada saat itu PPL di Kabupaten Cilacap berjumlah 284 orang. Tugas PPL membentuk PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara) 23 hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara dan dibubarkan 7 hari setelah pemungutan suara, Kabupaten Cilacap memiliki jumlah PTPS yang tersebar di 24 Kecamatan sebanyak 3235 orang.

C. Peristiwa Penting Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018

1. Ditemukannya Pemilih Non KTP Elektronik

Ditemukan pemilih dalam TPS 36-44 Nusakambangan (LAPAS Nusakambangan) Kecamatan Cilacap Selatan yang merupakan pemilih potensial non KTP Elektronik karena belum dilakukan tindak perekaman oleh Disdukcapil kabupaten Cilacap, sehingga perlu dikaji ulang BA Penetapan DPT pada tanggal 19 April 2018. Panwas Kabupaten Cilacap merekomendasikan DPT TPS 36-44 (LAPAS Nusakambangan) Kecamatan Cilacap Selatan supaya dicoret sehingga DPT pada TPS 36-44 (LAPAS Nusakambangan) menjadi 0 (nol) dan menyampaikan kepada Disdukcapil Kab. Cilacap dapat dilakukan perekaman KTP/ Suket supaya ketika pencoblosan warga binaan yang asli berdomisili di Wilayah Provinsi Jawa Tengah tidak kehilangan hak pilihnya.

KPU Kabupaten Cilacap menindaklanjuti permintaan Panwaslu Kabupaten Cilacap dan segera konsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah. Hasil Konsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 19 April 2018 pada

acara sinkronisasi Rekapitulasi Persiapan Pleno Tingkat Provinsi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dituangkan dalam Berita Acara.⁶³

2. Berujung Sanksi Karena Tak Memiliki STTP

Pada hari Minggu 25 Februari 2018 anggota Panwas Kabupaten Cilacap Koordinator Divisi Pengawasan, Warsid menemukan adanya dugaan pelanggaran pada kegiatan Harlah (Hari Lahir) ke-45 PPP (Partai Persatuan Pembangunan) di lapangan Jati Persada jalan Kalimantan Kecamatan Cilacap Tengah, pada acara tersebut diadakan jalan sehat dengan jumlah peserta kegiatan sekitar 5.000 (lima ribu) peserta, dalam kegiatan Harlah telah ditemukan sejumlah barang yang diduga alat peraga kampanye dan bahan kampanye dari salah satu peserta diantaranya yaitu kaos yang dipakai peserta jalan sehat bertuliskan “Ayo Dukung Ganjar – Yasin”, stiker bergambar dan tulisan Ganjar-Yasin, spanduk bergambar Gus Rommy, Bpk Mustakim, Gus Yasin yang bertuliskan calon Wakil Gubernur.

Pada saat itu memang terjadwal masa kampanye pemilihan Gubernur 2018, tetapi berdasarkan informasi yang diperoleh kegiatan yang dilaksanakan adalah hanya dalam rangka kegiatan Harlah PPP yang ke 45 dan bukan kegiatan kampanye.

⁶³ Laporan Pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah 2018

Atas adanya temuan dugaan pelanggaran kampanye dalam kegiatan harlah PPP, Panwas kabupaten Cilacap telah melakukan klarifikasi kepada Ketua Panitia Harlah PPP dan Ketua DPC PPP Kabupaten Cilacap. Berdasarkan fakta, keterangan dan kajian bahwa telah terbukti terjadi pelanggaran administrasi pada pelaksanaan Acara Hari Lahir (Harlah) ke 45 oleh DPC PPP Kabupaten Cilacap yaitu adanya kegiatan kampanye untuk pasangan calon nomor urut 1 dalam acara harlah tersebut yang tidak ada pemberituannya kepada pihak kepolisian, dan tidak bisa menunjukkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian terkait kegiatan kampanye tersebut, hal demikian telah memenuhi salah satu unsur pelanggaran, atas hal tersebut Panwas Kabupaten Cilacap telah merekomendasikan Kepada KPU Kabupaten Cilacap untuk memberikan sanksi administrasi terhadap DPC PPP Kabupaten Cilacap sesuai aturan yang berlaku.

Hasil tindak lanjut rekomendasi dari Panwas, berdasar surat KPU Kabupaten Cilacap nomor 123/PY.03-SD/3301/KPU-Kab/III/2018, KPU mengeluarkan sanksi berupa peringatan tertulis kepada DPC PPP Kabupaten Cilacap karena melanggar ketentuan pasal 40 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 dengan tidak dipenuhinya kewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, serta peringatan agar tidak mengulangi atau

melakukan pelanggaran kembali menurut peraturan yang berlaku.⁶⁴

D. Profil Anggota Panitia Pengawas Tahun 2018

1. Miftah Nuryanto, S.H (Ketua sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran)



Miftah Nuryanto lahir di Cilacap 29 Juli 1968, menjadi penyelenggara pemilu dan pilkada sejak tahun 2012 dan telah melewati 3 kali masa pemilihan, yaitu Pemilihan Bupati, Pemilihan Gubernur, dan Pemilihan Umum

untuk memilih anggota DPR RI, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Menurut orang yang lahir tanggal 29 Juli 1968 ini, dalam bekerja yang terpenting adalah praktek di lapangan, teori tidak akan berguna selama praktek di lapangan tidak berjalan.

Sekarang beliau memegang Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten Cilacap masa periode 2018-2023. Sebagai Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa beliau sudah sangat menguasai proses penyelesaian sengketa antara peserta pemilu

⁶⁴ Laporan Pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah 2018

dengan KPU. Walaupun sudah 3 kali melewati masa pemilihan tapi bagi Miftah Nuryanto tidak ada rasa lelah yang dialami, hal ini dikarenakan cara kerja yang diterapkan oleh beliau adalah cara kerja yang taktis dan efisien.

Sehingga cepat selesai dan tidak banyak memakan waktu. Prinsip Miftah Nuryanto selama bekerja di Bawaslu yaitu memandang Bawaslu sebagai organisasi yang seperti tubuh, apabila salah satu bagian tubuh mengalami sakit maka bagian tubuh yang lain ikut merasakan sakit juga. Oleh karena itu, apabila dari salah satu Pimpinan/Staf mengalami masalah dalam bekerja maka Pimpinan/Staf yang lain akan ikut membantu menyelesaikan masalah tersebut.⁶⁵

- Pengalaman Organisasi :
1. Resimen Mahasiswa Mahakarta Batalyon 4 UPN Veteran Yogyakarta (Tahun 1999 s.d 1995)
 2. Sekretaris BPD Desa Buntu (Tahun 2000 s.d 2015)
 3. Sekretaris RT 02 RW 04 Desa Buntu (Tahun 2000 s.d 2010)
 4. Sekretaris Komite SMP Negeri 1 Kroya (Tahun 2009 s.d 2015)

⁶⁵ Wawancara dengan Miftah Nuryanto, tanggal 10 Mei 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

5. Sekretaris BKAD
PNPM MP Kec.Kroya
(Tahun 2009 s.d 2015)

- Pengalaman : 1. PPL Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- kegiatan di 2. PPL Pemilu dan Wakil Bupati Tahun 2012
- Kepemiluan 3. Panwascam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013
4. Panwascam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2016
5. Panwas Kabupaten Cilacap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018
6. Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap (2018-2023)

2. Warsid, S.Pd (Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga)



Warsid lahir di Cilacap 18 Januari 1976, anak pertama dari tiga bersaudara yang dibesarkan dalam keluarga nelayan yang sederhana. Pada tahun 1982 memasuki bangku sekolah dasar di kampungnya

tinggal selama enam tahun. Di beberapa tingkatan kelas pernah dipercaya menjadi ketua kelas dan pernah sekali pada kelas empat menjadi juara kelas. Selesai sekolah dasar melanjutkan di SMP Negeri Jeruklegi Cilacap selama 3 tahun.

Di masa ini bersama dua saudara perempuan harus latihan mandiri karena ditinggal ibu merantau dan ayah yang sering pergi mencari ikan di sungai dalam beberapa hari. Namun demikian dalam hal pelajaran sekolah, termasuk siswa yang nilai pelajaran agama dan matematika cukup bagus, di kelas dua dan tiga ini juga dipercaya menjadi ketua kelas.

Setelah SMP melanjutkan sekolah di STM Negeri Cilacap selama 3 tahun dari tahun 1991-1994. Hampir di setiap semester di jenjang sekolah ini selalu menjadi juara kelas dan pada kelas dua dan tiga juga dipercaya menjadi ketua kelas. Pada usia remaja sekitar SMP-STM

tersebut lebih banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan ikatan remaja masjid Al-Mu'minuun di kampung. Bahkan sehari-hari untuk belajar dan tidur juga di masjid tersebut karena memang di rumah belum memiliki tempat tidur sendiri.

Selesai sekolah dari STM, karena nilai raport cukup bagus, disarankan oleh guru untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dan alhamdulillah diterima di IKIP Negeri Yogyakarta melalui program Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD). Pada jenjang pendidikan inilah Warsid merasa banyak mendapat pengalaman berorganisasi baik mulai menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan, Ketua Senat Mahasiswa Fakultas, Ketua Himpunan Mahasiswa Cilacap di Yogyakarta serta kegiatan sosial dan politik lainnya. Pengalaman menjadi Penyelenggara Pemilu sejak 2003-2013 sangat mendukung kinerjanya di Panwas Kabupaten Cilacap selaku Ketua merangkap Anggota yang mengkoordinir Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga.⁶⁶

Pengalaman Organisasi : 1. Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Otomotif
2. Ketua Senat Mahasiswa FPTK IKIP Yogyakarta

⁶⁶ Wawancara dengan Warsid, tanggal 10 Mei 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

3. Ketua Himpunan Mahasiswa Cilacap di Yogyakarta
4. Ketua Karang Taruna Kelurahan Tritih Kulon Cilacap
5. Sekretaris DPC Cilacap IKA UNY
6. Wakil Ketua ISNU Kab Cilacap
7. Ketua RT 3/I Kelurahan Tritih Kulon
8. Ketua Takmir Mushola Baiturrohmah RW 12 Tritih Kulon

- Pengalaman Kegiatan di Kepemiluan :
1. Koordinator Dikpol bagi masyarakat Kab Cilacap di 5 Distrik pada Pemilu 1999
 2. Anggota KPU Kab Cilacap 2003-2008
 3. Ketua KPU Kab Cilacap 2008-2013
 4. Ketua Panwas Pilbup Cilacap 2016-2017
 5. Anggota Panwas Pilgub Jateng 2017-2018
 6. Anggota Bawaslu Kab Cilacap 2018-2023

3. Erina Hastuti, S.S.,M.Pd (Koordinator Divisi SDM dan Organisasi)



Erina Hastuti lahir di Cilacap 8 Juni 1982, lulusan Sarjana Sastra Inggris Universitas Diponegoro Semarang dan Magister Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sebelas Maret Surakarta. Ayahnya berprofesi sebagai teknisi swasta,

dan ibu seorang Guru PNS Sekolah Dasar di Cilacap.

Beliau merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, semua kakaknya perempuan. Di Semester pertama dan kedua waktu kuliah Sarjana Sastra Inggris di Universitas Diponegoro beliau aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, sedangkan di waktu luang menjadi guru privat Bahasa Inggris untuk anak Sekolah Dasar (SD). Semester ketiga menjadi penyiar radio di channel 99 *Think Global Act Local* yang beralamat di Kalibanteng Semarang. Di radio banyak belajar berkomunikasi dengan pihak lain secara baik. Karirnya mencapai puncak saat menjadi penyiar di Radio PAS FM di Indonesia.

Resign menjadi penyiar radio, bermodal pengalaman berinteraksi dengan beberapa orang dikalangan bisnis menjadi modal untuk membuka bisnis Event Organizer Tour dan Travel di Semarang dan berhasil mengkaryakan 15 orang mahasiswa sebagai karyawannya.

Beliau juga pernah menjadi dosen di beberapa Perguruan Tinggi antara lain; Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Semarang, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap, Institut Agama Islam Imam Ghazali (Universitas Islam Al Ghazali), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, dan Politeknik Cilacap.

Saat ini Sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap periode 2018-2023 dan menjabat sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi. Tugas dan fungsi beliau adalah sebagai bagian berjenjang dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Provinsi dan Kabupaten membawahi 24 Panitia Pengawas Kecamatan, 284 Panitia Pengawas Desa se-Kabupaten Cilacap dan 5.869 Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Beliau berpegang kepada filosofi botol. Sebuah botol kalau diisi air mineral, harganya 3.000 (tiga ribuan), kalau diisi jus buah, harganya 10.000 (sepuluh ribuan), kalau diisi madu, harganya ratusan ribu, kalau diisi minyak wangi harganya bisa jutaan, kalau diisi air comberan, hanya akan dibuang dalam tong sampah karena tidak ada harganya. Sama-sama dikemas dalam botol tetapi berbeda nilainya, sebab isi yang ada di dalamnya berbeda.⁶⁷

⁶⁷ Wawancara dengan Erina Hastuti, tanggal 10 Mei 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

Pengalaman : BEM Kampus
Organisasi : APKOMINDO

Pengalaman kegiatan di
Kepemiluan :

1. Panwascam Pemilihan Bupati Cilacap 2016
2. Anggota Panwas Kabupaten Cilacap Pemilihan Gubernur 2018
3. Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap (2018-2023)

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Konteks Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

Pemilihan Umum tahun 2019 yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, merupakan sejarah baru dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Hal ini karena Pemilu diselenggarakan secara serentak pertama kali di Indonesia yang menggabungkan antara pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Pileg) dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) secara bersamaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilu serentak dilaksanakan pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sebagaimana jadwal tahapan Pemilu yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Melihat Peraturan KPU tersebut, tahapan pemilu serentak tahun 2019 dimulai pada bulan Oktober Tahun 2017.⁶⁸

Peserta pemilu tahun 2019 ada 3 (tiga) yakni yang pertama adalah partai politik untuk pemilu Anggota DPR dan DPRD, kedua Perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD serta Pasangan Calon yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol untuk Pilpres. Partai Politik (Parpol) peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Cilacap berjumlah 16, yaitu PKB,

⁶⁸ Laporan Pengawasan pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD tahun 2019

Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Garuda, Partai Berkarya, PKS, Partai Perindo, PPP, PSI, PAN, Partai Demokrat, PBB, dan PKPI.

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019



Pada pelaksanaan Pemilu 2019, jumlah pemilih di Kabupaten Cilacap yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) sebanyak 1.488.496 yang tersebar di 5.869 TPS dengan rincian pemilih laki-laki 746.142 dan pemilih perempuan 742.354. Jika dibandingkan dengan data pemilih Pemilihan Gubernur 2018, maka terdapat kenaikan jumlah pemilih dalam DPT sebesar 45.524 pemilih. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena penambahan pemilih pemula yang sudah memasuki usia 17 tahun pada tanggal 17 April 2019.

Sementara itu pada tahapan Pencalonan Presiden dan Calon Wakil Presiden pada Pilpres tahun 2019, dilaksanakan tanggal 4-10 Agustus 2018 dan penetapan pasangan calon peserta Pilpres tahun 2019 pada 20 September 2018. KPU menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin nomor urut 01, sementara pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendapatkan nomor urut 02.



Peserta Pilpres tahun 2019 bersama parpol yang mengusulkan

Pada tahapan pencalonan untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Cilacap, dari 16 Partai Politik peserta pemilu yang ada hanya 13 partai politik di Cilacap yang mengajukan calon, sedangkan tiga parpol lainnya tidak mengajukan calon. Jumlah keseluruhan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada pemilu tahun 2019 sebanyak 500 orang dengan rincian 302 laki-laki dan 198 perempuan.

Jumlah calon perseorangan untuk peserta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Tahun 2019 berdasarkan Keputusan KPU nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 DCT berjumlah 20 orang.

Selanjutnya menjelang pelaksanaan tahapan kampanye, KPU Kabupaten Cilacap melakukan rapat koordinasi dengan para tim kampanye dan pemangku kepentingan lainnya termasuk Bawaslu Kabupaten Cilacap untuk membahas persiapan kampanye. Berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu 2019, secara umum persiapan maupun pelaksanaan tahapan kampanye berjalan dengan lancar dan kondusif, meski masih terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu. Pelanggaran yang sering terjadi adalah tidak adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian yang harus dipenuhi oleh peserta pemilu.

Kemudian berkaitan dengan dukungan logistik Pemilu 2019, hasil pengawasan menunjukkan bahwa terhadap proses pengadaan dan distribusi logistik di KPU berjalan dengan lancar. Bawaslu Cilacap juga berkesempatan mengawasi secara langsung pada proses pencetakan surat suara di Jakarta, yang saat itu masih ditemukan satu kesalahan penulisan nama calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap. Terhadap hal tersebut, temuan segera dikoordinasikan dengan KPU Kabupaten untuk segera mendapat tanggapan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Adapun dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2019 yang dilaksanakan pada hari Rabu 17 April 2019 terlihat berjalan dengan lancar tidak ditemukan kejadian atau peristiwa khusus yang dapat mengakibatkan penghitungan dan pemungutan suara ulang. Hanya

ada satu kejadian di salah satu kelurahan yang sedang membuka kotak suara karena ada kesalahan penulisan data pemilih. Menurut pengakuan petugas saat itu, bahwa yang bersangkutan hanya berniat memperbaiki kesalahan dimaksud tanpa merubah perolehan suara hasil pemilu.

Terhadap hal ini dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten dan hasilnya disampaikan ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Dengan berbagai pertimbangan dan memastikan tidak ada manipulasi data dengan cara cek dan kroscek terhadap dokumen yang dimiliki oleh jajaran pengawas, maka kejadian tersebut tidak ditindaklanjuti dan tidak termasuk sebagai hal yang bisa membuat pemungutan suara ulang. Secara umum kekeliruan oleh petugas TPS adalah dalam menuangkan hasil pemungutan suara ke dalam sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara adalah pada kolom data pemilih dan penggunaan surat suara. Hal ini juga diduga akibat beban kerja KPPS yang cukup kompleks.

Selanjutnya untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara di kecamatan, berdasarkan laporan dari Panwascam relatif tidak ada masalah, artinya rekapitulasi di tingkat kecamatan berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon yang berakibat terhadap tertundanya proses rekapitulasi. Namun justru pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten ternyata masih ada koreksi dari Bawaslu Kabupaten Cilacap terhadap hasil rekapitulasi, baik dengan data pemilih, data penggunaan surat suara maupun data perolehan suara peserta pemilu 2019.

Terhadap koreksi tersebut para saksi pasangan calon dan KPU Kabupaten Cilacap telah

menerima dan memperbaiki kekeliruan dimaksud tanpa ada keberatan dari para saksi. Berikut data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilu 2019 Calon Presiden dan Wakil Presiden, perolehan suara Partai Politik dan perolehan suara DPD Jawa Tengah :

NO	DATA	JUMLAH	NO	PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih DPT	1.488.496	1	DPT	1.065.717
2	Jumlah Pemilih DPTb	4.925	2	DPTb	3.687
3	Jumlah Pemilih DPK	12.782	3	DPK	1.782
	Jumlah	1.506.203		Jumlah	1.082.186

Tingkat Partisipasi **71,82%**

Perolehan Suara Sah Pasangan Calon

01



Ir. H. JOKO WIDODO
Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN

775.304

02



H. PRABOWO SUBIANTO
H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

289.706

*) Sumber Data KPU Kab Cilacap

Perolehan Suara Paslon pada Pilpres 2019 di Kabupaten Cilacap.

Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu tahun 2019
di Kabupaten Cilacap.

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEH AN SUARA	NO	PARTAI POLITIK	PEROLEH AN SUARA
1	PKB	135.668	9	P Perindo	21.591
2	P GERINDRA	131.366	10	PPP	80.426
3	PDI Perjuangan	196.462	11	PSI	2.316
4	P Golkar	170.912	12	PAN	75.712
5	P NasDem	58.830	13	P HANURA	396
6	P Garuda	2.833	14	P Demokrat	59.934
7	P Berkarya	11.734	15	PBB	2.887
8	PKS	63.618	16	PKPI	656

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI JAWA TENGAH

87.718	21.365	51.906	76.075	29.078
				
ABDUL KHOLIK, SH., M.Si.	AGUS MUJAYANTO	Dr. H. BAMBANG SADONO, S.H., M.H.	Ir. H. BAMBANG SUTRISNO, MM.	BUDI YUWONO, S.H.
76.546	55.106	148.772	46.223	18.133
				
CASYTHA A. KATHMANDU, SE.	Dr. H. DARWITO, SE., MM.	DENTY EKA WIDI PRATIWI, SE., MH.	G.K.R AYU KOES INDRİYAH	ISNAIN AHMAD JUHARDANI, S.P.
205.933	4.467	6.760	29.446	7.224
				
Drs. H. JAMUN, M.Pd.I	Drs. JOKO J. PRIHATMOKO, M.Si.	KHOLISON, S.H.	Drs. M. ABDUL ROHIM	H. MUH MAHSUN, S.IP.
9.914	34.370	14.388	13.598	11.189
				
Drs. H. MUHTAR LUTFI, MM	MUJIBURROHMAN, S.S.	Drs. KH. MUQODDAM CHOLLI, MA.	H. NAIBUL UMAM EKO SAKTI, S.Ag., M.Si.	SOLEHIN, S.PD, MM.

Total Suara Sah : 948.211

*) Data KPU Kabupaten Cilacap

Perolehan Suara DPD RI Pemilihan Umum Tahun
2019 di Kabupaten Cilacap.

B. Profil Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa dan Pengawas TPS. Adapun keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa dan Pengawas TPS berasal dari kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota Partai Politik. Keanggotaan Bawaslu RI lima orang, Bawaslu Provinsi tujuh atau 5 orang, Bawaslu Kabupaten/Kota lima/tiga orang, Panwaslu Kecamatan tiga orang, Panwaslu Kelurahan/Desa satu orang dan Pengawas TPS berjumlah satu orang setiap TPS.

Pada Pemilu 2019 ada beberapa perubahan dalam proses penyelenggaraan pemilu, termasuk keberadaan lembaga pengawas pemilu di tingkat Kabupaten. Semula, pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota masih bersifat *ad-hoc* (sementara), namun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota bersifat permanen. Dari sisi jumlah keanggotaan Bawaslu Kabupaten, yang tadinya berjumlah tiga orang kini menjadi lima orang, kecuali di beberapa kota yang anggotanya masih berjumlah tiga orang.

Dalam pemilu yang diselenggarakan di Indonesia, pengawasan pemilu menjadi salah satu unsur penting dalam gelaran pesta demokrasi

elektoral guna memastikan dan menjamin penyelenggaraannya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Pada proses pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menjelang pemilu tahun 2019, Bawaslu membentuk tim seleksi yang terdiri dari dua tim, yakni Tim seleksi I yang terdiri dari Ketua: Dr. M. Mukhsin Jamil, Sekretaris: Dr. Ahwan Fanani, M.Ag., M.S., Dr. Tri Wuryaningsih, M.Si, Dr. Widayati, S.H., M.H., Dr. Suparji, S.H., M.H. Tim seleksi II yang terdiri dari Ketua Dani Muhtada, Ph.D., Sekretaris Siti Malaiha Dewi, S.Sos., M.Si, Arif Hidayat, S.H., M.H, Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M., AK,CA, Ricky Arnold Nggili.

Pengumuman sosialisasi pendaftaran calon Bawaslu dilakukan mulai 22 hingga 28 Juni 2018. Rangkaian tahapan pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota meliputi pendaftaran, perbaikan berkas persyaratan, pemeriksaan administrasi, tes tertulis, tes psikologi, masukan masyarakat, tes kesehatan, tes wawancara, uji kelayakan dan kepatutan hingga pengumuman calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih pada 14 Agustus 2018. Lima Anggota Bawaslu terpilih dari Kabupaten Cilacap adalah Bachtiar Hastiarto, Warsid, Umi Fadilah, Miftah Nuryanto, Erina Hastuti.

Selanjutnya, lima calon Anggota Bawaslu Kabupaten terpilih tersebut menjalani pelantikan bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota lainnya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Rabu 15 Agustus 2018. Ketua Bawaslu RI Abhan melantik sebanyak 1.914 Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia masa jabatan 2018-2023. Pelantikan tersebut memecahkan Rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Pelantikan Pejabat Publik Terbanyak.



Dokumentasi Pelantikan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di Jakarta.

Setelah dilantik, Anggota Bawaslu kabupaten Cilacap segera menggelar pleno guna menyusun struktur Bawaslu. Hasil pembagian Divisi di Bawaslu Kabupaten Cilacap tertuang pada Berita Acara Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi Nomor : 001/BA/Bawaslu-Prov.JT-07/HK.01.01/VIII/2018 tertanggal 18 Agustus 2018 sebagaimana berikut:

No	Nama	Jabatan	Divisi
1	Bachtiar Hastiarto, S.H., M.H.	Ketua	Penindakan Pelanggaran
2	Warsid, S.Pd.	Anggota	Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga
3	Umi Fadilah, S.Ag., M.Si.	Anggota	Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi

4	Miftah Nuryanto, S.H.	Anggota	Penyelesaian Sengketa
5	Erina Hastuti, S.S., M.Pd.	Anggota	Sumber Daya Manusia dan organisasi

Bawaslu Kabupaten Cilacap menempati sebuah kantor di Jalan Jend. Sudirman No.200 bekas kantor PMI Kabupaten Cilacap yang kondisinya sudah diperbaiki dan layak untuk menjadi sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap.



Foto kantor Bawaslu Cilacap Tahun 2019



Foto kantor Bawaslu Cilacap saat ini.

Terkait dengan anggaran, Bawaslu Cilacap mendapat anggaran yang diserahkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilu 2019 sebanyak Rp. 22.966.946.000,- dengan penyerapan anggaran berkisar pada angka 75% atau dalam rincian Rp. 18.949.922.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari honor pengawas pemilihan, sosialisasi partisipatif, pemenuhan kebutuhan kantor dan lain-lain. Sebab, Kabupaten Cilacap memiliki 24 Kecamatan 284 Desa/Kelurahan dan 5.869 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2019.

Untuk menunjang kinerja pengawasan, Bawaslu Kabupaten Cilacap dibantu dengan kesekretariatan. Beberapa personil yang terlibat dalam sekretariat ini dapat dilihat dalam table berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Testyana Intani, S.Stp., M.Si.	Koordinator Sekretariat
2	Irni Isriana Sari, S.E.	Bendahara Pengeluaran Pembantu
3	Joko Waluyo, S.Sos., S.H.	Staf Sengketa
4	Indra Pamungkas, S.Sos.	Staf Keuangan
5	Sansan Sanjaya	Staf Pengawasan
6	Galang Luh Prasetyo, S.Pd.	Staf Keuangan
7	Barata Setya Aji, S.H.	Staf SDM dan Organisasi
8	Arum Sekar Agatri, S.H.	Staf Penindakan
9	Agung Bagus Pambudi, S.E.	Staf Keuangan
10	Herdiaz Passananda, S.E.	Staf Keuangan
11	Ardia Nur Ali Made Sudrajat, S.Kom.	Staf Pengawasan
12	Lukman Nur Hakim, S.H.I., M.H.	Staf Penindakan
13	Bangun Priyantoso, S.H.	Staf SDM dan Organisasi
14	Muhammad Abdul Fattah, S.Kom.	Staf Humas dan Data Informasi
15	Prima Hutama Paristya, S.H	Staf Sengketa
16	Ainun Muarifah	Pramusaji

17	Imam Supardi	Tenaga Kebersihan
18	Subur	Tenaga Keamanan

Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Cilacap, Bawaslu juga membentuk jajaran di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Di tingkat kecamatan, ada 72 anggota Panwaslu Kecamatan. Adapun di desa/kelurahan ada sebanyak 284 pengawas.

C. Peristiwa Menarik Terkait Pengawasan Pemilu 2019

Dalam Pemilu 2019, Bawaslu Kabupaten Cilacap menerima permohonan sengketa proses pemilu oleh salah satu partai politik peserta pemilu. Pemohon dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap, dengan obyek permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Berita Acara KPU Kabupaten Cilacap Nomor: 145/PL.01.1-BA/3301/Kab/IX/2018 tentang hasil klarifikasi tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu 2019. Pokok permasalahan sengketa proses pemilu dikarenakan kekurangan berkas persyaratan sehingga berakibat dua bakal calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Putusan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui proses mediasi tersebut berhasil mencapai mufakat pada tanggal 12 September 2018, dan selanjutnya putusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Cilacap untuk melaksanakan putusan Bawaslu Kabupaten Cilacap tersebut. Berdasarkan

putusan bawaslu tersebut, KPU Kabupaten Cilacap menyatakan memenuhi syarat (MS) terhadap dua calon anggota legislatif di atas.

D. Profil Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap Pemilu 2019

Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Cilacap diawasi oleh Bawaslu Kabupaten bersama jajarannya, 5 orang yang menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap adalah:

1. Bachtiar Hastiarto



Bachtiar Hastiarto mengawali pendidikannya di TK Pius Cilacap dan di SD pada sekolah yang sama, kemudian dilanjutkan ke SMP N 1 Cilacap, SMA N 1 Cilacap, Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum

Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Mengawali kiprahnya sebagai penyelenggara pemilu dimulai ketika menjadi anggota pantarlih (panitia pendaftaran pemilih) hingga tahun 2018 menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap. Pengalaman pertama sebagai penyelenggara pemilu pada tahun 1987 membuat bachtiar begitu prihatin, karena pemilu yang Luber Jurdil ternyata hanya slogan belaka. Penguasa Orde Baru saat itu ternyata justru menyelenggarakan Pemilu dengan penuh kecurangan, bahkan intimidasi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Bachtiar mulai berkuat didunia pengawasan saat menjadi Anggota Forum Lintas Pelaku (FLP) pada program jaring pengaman sosial (JPS) kabupaten Cilacap, dan selanjutnya menjadi wartawan televisi di media televisi lokal Cilacap dan Banyumas. Sementara untuk Pengawasan di bidang kepemiluan baru diawali sejak tahun 2012 hingga tahun 2019 ini.

2. Warsid



Laki-laki kelahiran Cilacap tahun 1976 ini, mulai mengeluti dunia demokrasi dan pemilu diawali sejak kuliah di Yogyakarta. Keterlibatan berbagai organisasi dan kegiatan sosial politik saat itu, ikut membentuk karakternya hingga menjadi penyelenggara pemilu. Pengalamannya menjadi penyelenggara pemilu mulai menjadi Anggota dan Ketua KPU Kabupaten Cilacap, Anggota dan Ketua Panwaslu Kabupaten Cilacap, ikut menunjang kinerjanya dalam menjalankan tugasnya menjadi pengawas pemilu saat ini.⁶⁹

⁶⁹ Wawancara dengan Warsid, tanggal 10 Mei 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

3. Miftah Nuryanto



Miftah Nuryanto lahir di Cilacap 29 Juli 1968, menjadi penyelenggara pemilu dan pilkada sejak tahun 2012 dan telah melewati 3 kali masa pemilihan, yaitu Pemilihan Bupati, Pemilihan Gubernur, dan Pemilihan Umum

untuk memilih anggota DPR RI, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Menurut orang yang lahir tanggal 29 Juli 1968 ini, dalam bekerja yang terpenting adalah praktek di lapangan, teori tidak akan berguna selama praktek di lapangan tidak berjalan. Sekarang beliau memegang Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten Cilacap masa periode 2018-2023.

Sebagai Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa beliau sudah sangat menguasai proses penyelesaian sengketa antara peserta pemilu dengan KPU. Walaupun sudah 3 kali melewati masa pemilihan tapi bagi Miftah Nuryanto tidak ada rasa lelah yang dialami, hal ini dikarenakan cara kerja yang diterapkan oleh beliau adalah cara kerja yang taktis dan efisien. Sehingga cepat selesai dan tidak banyak memakan waktu.

Prinsip Miftah Nuryanto selama bekerja di Bawaslu yaitu memandang Bawaslu sebagai organisasi yang seperti tubuh, apabila salah satu bagian tubuh mengalami sakit maka bagian tubuh yang lain ikut merasakan sakit juga. Oleh

karena itu, apabila dari salah satu Pimpinan/Staf mengalami masalah dalam bekerja maka Pimpinan/Staf yang lain akan ikut membantu menyelesaikan masalah tersebut.⁷⁰

4. Erina Hastuti



Perempuan kelahiran Cilacap 8 Juni 1982 ini adalah lulusan Sarjana Sastra Inggris Undip Semarang dan Magister Pendidikan Bahasa Inggris UNS Surakarta. Ayahnya berprofesi sebagai teknisi swasta, dan ibu seorang Guru PNS

Sekolah Dasar di Cilacap. Erina merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, semua kakaknya perempuan.

Di Semester pertama dan kedua waktu kuliah Sarjana Sastra Inggris di Universitas Diponegoro sudah aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, sedangkan di waktu luang menjadi guru privat Bahasa Inggris untuk anak Sekolah Dasar (SD). Semester ketiga menjadi penyiar radio di channel 99 *Think Global Act Local* yang beralamat di Kalibanteng Semarang. Karirnya mencapai puncak saat menjadi penyiar di Radio PAS FM di Indonesia. *Resign* menjadi penyiar radio, membuka bisnis *Event Organizer Tour* dan *Travel* di Semarang

⁷⁰ Wawancara dengan Miftah Nuryanto, tanggal 10 Mei 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

dan berhasil mengkaryakan 15 orang mahasiswa sebagai karyawannya.

Di samping itu Erina pernah menjadi Dosen di beberapa Perguruan Tinggi di Cilacap maupun Purwokerto. Saat ini menjabat sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap periode 2018-2023 Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi. Menurutnya botol kalau diisi air mineral seharga tiga ribuan, kalau diisi jus buah harganya sepuluh ribuan, kalau diisi madu harganya ratusan ribu, kalau diisi minyak wangi harganya bisa jutaan, kalau diisi air comberan, hanya akan dibuang dalam tong sampah karena tidak ada harganya. Sama-sama dikemas dalam botol tetapi berbeda nilainya, sebab isi yang ada di dalamnya berbeda.⁷¹

5. Umi Fadilah



Lahir di Cilacap 19 April 1974, Umi adalah Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap yang menjadi Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi. Lulusan IAIG Sarjana Komunikasi dan Penyiaran Islam serta

Magister Administrasi Publik di Unsoed Purwokerto ini, berpandangan bahwa menjadi Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi

⁷¹ Wawancara dengan Erina Hastuti, tanggal 10 Mei 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

merupakan tanggung jawab yang besar. Tetapi dengan pengalaman organisasinya selama ini, tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Perempuan yang aktif di beberapa organisasi kelompok perempuan, Perkumpulan NU dan organisasi kemasyarakatan lainnya, memiliki banyak pengalaman kepemiluan mulai menjadi Ketua Panwascam Adipala pada Pemilu dan Pilkada hingga sebagai Panwas tingkat Kabupaten. pengalamannya itu semakin menunjukkan kapasitasnya sebagai penyelenggara pemilu yang handal.⁷²

⁷² Wawancara dengan Umi Fadilah, tanggal 10 Mei 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

PENUTUP



PENUTUP

Buku Napak Tilas ini disusun sebagai salah satu sumber refleksi diri lembaga Bawaslu yang memiliki tugas dan fungsi menjaga Hak pilih dalam pemilu maupun pemilihan. Segala tantangan yang wajib dipersiapkan adalah bagaimana bawaslu bisa memasang badan dalam garda terdepan pengawasan kepemiluan, di saat teknologi sudah semakin maju, demokrasi semakin terbuka, namun kadang kala partisipasi generasi muda terhadap pesta demokrasi menurun bahkan bersikap acuh tak acuh.

Menjadi seorang pengawas pemilu bukanlah hal yang mudah, karena berbeda dengan lembaga penyelenggara pemilu lainnya, jajaran pengawas wajib mempelajari pedoman pengawasan selain Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017. Di Setiap tahapan pemilu atau pemilihan ada peraturan KPU yang merupakan turunan dari Undang-undang, jajaran Bawaslu Pun memiliki perbawaslu yang harus dipedomani oleh pengawas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Selain hal tersebut, pengawas pemilu juga wajib tau dengan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan ASN, ataupun perangkat desa. Modal ini saja tidak cukup, karena jajaran pengawas wajib memiliki sikap yang netral demi terjaganya integritas pengawas pemilu.⁷³

Melihat fungsi dan peran Badan pengawas pemilu yang cukup kompleks, setiap divisi memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda meski semua mengacu pada peningkatan pencegahan pelanggaran pemilu maupun

⁷³ Teguh Purnomo, dkk, *Catatan Pengawasan Pemilu di Jawa Tengah*, (Semarang : Bawaslu Provinsi Jawa Tengah,2017),hlm.3.

pemilihan. Penerbitan buku ini merupakan bagian dari upaya mendekatkan diri Bawaslu ke masyarakat. Agar masyarakat mengerti pentingnya peduli akan proses demokrasi, menggunakan hak pilih, menolak segala bentuk black campaign, money politik sehingga pemilu dan pemilihan yang bermartabat bisa segera terwujud.⁷⁴

Satu hal yang berbeda ketika pengawas berubah dari kepanitian menjadi badan, yaitu fungsi kewenangannya segala putusan sengketa proses pemilu bersifat final dan mengikat, artinya, apapun hasil dari putusan Bawaslu harus dilaksanakan dan sah secara hukum. Selain ini memperkuat kedudukan Bawaslu dengan tanggung jawabnya yang tidak kecil, di jajaran Bawaslu Pun harus mampu memperkaya diri dengan kualitas diri yang mumpuni dan bisa diandalkan.

Divisi pencegahan dan hubungan antar lembaga, dibawah naungan divisi ini sebuah PR besar bagi lembaga adalah bagaimana masyarakat luas yang telah memiliki hak pilih merasa terpanggil untuk menjadi salah seorang pengawas partisipatif. Jumlah Daftar Pemilih Tetap yang tidak berimbang dengan pengawas pemilu menjadi sebuah alasan besar pentingnya peran para partisipan memberikan sumbangsuhnya dalam demokrasi kita. Bawaslu Cilacap selalu membuka diri untuk bekerja sama dengan Ormas, Universitas, Tokoh Agama ataupun *stakeholder* lainnya.⁷⁵

Divisi Hukum dan data Informasi dituntut untuk bisa memberikan keterbukaan informasi dalam hal

⁷⁴ Khoirul Saleh, dkk, *Suluk Sang Pengawas Pemilu*, (Yogyakarta:Bawaslu Demak, 2019), hml.218.

⁷⁵ Komisioner Bawaslu dan Staf Bawaslu Kabupaten Pekalongan, *Bukan Catatan Kaki Demokrasi*, (Pekalongan: Bawaslu Kabupaten Pekalongan, 2019), hml.55.

kepemiluan, baik berupa regulasi, penggunaan anggaran, pencapaian kinerja ataupun hasil hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh lembaga. Setiap masa pemilihan dan pemilu, ketika KPU mengeluarkan peraturan sebagai pedoman pelaksanaan tahapan, Bawaslu mengeluarkan pedoam tentang cara pengawasan sesuai dengan tahapan yang berlaku. Ini adalah sebuah tantangan yang besar, bahwa menjadi seorang pengawas pemilu tidak boleh cepat merasa puas akan satu hal, karena regulasi bersifat dinamis.

Lain hal dengan problematika SDM dan Organisasi. Divisi ini terlihat tidak begitu dikenal, namun segala permasalahan organisasi bersumber dari SDM. Bagaimana ritme yang dibangun untuk menggerakkan sebuah lembaga yang bertujuan menjaga Hak Pilih Rakyat bisa tetap dan selalu kondusif mengingat latar belakang komisioner yang tidak sama. Namun ketika menjadi seorang pengawas pemilu, kepentingan Lembaga dan Negara wajib untuk dijadikan prioritas dibandingkan kepentingan pribadi ataupun golongan. Divisi ini juga bergandengan dengan tugas Pendidikan dan Pelatihan. Dimana tugas ini memiliki tujuan untuk memperkaya potensi diri menjadi pengawas yang selalu siap di garda depan kepengawasan.

Buku Napak Tilas ini dibuat oleh team Bawaslu Cilacap melalui beberapa proses yang panjang. Penulisan sejarah pengawasan dimulai tahun 2004 hingga 2019 dari berbagai pemilihan dan pilkada. Alur dari pembuatan buku ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu merancang kerangka buku, pengumpulan data, penulisan, editing, layout hingga akhir tahapan pencetakan. Kesulitan memperoleh data dimulai pada edisi tahun 2004 karena secara data, di badan Arsip tidak ditemukan rekam naskah, sehingga team harus terjun ke lapangan untuk mencari sumber yang valid.

Kala itu jajaran panwaskab masih berjumlah 5 orang yang diwakilkan oleh beberapa unsur. Pengumpulan informasi membutuhkan waktu yang cukup panjang, karena domisili dari para pelaku yang berpindah tempat, ada pula yang sudah terlupa memorinya, sehingga butuh waktu yang cukup panjang.

Buku ini terdiri empat bagian, diantaranya setiap tahunnya terdiri atas beberapa bagian, seperti bagian pertama berisi tentang konten peristiwa setiap tahunnya. Konten berisi tentang data real yang sesuai dengan tahapan dan bisa di cek kebenarannya dengan data yang tersanding di KPU. Profil kelembagaan menceritakan tentang kondisi kantor panwaskab kala menjadi kepanitian, dimana segala tugasnya di dukung oleh bantuan Pemda setempat, fasilitas kantor yang mendukung kinerja kepengawasan dan deskripsi kondisi fisik tempat bekerja pengawas pemilihan dan pilkada. Pada bagian ketiga dijelaskan bahwa setiap tahapan pemilihan atau pilkada memiliki beberapa peristiwa menarik yang memicu adrenalin seorang pengawas. Dan pada bagian terakhir dijelaskan siapa saja yang kala pemilihan maupun pilkada memiliki amanah untuk menjadi anggota pengawas pemilihan kabupaten.

Napak tilas ini merangkum banyak peristiwa bersejarah di kabupaten cilacap, diantaranya di tahun 2012 ada kisah calon yang diduga melakukan praktik politik uang, dimana sudah sampai penelusuran penemuan barang bukti namun, barang bukti tersebut hilang di kantor panwaskab. Ada juga di tahun 2014 bercerita tentang penelusuran dugaan yang berijazah palsu yang dilakukan oleh salah satu calon anggota legislatif kala itu.

Dan kisah menarik lainnya yang tak kala heboh tentang pelanggaran pasal 71 UU 10 tahun 2016 tentang dilarangnya seorang incumbent melakukan perpindahan jabatan dalam kurun waktu 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai DTC. Serta buku ini memiliki banyak cerita yang patut untuk dibaca.

Kisah perjuangan menjadi pengawas pemilu dan pilkada dari masa ke masa yang terangkum dalam buku ini diharapkan bisa menjadi acuan bahwasanya menjadi pengawas pemilu adalah sebuah tugas mulia. Tugas yang harus dilaksanakan dengan kesungguhan hati, mengedepankan netralitas penyelenggara dan selalu berpegang teguh pada integritas kerja.⁷⁶

Tentu saja kisah para pengawas terdahulu bisa dijadikan pedoman sebagai dasar refleksi diri menjadi pengawas yang lebih tangguh dalam menghadapi berbagai macam pelanggaran pemilu yang variatif jenisnya sekarang, meski tetap saja macam pelanggaran bisa dikelompokan sesuai dengan jenisnya, yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran kode etik. Melihat banyaknya pelanggaran menjadi seorang pengawas pemilu juga wajib mawas diri karena gerak gerik kinerjanya adalah ruang publik yang bisa diawasi dan dilaporkan jika tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.⁷⁷

Berbagai sarana publikasi yang dilakukan jajaran Bawaslu kabupaten Cilacap pada khususnya, semoga saja bisa menjadi sebuah ikhtiar yang menghasilkan

⁷⁶ Fritz Edward Siregar, *Aparatur Sipil Negara Dalam Perebutan Kekuasaan Di Pilkada*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hml.25.

⁷⁷ Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah, *Pilkada Dalam Gurita Corona*, (Semarang: Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, 2022), hml.7.

peningkatan kepedulian WNI yang telah memiliki hak pilih untuk ikut serta mengawal dan mensukseskan pemilu yang bermartabat.

Pemilu dan pemilihan yang berjalan sukses tanpa ada pelanggaran pun itu bisa menjadi tolak ukur pengawas pemilu yang telah maksimal dalam menjalankan fungsi pencegahan di segala bidang. Harapannya buku yang kami kemas bisa membawa manfaat bagi para pembaca, dan terbuka lebar jika ada saran yang berfungsi menyempurnakan buku ini menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Purnomo, Teguh, dkk, *Catatan Pengawasan Pemilu di Jawa Tengah*, Semarang : Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, 2017.

Bawaslu, Komisioner dan Staf Bawaslu Kabupaten Pekalongan, *Bukan Catatan Kaki Demokrasi*, Pekalongan: Bawaslu Kabupaten Pekalongan, 2019.

Salah, Khoirul, dkk, *Suluk Sang Pengawas Pemilu*, Yogyakarta: Bawaslu Demak, 2019.

Edward Siregar, Fritz , *Aparatur Sipil Negara Dalam Perebutan Kekuasaan Di Pilkada*, Jakarta : Konstitusi Press, 2020.

Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah, Koordinator, *Pilkada Dalam Gurita Corona*, Semarang : Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, 2022.

Laporan

Laporan Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004

Laporan Pengawasan Pilkada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2007

Laporan Pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah 2008

Laporan Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009

Laporan Pengawasan Pilkada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017

Laporan Pengawasan pemilihan Umum pPresiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupen/Kota dan DPD tahun 2019

Laporan Pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah 2018

Wawancara

Yoes Sachri, Diwawancarai oleh Tim Buku Sejarah Bawaslu Cilacap. April 2022, Cilacap Jawa Tengah.

Muhammad Fatikhun, Diwawancarai oleh Tim Buku Sejarah Bawaslu Cilacap. April 2022, Cilacap Jawa Tengah

Mukti Wibowo, Diwawancarai oleh Tim Buku Sejarah Bawaslu Cilacap. April 2022, Cilacap Jawa Tengah

Slamet Riyanto, Diwawancarai oleh Tim Buku Sejarah Bawaslu Cilacap. April 2022, Cilacap Jawa Tengah

Tazkirotul Azmi, Diwawancarai oleh Tim Buku Sejarah Bawaslu Cilacap. April 2022, Cilacap Jawa Tengah

Sarwo Mumpuni, Diwawancarai oleh Tim Buku Sejarah Bawaslu Cilacap. April 2022, Cilacap Jawa Tengah

Puji Zariat, Diwawancarai oleh Tim Buku Sejarah Bawaslu Cilacap. April 2022, Cilacap Jawa Tengah

Sulistiyo Dwi Cahyo, Diwawancarai oleh Tim Buku Sejarah Bawaslu Cilacap. April 2022, Cilacap Jawa Tengah

Yusriani Nur Farida, Diwawancarai oleh Tim Buku Sejarah Bawaslu Cilacap. Mei 2022, Cilacap Jawa Tengah

Tunut Widodo, Diwawancarai oleh Tim Buku Sejarah Bawaslu Cilacap. Mei 2022, Cilacap Jawa Tengah

Sugeng Hariyadi, Diwawancarai oleh Tim Buku Sejarah Bawaslu Cilacap. Mei 2022, Cilacap Jawa Tengah

Sani Arianto, Diwawancarai oleh Tim Buku Sejarah Bawaslu Cilacap. Mei 2022, Cilacap Jawa Tengah

Sumarsono, Diwawancarai oleh Tim Buku Sejarah Bawaslu Cilacap. Mei 2022, Cilacap Jawa Tengah

Helmy Nur Adiyansyah, Diwawancarai oleh Tim Buku Sejarah Bawaslu Cilacap. Mei 2022, Cilacap Jawa Tengah

Miftah Nuryanto, Diwawancarai oleh Tim Buku Sejarah Bawaslu Cilacap. Mei 2022, Cilacap Jawa Tengah

Umi Fadilah, Diwawancarai oleh Tim Buku Sejarah Bawaslu Cilacap. Mei 2022, Cilacap Jawa Tengah

Warsid, Diwawancarai oleh Tim Buku Sejarah Bawaslu Cilacap. Mei 2022, Cilacap Jawa Tengah

Erina Hastuti, Diwawancarai oleh Tim Buku Sejarah Bawaslu Cilacap. Mei 2022, Cilacap Jawa Tengah

Hastiarto, Bachtiar. Diwawancarai oleh Tim Buku Sejarah Bawaslu Cilacap. Mei 2022, Cilacap Jawa Tengah

Media Internet

Kab-cilacap.kpu.go.id/arsip/detail/36/dpt-pemilihan-gubernur-dan-wakil-gubernur-2008.

Buku Napak Tilas Sejarah Pengawas Pilkada dan Pemilu Kabupaten Cilacap Tahun 2004 - 2019 merupakan karya yang sarat akan nilai sejarah yang tinggi, dengan menyuguhkan sejarah berjalannya demokrasi di Indonesia, khususnya tentang pengawasan pilkada dan pemilu yang terselenggara di Kabupaten Cilacap, dari kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2019 secara holistik dan rigid. Pemilu dan pilkada meninggalkan berbagai macam residu dengan ragam dinamika, berlangsung secara dinamis, serta pelajaran yang bisa menjadi bahan evaluasi berharga demi kinerja pengawasan yang lebih Profesional.

Buku ini mencoba membuka kembali histori berharga, dengan menyajikan informasi penting berlangsungnya pilkada dan pemilu dari masa ke masa dengan tulisan yang sederhana. dalam penyusunannya, tim penulis mencoba menyajikan data dan informasi sejarah dengan penuh optimisme dapat mendapatkan informasi data yang kredibel dan bisa membuka histori yang belum diketahui oleh publik dari para pelaku sejarah pengawasan pilkada dan pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mengalami transformasi dari lembaga ad hoc Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu), hal ini menunjukkan upaya serius dalam mengawasi pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah secara imparial.

Bawaslu Kabupaten Cilacap, Ketua Bachtiar Hastiarto, S.H., M.H., anggota Erina Hastuti S.S, M.Pd, Miftah Nuryanto, S.H., Umi Fadilah, S.Ag., M.Si., Warsid S.Pd., Koordinator Sekretariat Chandra Hartanto, S.Sos.



Sekretariat :
Jl. Jend. Sudirman No.200, Cilacap
Telp. (0282) 5390269

